

PENGANTAR

AKUNTANSI LANJUTAN

Siti Mudawanah ▪ Nurhafiah Soraya ▪ Rahmatia ▪
Hafid F Habibi ▪ Pricilia Joice Pesak ▪ Adi Dwi Purnomo ▪
Irawati ▪ Hanifah ▪ Wajib Ginting ▪ Agnes Eyne Banea ▪
Helly Aroza Siregar ▪ Ahmad Gazali





PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN

Siti Mudawanah ■ Nurhaflah Soraya ■ Rahmatia
■ Hafid F Habibi ■ Pricilia Joice Pesak ■
Adi Dwi Purnomo ■ Irawati ■ Hanifah ■
Wajib Ginting ■ Agnes Eyne Banea ■
Helly Aroza Siregar ■ Ahmad Gazali

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN

Hak Cipta © 2024 pada penulis.

Penulis	. Siti Mudawanah ■ Nurhafлах Soraya ■ Rahmatia ■ Hafid F Habibi ■ Pricilia Joice Pesak ■ Adi Dwi Purnomo ■ Irawati ■ Hanifah ■ Wajib Ginting ■ Agnes Eyne Banea ■ Helly Aroza Siregar ■ Ahmad Gazali
Editor	. Tim Penerbit
Setting dan Layout	. Tim Penerbit
Desainer Sampul	. Tim Penerbit
Cetakan 1	. Juni 2024
Diterbitkan oleh	. CV. Edupedia Publisher
Alamat	. Jl. Trajaya, Palasah, Kab. Majalengka, Jawa Barat Telp/WA. 0822-1856-0919 edupedia.publisher@gmail.com
ISBN	. 978-623-8643-20-2

Anggota IKAPI No. 465/JBA/2023

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Edupedia Publisher.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Buku ini dengan judul “PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN”. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep lanjutan dalam akuntansi, yang sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi di bidang ini. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek akuntansi lanjutan yang relevan bagi praktisi, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang ini.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan Bab 1 yang membahas pengantar akuntansi lanjutan. Bab ini menjelaskan bahwa akuntansi lanjutan merupakan pengembangan dari akuntansi keuangan dasar yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih mendetail dan relevan bagi pengambil keputusan. Sejarah dan perkembangan akuntansi lanjutan juga disinggung untuk memberikan konteks mengenai evolusi praktik akuntansi ini.

Pada Bab 2, pembahasan beralih ke standar akuntansi lanjutan, di mana pembaca diperkenalkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peran penting International Financial Reporting Standards (IFRS) serta Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dalam konteks akuntansi lanjutan. Bab ini juga membahas pentingnya kesesuaian standar akuntansi dengan prinsip-prinsip akuntansi lanjutan.

Bab 3 fokus pada topik penyusutan dan amortisasi, menjelaskan definisi, tujuan, serta metode-metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan untuk aktiva tetap maupun amortisasi untuk aktiva tidak berwujud.

Bab 4 membahas pengakuan pendapatan, termasuk konsep, prinsip, serta berbagai metode pengakuan pendapatan seperti Full Accrual, Accrual Modified, dan Cash Basis. Pengaruh transaksi tertentu terhadap pengakuan pendapatan juga dianalisis di sini.

Bab 5 mengulas akuntansi persediaan, meliputi pengertian, metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, dan Weighted Average, serta dampak dari perubahan harga terhadap metode penilaian ini terhadap laporan keuangan.

Bab 6 membahas akuntansi untuk investasi, termasuk definisi investasi, metode-metode akuntansi investasi seperti Metode Ekuitas, Cost, dan Fair Value, serta dampak dari pilihan metode ini terhadap laporan keuangan.

Bab 7 membahas akuntansi leasing, termasuk pengertian leasing, jenis-jenisnya seperti operasional dan finansial, serta dampak dari keputusan leasing terhadap laporan keuangan perusahaan.

Bab 8 membahas akuntansi konsolidasi, dengan menjelaskan pengertian konsolidasi, metode-metode konsolidasi seperti persentase kepemilikan dan akuisisi, serta dampak konsolidasi terhadap laporan keuangan.

Bab 9 mengulas akuntansi pajak, mencakup definisi pajak penghasilan, dampaknya terhadap laporan keuangan, strategi perencanaan pajak, dan proses pelaporan pajak.

Bab 10 membahas akuntansi lingkungan, termasuk pengertian akuntansi lingkungan, metode pengukuran dan pelaporan kinerja lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan dalam akuntansi lingkungan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan.

Bab 11 membahas etika dalam akuntansi lanjutan, menjelaskan pentingnya etika, standar etika profesional, kasus-kasus etika dalam konteks akuntansi lanjutan, dan konsekuensi dari pelanggaran etika dalam praktik akuntansi.

Bab 12 sebagai penutup membahas audit dan jaminan, termasuk pengertian audit, proses audit dari perencanaan hingga pelaporan, standar audit dan jaminan, serta pengaruh audit terhadap laporan keuangan.

Akhirnya, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Majalengka, Juni 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iv
Bab I. Pengantar Akuntansi Lanjutan	1
A. Definisi Akuntansi Lanjutan	1
B. Peran dan Tujuan Akuntansi Lanjutan	3
C. Sejarah dan perkembangan Akuntansi Lanjutan	5
Bab II. Standar Akuntansi Lanjutan	10
A. Tinjauan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkait	10
B. Peran International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam Akuntansi Lanjutan	13
C. Peran Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dalam Akuntansi Lanjutan	15
D. Kesesuaian Standar Akuntansi dengan prinsip-prinsip Akuntansi Lanjutan	19
Bab III. Penyusutan dan Amortisasi	24
A. Definisi dan Tujuan Penyusutan	24
B. Metode Penyusutan: Garis Lurus, Saldo Menurun, dan Unit Produksi	29
C. Penyusutan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud	35
D. Amortisasi dan Metode-metode Amortisasi	36
Bab IV. Pengakuan Pendapatan	40
A. Konsep Dasar dan Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan	40
B. Konsep dan Prinsip Pengakuan Pendapatan	42
C. Metode Pengakuan Pendapatan	42

Bab V. Akuntansi Persediaan	66
A. Pengertian Persediaan	66
B. Metode Penilaian Persediaan: FIFO, LIFO, Weighted Average	68
C. Pengaruh perubahan harga terhadap metode penilaian persediaan	74
D. Pengaruh FIFO, LIFO, dan Weighted Average terhadap laporan keuangan	77
Bab VI. Akuntansi untuk Investasi.....	81
A. Pengertian Investasi.....	81
B. Metode Akuntansi Investasi: Metode Ekuitas, Metode Cost, Metode Fair Value	83
C. Pengaruh Metode Akuntansi Investasi terhadap Laporan Keuangan	86
D. Analisis Risiko dan Pengaruhnya terhadap Akuntansi Investasi	89
Bab VII. Akuntansi Leasing.....	94
A. Pengertian Leasing.....	94
B. Jenis-jenis Leasing	96
C. Pengaruh Leasing terhadap Laporan Keuangan.....	96
D. Analisis Keputusan Leasing.....	99
Bab VIII. Akuntansi Konsolidasi	101
A. Pengertian Konsolidasi.....	101
B. Metode Konsolidasi: Metode Persentase Kepentingan, Metode Akuisisi.....	102
C. Pengaruh Konsolidasi terhadap Laporan Keuangan.....	109
D. Analisis Kinerja Perusahaan Konsolidasi ..	112
Bab IX. Akuntansi Pajak	115
A. Pengertian Pajak Penghasilan	115
B. Pengaruh Pajak terhadap Laporan Keuangan	119
C. Strategi Perencanaan Pajak.....	125
D. Proses Pelaporan Pajak.....	127

Bab X. Akuntansi Lingkungan	135
A. Pengertian Akuntansi Lingkungan.....	135
B. Metode Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Lingkungan.....	139
C. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Akuntansi Lingkungan.....	144
D. Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Laporan Keuangan	150
Bab XI. Etika dalam Akuntansi Lanjutan.....	156
A. Pentingnya Etika dalam Akuntansi.....	156
B. Standar Etika Profesional dalam Akuntansi	162
C. Kasus Etika dalam Akuntansi Lanjutan.....	164
D. Konsekuensi Pelanggaran Etika dalam Akuntansi	169
Bab XII. Audit dan Jaminan	171
A. Pengertian Audit	171
B. Proses Audit: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan.....	173
C. Standar Audit dan Jaminan.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	181
BIOGRAFI PENULIS.....	195

BAB I

Pengantar Akuntansi Lanjutan

Oleh: Siti Mudawanah, S.E., M.Akt.

A. Definisi Akuntansi Lanjutan

Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya (Putri, 2010). Akuntansi adalah teknik yang dikembangkan untuk membantu orang atau organisasi memonitor kegiatan ekonominya (Soemarso, 2020). Selain itu akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*) (Sasongko et al., 2016). Dengan demikian akuntansi adalah sebuah istilah bisnis yang digunakan dalam memberikan informasi keuangan dalam membantu entitas atau organisasi atau juga dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.

Akuntansi Lanjutan adalah cabang dari akuntansi yang melibatkan konsep, teknik, dan metode yang lebih kompleks daripada yang diajarkan dalam akuntansi dasar atau akuntansi keuangan. Ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang standar akuntansi, laporan keuangan, dan prinsip akuntansi yang kompleks,

serta penerapan mereka dalam situasi yang lebih rumit. Lingkungan bisnis dan standar akuntansi Indonesia berubah dengan cepat (Warren et al., 2018). Beberapa topik dalam akuntansi lanjutan meliputi konsolidasi laporan keuangan, akuntansi derivatif, akuntansi manajemen lanjutan, akuntansi biaya lanjutan, dan aspek-aspek khusus dalam industri tertentu. Tujuan dari akuntansi lanjutan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat, relevan, dan berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang kompleks.

Akuntansi lanjutan juga disebut keuangan perusahaan yang banyak cabangnya, laporan keuangan dalam valuta asing, reorganisasi perusahaan, dan akuntansi organisasi nir-laba. Buku ini digunakan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi S1 atau D3 (Beams et al., 2007). Akuntansi lanjutan dirancang untuk perkuliahan akuntansi keuangan di atas tingkat intermediate untuk merefleksikan perkembangan bisnis terakhir dan perubahan standar akuntansi serta persyaratan peraturan (Beams et al., 2009). Sedangkan yang lain menjelaskan bahwa menyajikan beragam ilustrasi dari kauntansi dan prinsip-prinsip pelaporan yang digunakan dalam berbagai entitas bisnis di Indonesia (Baker et al., 2010).

Adapun dalam hal ini pengantar akuntansi lanjutan mengacu pada hal-hal berikut yang terdiri dari:

- Standar akuntansi lanjutan
- Penyusutan dan amortisasi
- Pengakuan pendapatan
- Akuntansi persediaan

- Akuntansi untuk investasi
- Akuntansi derivatif
- Akuntansi leasing
- Akuntansi konsolidasi
- Akuntansi pajak
- Akuntansi untuk kepailitan dan reorganisasi
- Akuntansi untuk Entitas Non-Profit
- Akuntansi lingkungan
- Etika dalam akuntansi lanjutan
- Audit dan jaminan

B. Peran dan Tujuan Akuntansi Lanjutan

Peranan akuntansi dalam bisnis adalah sebagai tulang punggungnya. Sebab, semua perusahaan atau kegiatan berbisnis pasti membutuhkan pengolahan data yang akurat (SoM, 2022). Peran dan tujuan Akuntansi Lanjutan sangat penting dalam konteks keberlangsungan dan efektivitas sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa peran dan tujuan utamanya:

1. **Pemberian Informasi Keuangan yang Lebih Mendalam:** Salah satu tujuan utama akuntansi lanjutan adalah memberikan informasi keuangan yang lebih mendalam dan terperinci kepada pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, manajemen perusahaan, dan pihak lain yang berkepentingan.
2. **Membantu Pengambilan Keputusan:** Akuntansi lanjutan menyediakan alat dan teknik yang diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang kompleks. Hal ini membantu manajer dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan yang tepat, seperti investasi, pembiayaan, atau kebijakan operasional.

3. **Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi:** Salah satu peran utama akuntansi lanjutan adalah memastikan bahwa organisasi mematuhi standar akuntansi yang berlaku, baik standar lokal maupun internasional. Hal ini penting untuk memastikan keandalan dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan.
4. **Evaluasi Kinerja Keuangan:** Dengan menggunakan teknik akuntansi lanjutan, organisasi dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja keuangan mereka. Ini mencakup analisis rasio keuangan, analisis biaya, dan analisis lainnya untuk mengevaluasi efisiensi, profitabilitas, dan kinerja operasional secara keseluruhan.
5. **Perencanaan dan Pengendalian:** Akuntansi lanjutan membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, manajemen dapat merencanakan strategi keuangan jangka panjang, mengidentifikasi risiko, dan mengimplementasikan kontrol yang efektif.
6. **Penyusunan Laporan Keuangan yang Kompleks:** Organisasi yang kompleks sering kali memiliki struktur keuangan yang rumit, termasuk entitas anak, investasi lintas negara, atau instrumen keuangan yang kompleks. Akuntansi lanjutan membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencerminkan transaksi-transaksi yang kompleks tersebut.
7. **Pengungkapan Informasi yang Relevan:** Akuntansi lanjutan memastikan bahwa informasi keuangan yang relevan dan material

diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Hal ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja organisasi dengan lebih baik.

Melalui peran dan tujuannya, akuntansi lanjutan berkontribusi secara signifikan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan organisasi.

C. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Lanjutan

Dalam perspektif sosial historis, akuntansi telah menunjukkan peran dan fungsinya dalam masyarakat yang ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat dianggap sejajar peran dan fungsinya dengan institusi sosial lainnya (Rini, 2022).

Pada hakikatnya, praktik pencatatan akuntansi (dalam arti pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan bisnis) sudah di mulai sejak terjadinya transaksi bisnis, bahkan sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Sebagai contoh, pada awal Kerajaan Mesir telah ada seorang manajer bernama My yang mencatat transaksi hariannya pada *calamos reed* (sejenis kulit). Saat itu My memiliki asisten yang bekerja secara efisien dan dengan system yang dibuatnya ia mampu mengamati kapal miliknya yang mengangkut barang-barang dari tokonya melalui Sungai Nil. Pada tahun 3200 SM, telah dikenal dua jenis Teknik akuntansi secara simultan. Teknik pertama, sejenis koin dengan bentuk tertentu disimpan dan ditandai kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Teknik lainnya, sejenis token disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai variasi yang lebih kompleks dibanding

koin. Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1994 oleh Lucas Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada saat itu. Kedua kegiatan tersebut adalah (1) kegiatan pencatatan penarikan pajak/pendapatan sewa dan (2) kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pencatatan yang teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan inilah yang disebut dengan system pembukuan berpasangan (*double entry*). Semenjak ditemukannya system pencatatan berpasangan oleh Paciolo, akuntansi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Timbulnya Revolusi Industri pada tahun 1776 menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi: Perusahaan dibentuk oleh sekumpulan orang yang bekerja Bersama-sama dalam satu badan. Pada tahun 1845 dikeluarkanlah undang-undang Perusahaan pertama di Inggris, untuk mengatur tentang organisasi dan status Perusahaan. Kemudian tahun 1972 dilakukan kongres profesi akuntan sedunia di Sidney, pada kongres inilah muncul inspirasi untuk membentuk International Accounting Standard Committee (IASC), sehingga pada tahun 1973 terbentuklah IASC dengan International Accounting Standard (IAS) sebagai produknya. Pada tahun 2000, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan pembentukan International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF) yang membawahi International Accounting Standard Board (IASB) dan International Financial Reporting Interpretation

Committee (IFRIC). IASB kemudian mengeluarkan International Financial Reporting Standard (IFRS) sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru, yang diberlakukan di samping IAS yang sudah ada (Pura, 2013).

Sejarah dan perkembangan Akuntansi Lanjutan tercermin dalam evolusi praktik akuntansi seiring dengan kompleksitas bisnis dan persyaratan regulasi yang berkembang. Praktik akuntansi telah ada sejak zaman kuno, tetapi konsep Akuntansi Lanjutan secara khusus berkembang lebih lanjut pada abad ke-20, ketika bisnis dan transaksi keuangan menjadi semakin kompleks.

Pada era industrialisasi, perusahaan mulai berkembang pesat dan struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Ini memicu kebutuhan untuk teknik akuntansi yang lebih canggih untuk mengelola transaksi keuangan yang semakin kompleks. Perkembangan standar akuntansi seperti Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) telah memainkan peran penting dalam membentuk praktik Akuntansi Lanjutan. Standar-standar ini memberikan panduan tentang bagaimana melaporkan transaksi yang kompleks secara konsisten dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Beberapa krisis keuangan, seperti depresi besar pada tahun 1930-an dan krisis keuangan global pada tahun 2008, telah mendorong perubahan dalam praktik Akuntansi Lanjutan. Reaksi terhadap krisis ini sering kali melibatkan revisi standar akuntansi dan peningkatan dalam

penyusunan laporan keuangan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan Akuntansi Lanjutan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih dan sistem informasi telah memungkinkan organisasi untuk mengelola transaksi keuangan yang kompleks dengan lebih efisien dan akurat.

Globalisasi telah memperkenalkan tantangan baru bagi praktik Akuntansi Lanjutan, seperti perbedaan dalam standar akuntansi antar negara dan kompleksitas transaksi lintas batas. Ini telah mendorong harmonisasi standar akuntansi internasional dan meningkatkan kebutuhan akan keahlian dalam Akuntansi Lanjutan.

Seiring dengan perkembangan kompleksitas bisnis, praktik Akuntansi Lanjutan telah menyebabkan munculnya spesialisasi dalam berbagai bidang, seperti akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pajak, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan profesional akuntansi untuk fokus pada area tertentu yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka.

Perkembangan Akuntansi Lanjutan terus berlanjut seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi. Hal ini menekankan pentingnya bagi para profesional akuntansi untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar relevan dengan kebutuhan saat ini. Adapun secara umum untuk sejarah akuntansi dapat digambarkan pada gambar berikut ini:

PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL	PERKEMBANGAN EKONOMI	PERKEMBANGAN AKUNTANSI
ERA KOLONIAL BELANDA (1595-1945): <ul style="list-style-type: none"> • Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lain • Islam menjadi agama mayoritas 	Perusahaan Hindia Belanda (VOC) menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan aktifitas Pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis China diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air.	Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan tahun 1642 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur administrasi Kas dan Prutang (Abdoelkadir 1982)
ERA SOEKARNO (1945-1966): Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan presiden Soekarno dekat dengan Pemerintah Cina (RRC). Tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan mendorong peran militer	Dominasi perdagangan oleh Belanda dan Cina mendorong munculnya ketidakadilan di masyarakat. Akhirnya, Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia	Akademisi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersama. Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan
ERA SUHARTO (1966-1998): Suharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif.	Di bawah kepemimpinan Suharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapitalis. Investasi asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing Tahun 1997-1998 Krisis Keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bangkrut	Terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari Kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta <i>professional code of conduct</i> . Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965 Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995
ERA SETELAH SUHARTO (SETELAH 1998): Suharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998	Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial	Regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi

Sumber: Siddik dan Jensen (1984) yang dimodifikasi oleh ADB (2003)

Sumber: (Nugroho, 2014)

Oleh: Nurhaflah Soraya, S.E., M.Si., CertSF, CERA

A. Tinjauan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terkait

Standar akuntansi keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi yang baik akan memberikan manfaat yakni laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan terciptanya transparansi perusahaan. *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mendefinisikan bahwa standar akuntansi merupakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah.

Pada awalnya, standar akuntansi keuangan di Indonesia didasarkan pada kerangka kerja yang mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Namun, pada periode ini, belum ada badan standar akuntansi yang mengeluarkan standar-standar resmi.

Pada tahun 1997, Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK) Indonesia didirikan. BSAK bertanggung jawab untuk mengembangkan, menetapkan dan mengeluarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pembentukan BSAK ini menjadi tonggak penting dalam mengatur standar akuntansi di Indonesia.

Pada tahun 2012, Indonesia secara resmi mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. Adopsi IFRS ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan transparansi laporan keuangan serta memudahkan perbandingan dengan entitas bisnis di negara lain.

Sejak adopsi IFRS, BSAK terus mengembangkan standar-standar yang sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pengguna informasi keuangan. Standar-standar tersebut mencakup berbagai aspek seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Seiring dengan adopsi IFRS, Indonesia juga berupaya untuk mengharmoniskan standar akuntansi keuangan dengan standar Internasional. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi investor asing dan perdagangan lintas batas serta meningkatkan komparabilitas informasi keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia didasarkan pada kerangka kerja yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia. SAK yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh standar internasional, terutama *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* dengan beberapa penyesuaian dan interpretasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis di Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang SAK yang berlaku di Indonesia :

1. Standar Individu SAK

SAK terdiri dari berbagai standar individu yang mengatur berbagai aspek akuntansi seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, pengungkapan dan sebagainya. Beberapa standar utama dalam SAK antara lain :

- a. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
- b. SAK ETAP Revisi 2021
- c. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
- d. PSAK Revisi 2021
- e. DSAK (Direktif Standar Akuntansi Keuangan)
- f. ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan)
- g. Interpretasi SAK ETAP
- h. Interpretasi PSAK
- i. Interpretasi ISAK

2. Konvergensi dengan IFRS

Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar akuntansi internasional yang setara dengan IFRS. Oleh karena itu, SAK banyak mengadopsi prinsip-prinsip dan standar dari IFRS dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan karakteristik bisnis dan regulasi di Indonesia.

3. Pengungkapan Tambahan

SAK mengharuskan entitas untuk memberikan pengungkapan tambahan yang diperlukan agar informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih lengkap dan transparan. Pengungkapan ini meliputi informasi tentang kebijakan akuntansi, estimasi penting, risiko dan ketidakpastian

serta informasi lain yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

4. Kepatuhan dan Penegakan

Entitas di Indonesia wajib mematuhi SAK dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bertanggung jawab untuk memastikan penerapan SAK yang konsisten dan efektif serta melakukan penyesuaian dan penyempurnaan SAK sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik bisnis dan regulasi.

B. Peran International Financial Reporting Standards (IFRS) Dalam Akuntansi Lanjutan

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

IFRS merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara global. Jika sebuah negara mengadopsi IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan negara tersebut untuk memasuki pasar global karena pasar dunia dapat mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut sehingga tidak memerlukan rekonsiliasi yang signifikan.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari adopsi IFRS yakni ; memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional; meningkatkan

arus investasi global; serta menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Peran IFRS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran IFRS terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Dengan adopsi IFRS, Indonesia mendapatkan manfaat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK)
- b. Mengurangi biaya SAK
- c. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan
- d. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan
- e. Meningkatkan transparansi keuangan
- f. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal
- g. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan

2. Peran IFRS terhadap Pendidikan

Adopsi IFRS di Indonesia juga berdampak pada dunia pendidikan yakni sebagai berikut :

- a. Perubahan *mind stream* dari *rule-based* ke *principle-based*
- b. Banyak menggunakan *professional judgement*
- c. Banyak menggunakan *fair value accounting*
- d. Konsep IFRS yang selalu berubah
- e. Semakin meningkatnya ketergantungan ke profesi lain

- f. Perubahan *text book* dari US GAAP ke IFRS
 - g. Penyesuaian kurikulum dengan IFRS
3. Peran IFRS terhadap Bisnis

Adopsi IFRS juga memiliki peran terhadap dunia bisnis baik dari sisi positif dan negatif. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan terhadap dunia bisnis :

- a. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah diakses oleh investor global
- b. Relevansi laporan keuangan meningkat seiring dengan penggunaan nilai wajar
- c. Kinerja keuangan akan lebih fluktuatif apabila harga-harga juga mengalami fluktuasi.
- d. Penerapan *balance sheet approach* dan *fair value* akan mempersulit terjadinya *smoothing income*
- e. *Principle based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun apabila penggunaan *professional judgement* ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba.
- f. Terbatasnya penggunaan *off balance sheet*.

C. Peran *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) Dalam Akuntansi Lanjutan
Generally Accepted Accounting (GAAP)

merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam praktik

akuntansi standar. GAAP termasuk standar, konvensi dan aturan yang diikuti oleh akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari GAAP adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan transparan dan konsisten.

Dalam standar akuntansi yang mengacu ke Amerika (US GAAP), akuntansi untuk aset tetap relatif tidak menimbulkan banyak masalah karena menggunakan basis nilai historis. Sebaliknya, IFRS tidak menggunakan basis nilai historis karena berimplikasi pada penyajian laporan keuangan yang dipandang kurang relevan dengan kebutuhan nyata pengguna informasi dan tidak mampu menggambarkan nilai riil aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan.

Mengadopsi prinsip-prinsip GAAP meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sebuah perusahaan di mata investor, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini karena GAAP memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan standar yang konsisten dan transparan untuk melaporkan informasi keuangan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin global, kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi menjadi penting. GAAP memberikan kerangka kerja yang dapat diadopsi oleh berbagai negara untuk memfasilitasi perbandingan dan analisis lintas batas.

Para investor dan analis sering menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan GAAP untuk membuat keputusan investasi dan analisis kerja perusahaan. Oleh karena itu, GAAP membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan investor terhadap

perusahaan Indonesia. Selain itu, untuk perusahaan yang berencana untuk mengakses pasar internasional atau menjalin hubungan bisnis dengan pihak asing, penting untuk mengikuti standar yang diakui secara internasional.

Peran GAAP terhadap berbagai sektor di Indonesia sangat penting karena standar akuntansi yang konsisten dan transparan diperlukan di setiap sektor untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Berikut adalah uraian peran GAAP dalam beberapa sektor utama di Indonesia :

1. Peran GAAP terhadap Sektor Perbankan dan Keuangan

Sektor perbankan dan keuangan sangat bergantung pada laporan keuangan yang akurat dan transparan. GAAP membantu bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang diakui secara umum sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah, investor dan regulator terkait stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga tersebut.

2. Peran GAAP terhadap Sektor Manufaktur dan Industri

Perusahaan manufaktur dan industri juga sangat membutuhkan standar akuntansi yang konsisten untuk melaporkan aset, kewajiban dan kinerja keuangannya dengan tepat. GAAP membantu perusahaan-perusahaan ini untuk mengikuti prosedur yang sama dalam mengukur dan

melaporkan hasil keuangan mereka sehingga memudahkan perbandingan antar perusahaan dan analisis kerja industri.

3. Peran GAAP terhadap Sektor Perdagangan dan Distribusi

Sektor perdagangan dan distribusi seringkali memiliki kompleksitas dalam mengelola persediaan, biaya pengangkutan dan aspek keuangan lainnya. GAAP membantu perusahaan-perusahaan sektor ini untuk menyusun laporan keuangan yang memadai dan relevan bagi para investor, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Peran GAAP terhadap Sektor Pariwisata dan Perhotelan

Perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata dan perhotelan juga mengikuti GAAP dalam menyusun laporan keuangan mereka. Hal ini membantu dalam menunjukkan kinerja keuangan yang sebenarnya, mengidentifikasi tren bisnis dan mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional.

5. Peran GAAP terhadap Sektor Pendidikan dan Non-Profit

Meskipun tidak mencari laba seperti perusahaan swasta, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi non-profit juga harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan GAAP. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan aset organisasi tersebut.

IFRS dan GAAP menggunakan cara yang sama dalam menganalisa, mencatat dan mengelompokkan transaksi sebagai akibat dari transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa perbedaan antara IFRS dan GAAP :

1. Dalam metode penilaian persediaan, GAAP mengenal metode FIFO, LIFO dan Average sedangkan IFRS hanya mengenal metode FIFO dan Average saja.
2. Laporan keuangan versi GAAP terdapat pos luar biasa sedangkan laporan keuangan versi IFRS tidak ada terdapat pos luar biasa tetapi diganti dengan pendapatan komprehensif lainnya
3. GAAP berbasis aturan sedangkan IFRS berbasis prinsip
4. GAAP menggunakan nilai historis untuk mengukur nilai aset sedangkan IFRS menggunakan nilai wajar
5. GAAP berfokus pada laporan laba rugi sedangkan IFRS berfokus pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi.

D. Kesesuaian Standar Akuntansi dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Lanjutan

Prinsip-prinsip akuntansi lanjutan seringkali mengacu pada konsep-konsep yang lebih kompleks dan canggih dalam penyusunan laporan keuangan. Kesesuaian standar akuntansi dengan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan informasi yang relevan, dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Berikut

merupakan prinsip-prinsip akuntansi lanjutan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi :

1. Materialitas

Prinsip materialitas dalam akuntansi mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencakup semua hal yang penting dan relevan bagi para pengguna laporan tersebut. Prinsip ini mengakui bahwa tidak semua kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan memiliki dampak yang sama terhadap pengambilan keputusan. Standar akuntansi mempertimbangkan prinsip materialitas ini dengan memberikan pedoman tentang cara menilai apakah suatu kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan dianggap material atau tidak. Hal ini memungkinkan akuntan untuk fokus pada aspek-aspek yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan.

2. Konservatisme

Prinsip konservatisme mengarahkan akuntan untuk melakukan estimasi yang konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Ini berarti bahwa dalam situasi yang tidak pasti, pendapatan sebaiknya diakui hanya jika sudah benar-benar diterima, sementara kerugian sebaiknya diantisipasi lebih awal. Standar akuntansi mengakomodasi prinsip konservatisme ini dengan memberikan pedoman tentang cara menangani situasi-situasi yang memerlukan estimasi atau

asumsi. Misalnya, ketika menilai nilai aset, akuntan mungkin cenderung menggunakan nilai yang lebih rendah dari antara nilai historis dan nilai pasar saat ini, untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai di masa depan.

3. Realisasi Pendapatan

Prinsip realisasi pendapatan mengindikasikan bahwa pendapatan seharusnya diakui hanya ketika sudah diterima dan dianggap dapat diandalkan. Standar akuntansi mengakomodasi prinsip ini dengan memberikan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan. Misalnya, pendapatan dari penjualan barang biasanya diakui pada saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli dan tidak lagi ada risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan barang tersebut. Standar akuntansi juga mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus, seperti penjualan dengan pembayaran cicilan atau penjualan dengan garansi, untuk menentukan waktu pengakuan pendapatan.

4. Keterlibatan Pemegang Saham

Prinsip ini menuntut bahwa perusahaan memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar akuntansi mengakomodasi prinsip ini dengan mengharuskan penyajian laporan keuangan yang informatif, transparan, dan mudah dipahami. Selain itu, standar akuntansi juga memerlukan penyajian catatan-catatan tambahan dan

pengungkapan-pengungkapan yang relevan untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang dibuat, serta risiko dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Ini membantu para pemegang saham untuk memahami kinerja keuangan perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat.

5. Prinsip Entitas

Prinsip entitas dalam akuntansi menyatakan bahwa entitas bisnis memiliki identitas dan keberadaan yang terpisah dari pemiliknya atau pihak-pihak terkait lainnya. Standar akuntansi memastikan bahwa transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan dipisahkan secara jelas dari transaksi pribadi pemilik atau pihak terkait lainnya. Ini berarti bahwa keuangan perusahaan harus dikelola secara terpisah dan independen dari keuangan individu pemilik atau pihak terkait lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan secara obyektif dan akurat.

6. Konsistensi

Prinsip konsistensi dalam akuntansi menekankan pentingnya konsistensi dalam metode akuntansi yang diterapkan dari periode ke periode. Standar akuntansi mengakomodasi prinsip ini dengan memerlukan bahwa perusahaan menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari periode ke periode, kecuali jika ada alasan yang cukup untuk melakukan perubahan. Jika terjadi perubahan dalam

kebijakan akuntansi, standar akuntansi juga memerlukan penyajian informasi tentang perubahan tersebut dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan konsisten dan dapat dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis tren dan kinerja keuangan perusahaan secara lebih baik.

BAB III

Penyusutan dan Amortisasi

Oleh: Rahmatia

A. Definisi dan Tujuan Penyusutan

Penyusutan dan amortisasi merupakan konsep penting dalam akuntansi, dengan penyusutan mewakili pengurangan manfaat ekonomi masa depan dari aset berwujud dan yang kedua mengacu pada amortisasi biaya aset tidak berwujud (International Accounting Standards Board (IASB), 2023). Keduanya digunakan untuk mencerminkan konsumsi, kedaluwarsa, keusangan, atau hilangnya nilai suatu aset karena penggunaan atau berlalunya waktu (Studies et al., 2016). Pilihan metode penyusutan, seperti linier, saldo menurun, atau dipercepat, dapat berdampak signifikan terhadap manfaat pajak dan kebijakan investasi perusahaan. Konsep-konsep ini sangat penting untuk menjaga kinerja entitas ekonomi, karena menyediakan pembaharuan aset tetap dan penyesuaian unsur dan ketentuan aktif (Man & Dima, 2014).

Penyusutan adalah alokasi sistematis dari nilai aset yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Dalam prakteknya digunakan baik dari segi akuntansi penyusutan maupun perpajakan secara hukum. Penyusutan akuntansi dihitung berdasarkan rencana penyusutan, disiapkan untuk periode sejak tanggal penyerahan aset berwujud dan pemulihan penuh dari nilai masukannya. Penyusutan pajak dihitung sejak bulan setelah aset berwujud yang dapat disusutkan dioperasikan,

hingga nilai input pulih sepenuhnya, sebagai masa manfaat yang ditetapkan dalam "Katalog klasifikasi dan masa manfaat aset tetap". Teori dan praktik merekomendasikan agar metode penyusutan digunakan secara logis dan sistematis. Mempraktikkan satu atau lain metode penyusutan, oleh masyarakat, dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang, manfaat pajak yang dapat diperoleh kembali, kebijakan investasi perusahaan, dll. Memilih sistem yang semakin berkurang atau dipercepat cocok untuk bisnis yang ingin memperoleh keuntungan atau untuk memperoleh investasi di tahun-tahun awal karena penyusutan yang berkurang dengan cepat dapat menunda pembayaran sebagian pajak dan memanfaatkan penyusutan tersebut. Metode penyusutan yang dipilih harus mencerminkan berkurangnya kemampuan untuk memperbaiki properti. Adanya beberapa metode akuntansi untuk menemukan dan mencatat penyusutan mengharuskan perusahaan memiliki opsi akuntansi. Mengingat bahwa suatu perusahaan memiliki pilihan mengenai penyusutan, bunganya adalah investasi; bunga bersaing dengan pajak negara (Foundation et al., n.d.).

Penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud di atur dalam peraturan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023) No 72 Tahun 2022 pada pasal 2 Penyusutan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pembelian, pemasangan, penambahan, perbaikan atau modifikasi aktiva tetap selain tanah yang mempunyai hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dipergunakan untuk pemilikan dan perolehan yang di antaranya

pengumpulan dan pemeliharaan penghasilan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, dibagi menjadi jumlah yang sama selama masa manfaat tertentu dari aset tersebut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dalam menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud pada	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Penyusutan harga perolehan aktiva tetap selain bangunan, dapat juga dilakukan dengan tarif menurun sepanjang masa manfaat yang ditentukan dengan menerapkan tarif penyusutan terhadap sisa nilai buku dan Pada akhir masa manfaat, sepanjang dilakukan secara konsisten .

Penyusutan adalah istilah yang kompleks, rumit dan membingungkan di bidang teknik, ilmu sosial dan manajemen. Akibatnya, telah digunakan secara berlebihan, terlalu ditekankan, dan dikerjakan secara berlebihan oleh para akuntan dan penilai profesional. Standar Akuntansi Internasional (IAS) 4, mengkualifikasikan aset untuk depresiasi ketika aset digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk produksi atau jasa, dan memiliki masa manfaat ekonomis. Sedangkan

menurut Standard Statement of Accounting Practice (SSAP) 12, penyusutan dipandang sebagai keausan, konsumsi atau hilangnya nilai aset tetap lainnya, baik yang timbul dari penggunaan, kekurangan waktu atau keusangan melalui teknologi dan perubahan pasar. Kompleksitas dapat muncul jika dilihat sebagai penurunan harga, kemerosotan fisik, alokasi biaya, penurunan nilai, teknik penilaian, dan penggantian aset. Kerumitan dan kebingungan tidak dapat dihindari ketika akuntan menggunakan berbagai metode untuk menyediakan penyusutan pada aset yang sama atau serupa dengan rentang hidup yang berbeda. Efek konsekuensial adalah merongrong atau melebihi-lebihkan laba yang dilaporkan atau laba yang dapat didistribusikan di tangan para pemangku kepentingan, oleh karena itu laporan keuangan menjadi tidak masuk akal. Direkomendasikan bahwa penyusutan harus digunakan dengan hati-hati terutama ketika masa manfaat ekonomi yang diantisipasi dari aset tersebut berumur pendek oleh teknologi baru atau berlalunya waktu sehingga sangat sulit untuk memulihkan atau mengganti nilai buku bersih aset tersebut (Attah Lawrence & Angus Okechukwu, 2013).

Amortisasi adalah proses penilaian bertahap dari hasil keuangan dalam penurunan nilai aset yang tidak dapat diubah, biaya untuk tahun tersebut dengan memasukkan penyusutan pertimbangan durasi yang ditentukan oleh aset operasi yang diproyeksikan, sebagai amortisasi. Penurunan nilai terjadi sebagai akibat dari penggunaannya di dalam entitas, atau karena berlalunya waktu dan jumlah distribusi ini dilakukan penurunan nilai atas nilai

produk, pekerjaan, layanan, atau aktivitas baru yang dilakukan dengan menggunakan aset berwujud tersebut. Proses distribusi ini mensyaratkan bahwa kesimpulan dari rangkaian ekonomi melalui distribusi keuntungan, pekerjaan, jasa atau kegiatan dimanfaatkan untuk memisahkan atau memperoleh kembali pendapatan dari bagian nilai yang termasuk dalam biaya operasional pengurangan hak atas nilai. Amortisasi tersebut dianggap terpisah dalam dana penyusutan yang merupakan sumber daya dari agen dana tersebut ekonomis. Depresiasi berfungsi untuk mengoreksi nilai aset agar mendekati nilai yang sebenarnya (Studies et al., 2016).

Istilah amortisasi dan depresiasi sering digunakan secara bergantian karena keduanya digunakan untuk mencerminkan penurunan aset, kedaluwarsa, keusangan, atau penurunan nilai lainnya sebagai akibat dari penggunaan atau berlalunya waktu. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa depresiasi mewakili penurunan manfaat ekonomi masa depan yang tertanam dalam aset berwujud melalui penggunaan, sedangkan amortisasi menyiratkan penghapusan biaya aset tidak berwujud, seperti goodwill, paten, merek dagang, lisensi, dll. Penyusutan diakui sebagai provisi dan dicatat sebagai akumulasi penyusutan, sedangkan amortisasi merupakan penghapusan langsung terhadap harga pokok aset. Dalam beberapa kasus, mungkin dapat diterima untuk memperhitungkan jumlah tersebut melalui akun amortisasi yang diakumulasikan.

Berdasarkan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023) amortisasi dihitung pada bulan dilakukan pembelian, namun terkecuali pada usaha

tertentu. Tarif amortisasi harta tak berwujud dan masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

B. Metode Penyusutan: Garis Lurus, Saldo Menurun, dan Unit Produksi

1. Metode Penyusutan: Garis Lurus

Metode garis lurus yang banyak digunakan dalam akuntansi, metode ini dapat memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan secara ekonomis, terutama ketika nilai guna tahunan suatu properti menurun, metode penyusutan proporsional adalah satu-satunya metode yang secara konsisten menganut prinsip-prinsip ini. menerapkan metode garis lurus pada situasi praktis dan mengembangkan sistem informasi penyusutan aset yang terkomputerisasi untuk perusahaan tertentu. Secara kolektif, pentingnya metode garis lurus dalam akuntansi dan potensinya dalam interpretasi ekonomi (Green et al., 2002) (Ben-Shahar et al., 2009).

Berikut adalah contoh kasus perhitungan penyusutan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight-Line Method):

Perusahaan ABC membeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp100.000 pada tanggal 1 Januari

2020. Mesin tersebut diperkirakan memiliki nilai sisa (residu) sebesar Rp 10.000 dan masa manfaat 5 tahun. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan Metode Garis Lurus adalah sebagai berikut:

Hitung biaya yang dapat disusutkan (depreciable cost):

Biaya yang dapat disusutkan = Harga Perolehan - Nilai Sisa

Biaya yang dapat disusutkan = Rp100.000 - Rp10.000 = Rp90.000

Hitung beban penyusutan tahunan:

Beban Penyusutan Tahunan = Biaya yang dapat disusutkan / Masa Manfaat

Beban Penyusutan Tahunan = Rp90.000 / 5 tahun = Rp18.000 per tahun

Jadwal penyusutan dengan Metode Garis Lurus:

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2020	Rp18.000	Rp18.000	Rp82.000
2021	Rp18.000	Rp36.000	Rp64.000
2022	Rp18.000	Rp54.000	Rp46.000
2023	Rp18.000	Rp72.000	Rp28.000
2024	Rp18.000	Rp90.000	Rp10.000

Keterangan:

Beban Penyusutan: Jumlah penyusutan yang dibebankan pada tahun tersebut.

Akumulasi Penyusutan: Total jumlah penyusutan yang telah diakui sejak awal perolehan aset.

Nilai Buku: Sisa nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan (Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan).

Pada akhir masa manfaat (tahun 2024), nilai buku mesin tersebut sama dengan nilai sisa yang diperkirakan, yaitu Rp10.000.

Catatan: Dalam praktiknya, perhitungan penyusutan dapat melibatkan penyesuaian untuk periode perolehan aset dan periode pelepasan aset, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perbaikan besar atau peningkatan nilai aset.

2. Metode Penyusutan: Saldo menurun (Declining Balance Method)

Berikut adalah contoh kasus perhitungan penyusutan dengan menggunakan Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method):

Perusahaan XYZ membeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp80.000 pada tanggal 1 Januari 2021. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa Rp8.000. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun dengan faktor penyusutan 30%.

Perhitungan penyusutan dengan Metode Saldo Menurun adalah sebagai berikut:

Hitung biaya yang dapat disusutkan (depreciable cost):

Biaya yang dapat disusutkan = Harga Perolehan - Nilai Sisa

Biaya yang dapat disusutkan = Rp80.000 - Rp8.000
= Rp72.000

Hitung tarif penyusutan:

Tarif Penyusutan = Faktor Penyusutan / Masa Manfaat

Tarif Penyusutan = 30% / 5 tahun = 6% per tahun

Jadwal penyusutan dengan Metode Saldo Menurun:

Tahun	Nilai Buku Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Akhir
2021	Rp80.000	Rp4.800 (6% xRp80.000)	Rp4.800	Rp75.200
2022	Rp75.200	Rp4.512 (6% xRp75.200)	Rp9.312	Rp70.688
2023	Rp70.688	Rp4.241 (6% xRp70.688)	Rp13.553	Rp66.447
2024	Rp66.447	Rp3.987 (6% xRp66.447)	Rp17.540	Rp62.460
2025	Rp62.460	Rp3.748 (6% xRp62.460)	Rp21.228	Rp58.712

Pada tahun 2025, nilai buku akhir (Rp58.712) melebihi nilai sisa yang diperkirakan (Rp8.000). Oleh karena itu, pada tahun 2025, penyusutan hanya akan dibebankan sebesar Rp54.712 (untuk membuat nilai buku akhir sama dengan nilai sisa Rp8.000).

Keterangan:

Nilai Buku Awal: Nilai buku aset pada awal tahun.

Beban Penyusutan: Jumlah penyusutan yang dibebankan pada tahun tersebut (Nilai Buku Awal x Tarif Penyusutan).

Akumulasi Penyusutan: Total jumlah penyusutan yang telah diakui sejak awal perolehan aset.

Nilai Buku Akhir: Sisa nilai aset setelah dikurangi beban penyusutan pada tahun tersebut (Nilai Buku Awal - Beban Penyusutan).

Dengan menggunakan Metode Saldo Menurun, beban penyusutan akan lebih besar di awal-awal tahun dan semakin menurun setiap tahunnya. Metode ini sesuai untuk aset yang mengalami

penurunan produktivitas atau manfaat yang lebih besar di awal-awal tahun penggunaannya.

3. Metode Penyusutan: Unit Produksi

Berikut adalah contoh kasus perhitungan penyusutan dengan menggunakan Metode Unit Produksi (Unit of Production Method):

Perusahaan DEF membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan Rp500.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Mesin tersebut diperkirakan dapat memproduksi 1.000.000 unit selama masa manfaatnya dan memiliki nilai sisa Rp50.000. Dalam tahun 2020, mesin ini menghasilkan 200.000 unit produk.

Perhitungan penyusutan dengan Metode Unit Produksi adalah sebagai berikut:

Hitung biaya yang dapat disusutkan (depreciable cost):

Biaya yang dapat disusutkan = Harga Perolehan - Nilai Sisa

Biaya yang dapat disusutkan = Rp500.000 - Rp50.000 = Rp450.000

Hitung tarif penyusutan per unit:

Tarif Penyusutan per Unit = Biaya yang dapat disusutkan / Total Unit Produksi yang Diperkirakan

Tarif Penyusutan per Unit = Rp450.000 / 1.000.000 unit = Rp0,45 per unit

Hitung beban penyusutan untuk tahun 2020:

Beban Penyusutan Tahun 2020 = Tarif Penyusutan per Unit × Unit Produksi pada Tahun 2020

Beban Penyusutan Tahun 2020 = Rp0,45 per unit × 200.000 unit = Rp90.000

Jadwal penyusutan dengan Metode Unit Produksi (asumsi unit produksi tahun berikutnya adalah

300.000 unit, 250.000 unit, 150.000 unit, dan 100.000 unit):

Tahun	Nilai Buku Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Akhir
2020	200.000	Rp90.000	Rp90.000	Rp410.000
2021	300.000	Rp135.000	Rp225.000	Rp275.000
2022	250.000	Rp112.500	Rp337.500	Rp162.500
2023	150.000	Rp67.500	Rp405.000	Rp95.000
2024	100.000	Rp45.000	Rp450.000	Rp50.000

Keterangan:

Unit Produksi: Jumlah unit yang diproduksi pada tahun tersebut.

Beban Penyusutan: Jumlah penyusutan yang dibebankan pada tahun tersebut (Tarif Penyusutan per Unit × Unit Produksi).

Akumulasi Penyusutan: Total jumlah penyusutan yang telah diakui sejak awal perolehan aset.

Nilai Buku Akhir: Sisa nilai aset setelah dikurangi beban penyusutan pada tahun tersebut (Nilai Buku Awal - Beban Penyusutan).

Dengan menggunakan Metode Unit Produksi, beban penyusutan dibebankan berdasarkan tingkat produksi atau penggunaan aset. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar beban penyusutan yang diakui pada tahun tersebut. Metode ini sesuai untuk aset yang manfaatnya terkait langsung dengan jumlah output atau unit produksi.

C. Penyusutan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud

Sebagian besar aset ini kehilangan nilainya dan “terdepresiasi” saat digunakan. Realitas komersial ini tercermin dalam akuntansi keuangan perusahaan, termasuk aset perusahaan dan penyusutan aset tersebut. Sistem perpajakan mengakui bahwa investasi pada aset tetap harus diperhitungkan ketika mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan. Ini adalah titik awal dari laporan ini dan tidak membahas alasan ekonomi yang mendasarinya. Namun seorang wajib pajak tidak dapat menuntut keringanan pajak atas perolehan kembali harta yang digunakan dalam suatu usaha karena merupakan modal (Office of Tax Simplifications, 2018).

Penyusutan aset tetap, seperti aset berwujud, merupakan aspek penting dari akuntansi keuangan, dengan berbagai metode yang tersedia untuk perhitungan. Di sisi lain, amortisasi aset tidak berwujud, seperti goodwill dan paten, merupakan proses tersendiri, yang mencerminkan penurunan manfaat ekonomi di masa depan. Kedua proses tersebut tunduk pada undang-undang perpajakan dan peraturan akuntansi, dengan metode harmonisasi yang teridentifikasi.

Aset berwujud memegang peranan penting bagi suatu perusahaan karena seluruh aset tetap melancarkan aktivitas perusahaan. Namun aset berwujud seperti kendaraan, komputer, peralatan kantor, dan furnitur dapat mengalami penurunan nilai. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (GAAP), ada beberapa metode penyusutan untuk menghitung biaya penyusutan aset tetap, namun hanya dua metode penyusutan yang diperbolehkan

untuk tujuan perpajakan: metode garis lurus dan metode saldo menurun/metode ganda (Saerang, J.S., & Kowanda, D. 2011).

Dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, digunakan lima metode: metode garis lurus, metode saldo menurun, metode digit, metode jam kerja, dan metode unit produksi. Sebaliknya, sistem perpajakan hanya menggunakan dua metode: metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbedaan penerapan metode penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan mengakibatkan penyesuaian pajak. Penyusutan merupakan pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan (Goni & Budiarso, 2018).

D. Amortisasi dan Metode-metode Amortisasi

Rekonstruksi berkala sebuah perusahaan bisnis tidak hanya merupakan cara modernisasi yang bijaksana secara ekonomi, namun juga merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup fisiknya. Oleh karena itu, negara-negara dengan perekonomian stabil dan sistem perpajakan yang sangat disesuaikan menggunakan metode penghitungan penyusutan linier dan non-linier dengan percepatan dan perlambatan aset yang dapat dibayar kembali serta peralatan mekanis yang canggih. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penghitungan laba atas investasi penulis, banyak masalah mendesak bagi para manajer dapat diselesaikan. Metode penghitungan penyusutan yang diusulkan bertujuan untuk membantu stabilisasi perekonomian nasional

dan efektivitas investasi pada modal utama perusahaan (Filatov et al., 2013).

Amandemen ED PSAK 19 mengklarifikasi bahwa: a). Penggunaan metode amortisasi berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas yang menggunakan aset tidak berwujud tidak termasuk penggunaan manfaat ekonomi yang terkandung dalam aset tidak berwujud tersebut dianggap tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak relevan secara langsung, b) Kriteria pemilihan metode penyusutan berdasarkan pasal adalah apakah metode tersebut mencerminkan perkiraan pola penggunaan manfaat ekonomi. dan c). Jika faktor pembatas utama suatu aset tidak berwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, pendapatan yang diperoleh mungkin merupakan dasar yang tepat untuk penyusutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).

1. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)

PT. Ahsan membeli hak paten dengan biaya perolehan Rp 120.000 pada 1 Januari 2021. Hak paten ini memiliki masa manfaat ekonomis selama 5 tahun. Perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus adalah:

Beban Amortisasi Tahunan = Biaya Perolehan / Masa Manfaat Ekonomis

Beban Amortisasi Tahunan = Rp120.000 / 5 tahun = Rp 24.000 per tahun

Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method)

Perusahaan XYZ membeli lisensi perangkat lunak dengan biaya perolehan Rp80.000 pada 1

Januari 2022. Lisensi ini memiliki masa manfaat ekonomis 4 tahun. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif amortisasi 40%.

Tahun 2022:

Beban Amortisasi = Biaya Perolehan x Tarif Amortisasi

Beban Amortisasi = Rp80.000 x 40% = Rp32.000

Tahun 2023:

Nilai Buku Awal = Rp80.000 - Rp32.000 = Rp48.000

Beban Amortisasi = Nilai Buku Awal x Tarif Amortisasi

Beban Amortisasi = Rp48.000 x 40% = Rp19.200

2. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum-of-the-Years'-Digits Method)

PT. Ahsan membeli merek dagang dengan biaya perolehan Rp100.000 pada 1 Januari 2021. Merek dagang ini memiliki masa manfaat ekonomis 5 tahun. Perhitungan dengan metode jumlah angka tahun adalah:

Jumlah Angka Tahun = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Tahun 2021:

Beban Amortisasi = (Biaya Perolehan x 5/15)
= (Rp100.000 x 5/15) = Rp33.333

Tahun 2022:

Beban Amortisasi = (Biaya Perolehan x 4/15)
= (Rp100.000 x 4/15) = Rp26.667

3. Metode Unit Produksi (Unit of Production Method)

PT. Ahmad membeli lisensi perangkat lunak dengan biaya perolehan Rp250.000 pada 1 Januari 2022. Lisensi ini diperkirakan dapat digunakan untuk memproduksi 500.000 unit produk. Pada tahun 2022, perusahaan memproduksi 100.000 unit produk dengan menggunakan lisensi tersebut.

Tarif Amortisasi per Unit = Biaya Perolehan / Total Unit Produksi yang Diperkirakan

Tarif Amortisasi per Unit = Rp250.000 / 500.000 unit = Rp0,50 per unit

Beban Amortisasi Tahun 2022 = Tarif Amortisasi per Unit x Unit Produksi Tahun 2022

Beban Amortisasi Tahun 2022 = Rp0,50 x 100.000 unit = Rp50.000

Metode amortisasi yang dipilih akan mempengaruhi jumlah beban amortisasi yang diakui setiap tahunnya dan nilai buku aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada karakteristik aset, pola konsumsi manfaat ekonomis, dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Oleh: Hafid F. Habibi

Pendapatan merupakan elemen penting dalam akuntansi yang mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas selama periode akuntansi tertentu. Pengakuan dan pengukuran pendapatan secara tepat menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang informatif dan bermanfaat bagi para penggunanya. Esai ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam tentang konsep dan prinsip pengakuan pendapatan, metode-metode pengakuan pendapatan yang umum digunakan, pengaruh transaksi tertentu terhadap pengakuan pendapatan, serta perbandingan antar metode pengakuan pendapatan.

A. Konsep Dasar dan Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan adalah prinsip akuntansi yang sangat penting, yang menentukan kapan pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan. Prinsip ini mengharuskan pendapatan diakui pada saat transaksi yang menghasilkan pendapatan tersebut telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Secara umum, ada dua kriteria utama yang harus dipenuhi untuk pengakuan pendapatan: pertama, pendapatan harus telah direalisasikan atau realisasi dapat dijamin; kedua, pendapatan tersebut harus dapat diukur dengan akurat. Dalam praktiknya, pengakuan pendapatan

dapat terjadi pada berbagai titik waktu, tergantung pada jenis transaksi dan kondisi yang terkait.

Pengakuan pendapatan juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Metode akrual, misalnya, mengakui pendapatan ketika transaksi terjadi, tidak peduli kapan kas diterima. Sebaliknya, metode kas mengakui pendapatan hanya ketika kas diterima. Kedua metode ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap waktu pengakuan pendapatan dan laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan pendapatan yang tepat tidak hanya penting untuk keakuratan laporan keuangan, tetapi juga untuk manajemen internal yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola arus kas, serta dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Kesalahan dalam pengakuan pendapatan dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan dan potensi masalah dengan regulator, investor, dan pemberi pinjaman.

Berikut adalah tabel perbandingan antar metode pengakuan pendapatan:

Tabel 1. perbandingan antar metode pengakuan pendapatan

Fitur	Metode Akrual Penuh	Metode Akrual Modifikasi	Metode Kas
Pengakuan pendapatan	Pada saat kriteria pengakuan terpenuhi	Pada saat kriteria pengakuan terpenuhi (sebagian) dan pada saat kas diterima (sebagian)	Pada saat kas diterima
Akurasi	Tinggi	Cukup tinggi	Rendah
Kompleksitas	Tinggi	Sedang	Rendah
Kesesuaian	Ya	Mungkin	Tidak

Fitur	Metode Akruwal Penuh	Metode Akruwal Modifikasi	Metode Kas
dengan GAAP			

B. Konsep dan Prinsip Pengakuan Pendapatan

Sebelum tahun 2020, standar akuntansi keuangan mengenai pendapatan diatur dalam PSAK 23 Revisi 2018 mengenai Pendapatan dari Transaksi dengan Pelanggan dan PSAK 34 mengatur tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Setelahnyam PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan menyatukan dan mendefinisi ulang pengertian, kapan, dan bagaimana mengakui pendapatan.

C. Metode Pengakuan Pendapatan

PSAK 72 mendefinisi ulang bagaimana perusahaan mengakui pendapatannya melalui pendekatan bahwa sejatinya terjadi ikatan kontraktual atas suatu entitas dalam memperoleh pendapatan. PSAK ini memiliki tujuan untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa hal harus dipertimbangkan yaitu : bagaimana mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan untuk kontrak individual maupun portofolio kontrak.

Beberapa langkah yang dipersyaratkan untuk mengidentifikasi dan mengakui pendapatan pada PSAK ini adalah:

1. Identifikasi kontrak

Menurut standar, suatu entitas dapat mencatat kontrak dengan pelanggan apabila seluruh kriteria dibawah terpenuhi

- a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.

Dalam dunia bisnis, kontrak merupakan fondasi hukum yang mengikat para pihak dalam sebuah kesepakatan komersial. Kontrak dapat dibuat dan disetujui dalam berbagai bentuk, termasuk secara tertulis, lisan, atau bahkan melalui praktik bisnis yang telah umum. Setelah kontrak disetujui, setiap pihak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi janji mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari syarat dan kondisi pembayaran dan penyelesaian, penyediaan, pengiriman barang dan jasa. Kepatuhan terhadap kontrak ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan bisnis yang baik, tetapi juga untuk menghindari sengketa hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak.

- b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;

PSAK 72 mengatur bahwa entitas harus memenuhi kriteria tertentu sebelum pendapatan dapat diakui. Kriteria ini termasuk persetujuan kontrak oleh para

pihak, identifikasi hak atas barang atau jasa, dan periode pembayaran yang jelas. Proses ini memastikan bahwa transaksi dicatat dengan akurat dan mencerminkan pertukaran nilai yang adil antara entitas dan pelanggan. Selanjutnya, entitas harus dapat menentukan apakah kewajiban pelaksanaan (Performance obligation - PO) telah terpenuhi, yang menandakan bahwa kontrol atas barang atau jasa telah beralih ke pelanggan.

- c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;

PSAK 72, yang mengadopsi IFRS 15 menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti entitas dalam mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, termasuk identifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan. Proses ini memastikan bahwa entitas dapat mengenali pendapatan secara akurat dan konsisten, mencerminkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan dengan mempertimbangkan semua syarat kontrak dan fakta serta keadaan yang relevan. Selain itu, standar ini juga memperhitungkan kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan, yang merupakan indikator penting dalam pengakuan pendapatan. Dengan demikian, entitas harus memiliki

sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan memantau jangka waktu pembayaran, yang tidak hanya mempengaruhi laporan keuangan tetapi juga manajemen arus kas dan hubungan dengan pelanggan.

- d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak);

Konsep substansi komersial dalam kontrak adalah elemen penting dalam akuntansi dan keuangan, karena menentukan bagaimana suatu kontrak harus diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Substansi komersial berkaitan dengan apakah perubahan signifikan terjadi pada arus kas atau risiko yang dihadapi oleh entitas sebagai akibat dari kontrak tersebut. Jika kontrak mengubah waktu atau jumlah arus kas masa depan, atau secara signifikan mengubah risiko yang dihadapi oleh entitas, maka kontrak tersebut dianggap memiliki substansi komersial.

- e. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. :

Entitas bisnis yang terlibat dalam kontrak dengan pelanggan harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan besar untuk menagih imbalan yang menjadi haknya sebagai hasil dari pertukaran barang atau jasa. Entitas harus memastikan bahwa kontrak memiliki substansi komersial, dan bahwa ada

probabilitas tinggi bahwa pembayaran atas barang atau jasa yang disediakan akan diterima. Proses ini melibatkan pengidentifikasian kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya

Pendekatan lima langkah yang diuraikan dalam PSAK 72 memungkinkan entitas untuk secara akurat mencatat pendapatan, yang mencerminkan transfer manfaat dan risiko yang terkait dengan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Penerapan standar ini memastikan bahwa pendapatan diakui berdasarkan prinsip bahwa entitas harus menagih imbalan yang menjadi haknya sebagai hasil dari pertukaran barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan. Hal tersebut mencerminkan komitmen entitas terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan praktik akuntansi internasional yang diakui. Dengan demikian, PSAK 72 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi entitas untuk mengelola dan melaporkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang andal.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak

Dalam dunia bisnis dan hukum, kontrak merupakan perjanjian yang mengikat antara dua

pihak atau lebih yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Namun, terdapat situasi di mana kontrak tidak terlaksana, baik karena tidak adanya kontrak yang jelas atau karena terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus *force majeure*, di mana terjadi peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendali para pihak, seperti bencana alam atau perang, kontrak dapat menjadi tidak terlaksana karena kondisi tersebut menghalangi salah satu atau kedua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang berutang tidak harus mengganti kerugian jika ia dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi perikatan disebabkan oleh keadaan memaksa yang tak terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan padanya

Contoh lain adalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak. Misalnya, jika sebuah perusahaan konstruksi tidak dapat menyelesaikan proyek pada waktu yang telah disepakati karena masalah internal, maka pihak pemberi kontrak dapat mengklaim kerugian atau memutuskan kontrak kerjasama. Terdapat juga situasi di mana kontrak tidak terlaksana karena adanya perubahan regulasi pemerintah yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin atau ilegal.

Terdapat beberapa kelompok isu untuk mempermudah pemahaman atas permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebagai berikut:

a. Tidak Terdapat kontrak:

Dalam konteks hukum kontrak, istilah "kontrak yang tidak terlaksana penuh" (wholly unperformed contract) merujuk pada situasi di mana tidak ada kewajiban yang telah dipenuhi oleh salah satu pihak. Menurut standar IFRS 15 (PSAK72), jika kedua pihak memiliki hak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa harus memberikan kompensasi kepada pihak lain, maka kontrak tersebut dianggap tidak ada. Namun, jika hanya satu pihak yang memiliki hak tersebut, maka kontrak tetap berlaku di bawah IFRS 15 dan tunduk pada persyaratan pengungkapan yang ditetapkan. Kontrak yang tidak terlaksana penuh dapat memiliki implikasi signifikan terhadap pengakuan pendapatan, terutama jika terdapat perubahan dalam kondisi atau ketentuan kontrak yang mungkin mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

b. Kontrak tidak terlaksana penuh

Dalam konteks IFRS 15, kontrak dianggap tidak terlaksana penuh jika :

1) Entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan

Ketika entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, ini berarti bahwa proses pengakuan pendapatan belum dapat dilakukan. Sesuai dengan PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

diakui ketika kontrol atas barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan ke pelanggan, yang menandakan bahwa kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan oleh entitas. Hal ini penting karena pengendalian atas barang atau jasa merupakan indikator bahwa pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut, dan entitas telah memenuhi kewajibannya dalam kontrak. Jika barang atau jasa belum dialihkan, entitas harus menunda pengakuan pendapatan hingga momen pengalihan kontrol tersebut terjadi. Ini juga berarti bahwa entitas harus memantau dengan cermat kemajuan pelaksanaan kewajibannya dan memastikan bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengalihan kontrol telah terpenuhi sebelum pendapatan dapat diakui.

- 2) Entitas belum menerima atau berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan.

Pernyataan di atas mengacu pada situasi di mana sebuah entitas belum memenuhi kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan. Menurut PSAK 72, pendapatan tidak dapat diakui sampai entitas tersebut telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan dalam kontrak tersebut. Kewajiban pelaksanaan bisa berupa pengiriman barang atau penyediaan jasa yang telah disepakati dalam kontrak.

Jika suatu kontrak tidak terlaksana penuh, maka entitas tidak dapat mengakui

pendapatan dari kontrak tersebut sampai kriteria pengakuan terpenuhi.

3. Perubahan dan modifikasi kontrak

a. Kombinasi Kontrak

Dalam melakukan proses bisnis tidak jarang para pelaku bisnis melakukan kombinasi kontrak dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Kombinasi kontrak terjadi ketika dua atau lebih kontrak yang dinegosiasikan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pelanggan yang sama atau terkait, dan dianggap sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal.

Sebagai contoh kombinasi kontrak, kita dapat mempertimbangkan kasus sebuah perusahaan properti, PT ABC, yang membangun kompleks perumahan dan menjual unit rumah yang dibangunnya. Misalkan PT ABC menegosiasikan penjualan beberapa unit rumah kepada satu pembeli atau sekelompok pembeli yang terkait. Dalam situasi ini, PT ABC mungkin menawarkan harga khusus atau kondisi pembayaran yang menguntungkan jika pembeli setuju untuk membeli beberapa unit rumah sekaligus. Kontrak-kontrak ini, meskipun secara teknis terpisah, akan dikombinasikan dan dianggap sebagai satu transaksi tunggal karena mereka dinegosiasikan sebagai paket dan memiliki tujuan komersial yang sama, yaitu penjualan massal unit rumah dengan kondisi yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan penjual.

Kombinasi kontrak seperti contoh tersebut sering terjadi dalam dalam kegiatan bisnis, di mana pembeli besar atau investor dapat bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan berkomitmen pada pembelian volume yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat mencakup aspek-aspek seperti jadwal pembangunan yang seragam, desain yang serupa, dan kuantitas yang lebih banyak, yang semuanya menambah nilai bagi pembeli dan memungkinkan penjual untuk mengoptimalkan sumber daya dan perencanaan.

b. modifikasi kontrak

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct).

Peningkatan ruang lingkup kontrak sering terjadi ketika ada penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan bersifat dapat dibedakan. Penambahan barang atau jasa yang dapat dibedakan ini memerlukan penyesuaian dalam pengakuan pendapatan. Jika barang atau jasa yang ditambahkan memenuhi kriteria sebagai kewajiban pelaksanaan yang dapat dibedakan, maka entitas harus mengalokasikan bagian dari harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan tersebut dan mengakui pendapatan ketika

atau seiring dengan penyelesaian kewajiban pelaksanaan itu. Perubahan dalam ruang lingkup kontrak juga dapat mempengaruhi harga kontrak, yang harus mencerminkan harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa yang ditambahkan.

Sebagai contoh, misalnya, sebuah perusahaan konstruksi yang awalnya hanya diwajibkan untuk membangun sebuah gedung, kemudian diminta juga untuk menyediakan layanan desain interior yang dapat dibedakan dari kontrak pembangunan gedung tersebut. Dalam hal ini, layanan desain interior merupakan tambahan yang memiliki nilai dan fungsi tersendiri, sehingga dianggap sebagai penambahan yang dapat dibedakan. Akibatnya, harga kontrak akan meningkat sesuai dengan nilai layanan tambahan tersebut, yang harus mencerminkan harga jual berdiri sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan.

Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

c. Modifikasi Kontrak tidak terpisah.

Modifikasi kontrak yang tidak dianggap sebagai kontrak terpisah memerlukan penilaian khusus terkait dengan janji barang atau jasa yang masih

harus disediakan di bawah kontrak asli. Jika barang atau jasa yang tersisa adalah berbeda, maka modifikasi tersebut akan diperhitungkan secara prospektif. Ini berarti bahwa pendapatan dari kewajiban kinerja yang telah dipenuhi sebelumnya tidak berubah. Harga transaksi yang masih tertunda akan dialokasikan ke kewajiban kinerja yang belum dipenuhi, termasuk harga yang dialokasikan ke kewajiban kinerja di bawah kontrak sebelum modifikasi dan yang ditambahkan karena modifikasi. Namun, jika barang atau jasa yang masih harus disediakan tidak berbeda, barang atau jasa tambahan setelah modifikasi dianggap sebagai bagian dari satu kewajiban kinerja yang sebagian telah dipenuhi pada saat modifikasi. Hal tersebut mengakibatkan penyesuaian kumulatif satu kali terhadap pendapatan. Metode campuran dapat digunakan jika mencerminkan esensi modifikasi kontrak dengan tepat. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika modifikasi tidak terkait dengan kewajiban kinerja yang telah dipenuhi sebelumnya tetapi berkaitan dengan yang tersisa

Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki kontrak untuk menyediakan layanan konsultasi selama satu tahun, dan di tengah periode kontrak, pelanggan meminta tambahan layanan yang tidak termasuk dalam kontrak awal. Jika layanan tambahan ini tidak dianggap sebagai barang atau jasa yang berbeda dan harga kontrak meningkat tidak sebanding dengan

harga jual mandiri layanan tambahan tersebut, maka modifikasi ini akan diperlakukan sebagai bagian dari kontrak yang ada, bukan sebagai kontrak baru. Dalam hal ini, perusahaan harus menyesuaikan pendapatan yang diakui sejauh ini dan mengalokasikan kembali harga transaksi yang belum diakui ke kewajiban kinerja yang belum dipenuhi, termasuk layanan tambahan tersebut. Ini mungkin mengakibatkan penyesuaian kumulatif satu kali terhadap pendapatan yang diakui.

4. Identifikasi kewajiban pelaksanaan

Untuk dapat mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, entitas pada awal terjadinya kontrak harus dapat mengidentifikasi janji dengan pelanggan yang merupakan hal-hal yang disepakati akan dilakukan oleh penjual (penyedia jasa) dalam suatu kontrak kerja. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan, Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Sebagai contoh, penjual di online shop berkontrak kepada pembeli untuk mengirimkan barang yang dijual dengan keadaan sempurna sampai ke tempat pembeli. Oleh karenanya, pembeli akan menambahkan bubble wrap dan kardus untuk memastikan barang tiba dengan kondisi seperti yang diperjanjikan meskipun secara eksplisit tidak ada kewajiban penambahan tersebut dalam kontrak.

Harga transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya biaya pengiriman). Dalam penentuan harga, entitas dapat menghitung berdasarkan harga per penyelesaian kewajiban atau melakukan pengalokasian Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan, tergantung dari pertimbangan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi, Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.

5. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan

Entitas diharuskan untuk melakukan pengukuran atas tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan kontrak dengan pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan mencerminkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan hingga tanggal pelaporan. PSAK 72 mengharuskan entitas untuk mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak tersebut, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Pengukuran tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti input method yang mengukur sumber daya yang telah dikonsumsi relatif terhadap total sumber daya yang diharapkan untuk

menyelesaikan kewajiban, atau output method yang mengukur hasil yang telah dicapai. Metode yang dipilih harus mampu menggambarkan kemajuan entitas dalam menyelesaikan kewajiban pelaksanaan yang ada dalam kontrak. Selain itu, entitas juga harus konsisten dalam menerapkan metode pengukuran yang dipilih untuk kewajiban pelaksanaan yang serupa dalam keadaan yang serupa.

Pendapatan harus diakui sejalan dengan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Jika kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu, pendapatan diakui sepanjang periode tersebut. Namun, jika kewajiban pelaksanaan diselesaikan pada suatu titik waktu tertentu, pendapatan diakui pada titik waktu tersebut.

Kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu

Kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu merupakan konsep penting dalam akuntansi dan manajemen kontrak yang mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi secara berkelanjutan selama periode kontrak. Misalnya, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dapat mencakup penyediaan layanan yang manfaatnya diterima dan dikonsumsi oleh pelanggan secara simultan dengan pelaksanaannya. Sebagai contoh, layanan pengelolaan gaji bulanan yang disediakan oleh sebuah entitas kepada pelanggannya merupakan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu karena pelanggan menerima manfaat dari layanan tersebut secara langsung saat transaksi gaji diproses.

Dalam hal ini, entitas yang menyediakan layanan akan mengakui pendapatan sepanjang waktu sesuai dengan kemajuan penyelesaian

kewajiban pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan pengakuan pendapatan pada waktu tertentu, di mana pendapatan diakui pada titik tertentu dalam waktu ketika manfaat signifikan dari barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. Contoh lainnya adalah layanan konsultasi, di mana entitas mungkin memiliki hak untuk memaksa pembayaran dari pelanggan jika layanan telah sebagian disediakan, bahkan jika kontrak tersebut diakhiri lebih awal oleh pelanggan

Kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu

Kewajiban kinerja pada suatu titik waktu mengacu pada kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Kewajiban ini dianggap terpenuhi ketika kontrol atas barang atau jasa tersebut telah dialihkan ke pelanggan, yang berarti pelanggan telah mendapatkan kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh manfaat hampir seluruhnya dari barang atau jasa tersebut. Dalam praktiknya, ini bisa terjadi, misalnya, saat sebuah produk diserahkan dan pelanggan mendapatkan hak legal atas produk tersebut, atau ketika risiko dan manfaat kepemilikan signifikan telah dialihkan ke pelanggan. Penting untuk menentukan momen spesifik ketika kontrol tersebut dialihkan karena pada titik itulah pendapatan dapat diakui.

Pendapatan komprehensif lain

Dalam praktek bisnis sehari-hari, banyak sekali terdapat transaksi yang terjadi akibat dari selisih nilai historis dengan nilai wajarnya, yang kadang menjadikan ambiguitas atas penyajian laporan keuangan, misalnya, manajemen membeli suatu aset properti investasi senilai Rp. 500.000.000 beberapa tahun lalu yang sekarang

harganya meningkat menjadi Rp. 550.000.000. Apakah seharusnya manajemen membuku selisih investasi tersebut meskipun pengakuan keuntungan dari selisih tersebut sangat subjektif dari independensi atas siapa dan bagaimana aset tersebut dinilai. Disisi lain, entitas pasti tidak akan mendapatkan potensi keuntungan dari selisih nilai investasi sebesar Rp. 50.000.000 apabila tidak ada tindakan manajemen dalam berinvestasi sebelumnya. Konsep Other Comprehensive income (OCI) menjadi jembatan untuk mengakomodasi transaksi tersebut

Pendapatan Komprehensif Lain muncul sebagai respons terhadap beberapa faktor:

Perlunya Penyajian Informasi Keuangan yang Lebih Lengkap:

- Laporan laba rugi tradisional, yang hanya fokus pada laba bersih, dianggap kurang informatif bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Laporan laba rugi tradisional memang memiliki fokus utama pada laba bersih, namun tren saat ini menunjukkan bahwa investor dan pengguna laporan keuangan lainnya mencari informasi yang lebih mendalam. Laporan tersebut sering kali tidak menyediakan detail yang cukup tentang bagaimana angka-angka tersebut dicapai, atau informasi tentang faktor-faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, laporan laba rugi komprehensif mencakup elemen-elemen seperti pendapatan komprehensif lainnya, yang memberikan gambaran yang lebih luas tentang kinerja keuangan perusahaan daripada hanya laba bersih. Ini termasuk pengukuran seperti perubahan nilai

wajar aset keuangan atau dampak dari perubahan kurs mata uang asing. Selain itu, laporan arus kas dan catatan kaki laporan keuangan dapat memberikan konteks tambahan yang berguna untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

- OCI diciptakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perubahan ekuitas perusahaan, termasuk peristiwa yang tidak secara langsung menghasilkan laba bersih.

Other Comprehensive Income (OCI) merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kinerja keuangan perusahaan. OCI mencakup pendapatan dan pengeluaran yang belum direalisasi dan tidak dicatat dalam laba bersih, seperti perubahan nilai wajar investasi atau aset keuangan lainnya, serta perubahan kurs mata uang asing yang mempengaruhi ekuitas. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat efek ekonomi dari peristiwa tertentu yang tidak langsung mempengaruhi laba bersih saat ini, tetapi dapat mempengaruhi nilai perusahaan di masa depan. Dengan demikian, OCI memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang potensi risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan, yang tidak selalu tercermin dalam pengukuran laba bersih saja. Ini adalah alat yang berharga bagi investor dan analis untuk menilai kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih informasi.

Evolusi Instrumen Keuangan dan Transaksi:

- Perkembangan instrumen keuangan yang kompleks, seperti investasi pada aset

keuangan tersedia untuk dijual, dan transaksi seperti konversi utang dan penerjemahan laporan keuangan, membutuhkan pengakuan pendapatan dan pengukuran yang lebih fleksibel.

Instrumen keuangan yang kompleks telah menjadi bagian integral dari pasar global, memungkinkan diversifikasi dan manajemen risiko yang lebih efektif. Investasi pada aset keuangan yang tersedia untuk dijual memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Sementara itu, transaksi seperti konversi utang menjadi instrumen ekuitas menawarkan perusahaan cara untuk mengelola kewajiban keuangannya dengan lebih efisien. Penerjemahan laporan keuangan antar mata uang juga penting dalam era globalisasi ini, memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyajikan hasil keuangannya secara konsisten di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan dan pengukuran yang fleksibel sangat diperlukan untuk mencerminkan realitas ekonomi yang dinamis dan beragam ini. Pendekatan yang lebih adaptif terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan dapat membantu para pemangku kepentingan memahami posisi keuangan yang sebenarnya dan membuat keputusan yang lebih tepat.

- OCI memungkinkan pencatatan keuntungan atau kerugian dari instrumen dan transaksi ini tanpa memengaruhi laba bersih, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan perusahaan.

Other Comprehensive Income (OCI) merupakan elemen penting dalam laporan keuangan yang memberikan gambaran lebih luas tentang kinerja keuangan perusahaan. OCI mencakup item-item yang belum direalisasi dan tidak dihitung dalam laba bersih, seperti keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang asing, perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian aktuarial pada program manfaat pasti. Dengan demikian, OCI memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak ekonomi dari peristiwa dan transaksi tertentu yang tidak muncul dalam laba bersih. Hal ini memungkinkan para stakeholder, termasuk investor dan kreditor, untuk membuat penilaian yang lebih tepat tentang prospek jangka panjang perusahaan. Selain itu, penyajian OCI secara terpisah dari laba bersih membantu dalam menghindari distorsi dalam pengukuran kinerja operasional perusahaan, karena laba bersih hanya mencerminkan hasil dari aktivitas operasional rutin. Dengan adanya OCI, perusahaan dapat menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam laporan keuangannya, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas selain dari pendapatan dan biaya operasional. Ini juga membantu dalam memenuhi standar pelaporan keuangan internasional yang mengharuskan penyajian laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan, Pendapatan komprehensif dan pendapatan komprehensif lain (OCI)

Pendapatan merupakan ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan jumlah

total penerimaan dari penjualan barang dan jasa dalam periode tertentu. Sementara itu, Pendapatan Komprehensif mencakup semua perubahan ekuitas yang tidak berasal dari transaksi pemilik, seperti pendapatan yang belum direalisasi dari investasi. OCI, atau Other Comprehensive Income, adalah komponen dari pendapatan komprehensif yang mencatat pos-pos pendapatan yang belum direalisasi dan tidak dihitung dalam laba bersih, seperti perubahan nilai wajar dari sekuritas yang tersedia untuk dijual. Konsep-konsep ini sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan karena memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan, di luar apa yang ditunjukkan oleh laba bersih saja.

Dalam praktik akuntansi, pendapatan diakui sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, yang menentukan kapan pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan. Pendapatan Komprehensif, di sisi lain, membantu para stakeholder memahami dampak dari perubahan pasar dan keputusan investasi terhadap nilai ekuitas perusahaan. OCI memberikan wawasan tambahan tentang item-item yang dapat mempengaruhi ekuitas di masa depan dan potensi risiko atau keuntungan yang belum terwujud. Dengan demikian, analisis yang mendalam tentang Pendapatan, Pendapatan Komprehensif, dan OCI memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih informasi oleh manajemen, investor, dan kreditur.

Pemahaman yang solid tentang konsep-konsep ini juga penting untuk kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan internasional, seperti IFRS, yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan pendapatan komprehensif dalam

laporan keuangannya. Ini memastikan transparansi dan memungkinkan perbandingan yang adil antara perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, akuntan dan profesional keuangan harus terus mengupdate pengetahuan mereka tentang standar-standar ini dan bagaimana mereka mempengaruhi penyajian dan interpretasi data keuangan. Keseluruhan, Pendapatan, Pendapatan Komprehensif, dan OCI adalah elemen kunci yang membantu dalam menggambarkan gambaran yang lebih akurat dan holistik tentang performa dan posisi keuangan perusahaan. Berikut penjelasan detail dan perbedaan ketiganya:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari entitas dari penyediaan barang atau jasa, atau kegiatan lain yang menjadi sumber utama penghasilan entitas selama periode akuntansi tertentu. Pendapatan diakui pada saat kriterianya terpenuhi, yaitu:

- Kemungkinan realisasi: Terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa kemungkinan entitas untuk merealisasikan manfaat ekonomi dari transaksi terkait dengan pendapatan tersebut cukup tinggi.
- Pengukuran: Jumlah pendapatan dapat diukur dengan cukup andal.
- Pengakuan pendapatan pada periode yang tepat: Pendapatan diakui dalam periode akuntansi di mana kriteria pengakuan terpenuhi.

2. Pendapatan Komprehensif

Pendapatan komprehensif adalah perubahan ekuitas perusahaan selama periode akuntansi yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain

perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Pendapatan komprehensif terdiri dari dua komponen:

- Pendapatan: Diakui dalam laporan laba rugi.
- OCI (Other Comprehensive Income): Diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, namun tidak termasuk dalam laba bersih.
- Contoh: Keuntungan/kerugian dari investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual, keuntungan/kerugian dari penilaian kembali aset tertentu, keuntungan/kerugian dari penerjemahan laporan keuangan entitas asing, aktuaris keuntungan/kerugian.

3. OCI (Other Comprehensive Income)

OCI adalah komponen dari pendapatan komprehensif yang mewakili perubahan ekuitas perusahaan selama periode akuntansi yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. OCI diklasifikasikan menjadi dua kategori:

- OCI dari Transaksi dan Peristiwa Lainnya yang Terkait dengan Ekuitas: Termasuk perubahan ekuitas yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya yang terkait dengan ekuitas, seperti perubahan nilai investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual, dan perubahan nilai aset yang diklasifikasikan kembali dari aset tidak lancar ke aset lancar.
- OCI dari Perubahan Nilai Aset Jangka Panjang yang Diklasifikasikan Kembali sebagai Aset Lancar: Termasuk perubahan nilai aset jangka panjang yang diklasifikasikan kembali sebagai aset lancar, seperti perubahan nilai aset yang

sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang diklasifikasikan kembali sebagai aset lancar karena akan direalisasi dalam waktu satu tahun.

Oleh: Pricilia Joice Pesak, SE., M.S.A.

A. Pengertian Persediaan

Persediaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 202 adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; dalam proses produksi untuk penjualan tersebut dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Aset yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali contohnya adalah barang dagangan yang dibeli oleh pengecer dan dijual kembali atau tanah dan properti lainnya yang dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi, barang jadi yang diproduksi serta perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.

Terdapat perbedaan persediaan antara jenis usaha dagang dan industri. Untuk usaha dagang menggunakan barang dagangan sebagai persediaannya. Sedangkan usaha industri terdiri atas tiga, yaitu bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Biaya persediaan merupakan bagian dari biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Biaya yang dikeluarkan untuk barang dan bahan yang ada namun belum digunakan dalam proses produksi disebut dengan persediaan bahan baku. Contohnya kayu merupakan bahan untuk

membuat lemari kayu atau kertas sebagai bahan baku untuk membuat buku.

Nilai realisasi neto dalam persediaan merupakan penentuan harga jual dalam kegiatan bisnis normal yang diperoleh dari estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan. Nilai wajar adalah harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas atau harga yang akan diterima untuk menjual aset pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar.

Perusahaan menggunakan dua sistem untuk pengelolaan persediaan agar catatan persediaan akurat, yaitu sistem perpetual dan periodik. Sistem perpetual merupakan sistem yang melacak perubahan persediaan secara terus menerus. Artinya setiap pembelian dan penjualan dicatat pada akun persediaan setiap terjadi transaksi. Barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali atau bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi di debit ke persediaan bukan pembelian. Biaya angkut saat pembelian persediaan didebit ke persediaan bukan ke pembelian. Retur atau penyisihan pembelian dan diskon pembelian tidak dicatat secara terpisah tetapi di kreditkan pada persediaan. Beban pokok penjualan dicatat pada setiap penjualan dengan mendebit beban pokok penjualan dan kredit persediaan. Pengukuran pengendalian dilakukan dengan cara membuat buku besar pembantu catatan persediaan individual yang menunjukkan jumlah dan biaya dari setiap persediaan yang ada.

Sistem periodik merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk menentukan jumlah persediaan secara berkala. Persediaan dicatat

dengan mendebit akun pembelian selama periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menambahkan biaya perseidaan yang ada diawal periode sehingga menjadi total beban pokok yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, perhitungan beban pokok penjualan, perusahaan mengurangi persediaan akhir dari beban pokok yang tersedia untuk dijual.

B. Metode Penilaian Persediaan: FIFO, LIFO, Weighted Average

1. First-In, First-Out (FIFO)

Metode FIFO merupakan metode yang mengasumsikan perusahaan barang berdasarkan urutan pembeliannya. Artinya, barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali digunakan atau dijual untuk perusahaan dagang. Sehingga persediaan yang tersisa adalah persediaan yang terbaru. Barang yang dijual atau digunakan diakui terlebih dahulu. Dengan kata lain, barang yang lebih lama dibuang atau dijual terlebih dahulu. Biaya pembelian atau produksi yang paling baru digunakan untuk menghitung jumlah barang yang tersisa dalam persediaan akhir.

Misalkan perusahaan memiliki urutan pembelian persediaan sebagai berikut:

100 unit pada harga \$10 per unit (Batch 1)

150 unit pada harga \$12 per unit (Batch 2)

200 unit pada harga \$15 per unit (Batch 3)

Kemudian, perusahaan menjual 250 unit.

Dengan menggunakan metode FIFO, unit yang dijual diambil dari batch yang paling awal:

100 unit dari Batch 1: $100 * \$10 = \1000

150 unit dari Batch 2: $150 * \$12 = \1800

Total harga pokok penjualan (HPP) = $\$1000 + \$1800 = \$2800$

Persediaan akhir terdiri dari 200 unit dari Batch 3, dengan total nilai: $200 * \$15 = \3000

Kelebihan Metode FIFO antara lain:

- 1) Mencerminkan Aliran Barang yang Lebih Nyata: Metode FIFO seringkali menunjukkan aliran fisik barang yang lebih realistis, terutama untuk barang dengan masa simpan terbatas atau mudah rusak.
- 2) Laporan Keuangan yang Lebih Akurat: Nilai persediaan akhir lebih akurat mencerminkan harga pasar karena barang yang lebih tua dijual terlebih dahulu.
- 3) Pengurangan Risiko Kedaluwarsa: Karena barang yang lebih tua dijual terlebih dahulu, Anda tidak perlu khawatir tentang barang usang atau kedaluwarsa yang ada dalam persediaan.

Metode FIFO adalah metode yang efektif untuk penilaian persediaan yang sering digunakan karena kemampuannya untuk mencerminkan aliran barang yang lebih alami dan menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih akurat. Meskipun demikian, pilihan metode penilaian persediaan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik perusahaan dan lingkungan ekonominya.

2. Last In-First Out (LIFO)

Dalam akuntansi, metode LIFO (Last In, First Out) adalah salah satu metode penilaian

persediaan yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP) dan nilai persediaan akhir. Dalam metode LIFO berarti barang yang terakhir kali masuk ke dalam persediaan adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Oleh karena itu, biaya dari barang yang terakhir dibeli atau diproduksi dianggap sebagai biaya yang pertama kali dikeluarkan, sehingga barang yang tersisa di persediaan akhir adalah barang yang paling awal dibeli atau diproduksi.

Misalkan perusahaan memiliki urutan pembelian persediaan sebagai berikut:

100 unit pada harga \$10 per unit (Batch 1)
150 unit pada harga \$12 per unit (Batch 2)
200 unit pada harga \$15 per unit (Batch 3)
Kemudian, perusahaan menjual 250 unit.

Dengan menggunakan metode LIFO, unit yang dijual diambil dari batch yang paling akhir:

200 unit dari Batch 3: $200 * \$15 = \3000
50 unit dari Batch 2: $50 * \$12 = \600
Total harga pokok penjualan (HPP) = $\$3000 + \$600 = \$3600$

Persediaan akhir terdiri dari:

100 unit dari Batch 1: $100 * \$10 = \1000
100 unit dari Batch 2: $100 * \$12 = \1200
Total nilai persediaan akhir = $\$1000 + \$1200 = \$2200$

Kelebihan Metode LIFO antara lain:

- 1) Pengurangan Beban Pajak Metode LIFO: Selama periode inflasi, metode LIFO dapat menghasilkan laba kotor yang lebih rendah, yang berarti beban pajak yang lebih rendah karena biaya barang yang lebih baru dan lebih mahal diakui terlebih dahulu.
- 2) Pencocokan Biaya dengan Pendapatan: Teknik ini lebih baik dalam mencocokkan biaya dan pendapatan terbaru. Ini memberikan gambaran profitabilitas yang lebih realistis.

Kekurangan Metode LIFO adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Persediaan yang Tidak Realistis: Karena menggunakan harga yang lebih lama, persediaan akhir mungkin dinilai terlalu rendah, yang mungkin tidak mencerminkan harga pasar saat ini.
- 2) Tidak Diterima di Beberapa Standar Akuntansi: Metode LIFO tidak diterima di bawah Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), tetapi masih diterima di bawah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat (GAAP).
- 3) Kompleksitas Administratif: LIFO dapat lebih sulit dan memerlukan catatan yang lebih rinci, terutama di lingkungan dengan banyak transaksi.

Dalam kondisi inflasi, metode LIFO adalah metode penilaian persediaan yang dapat menguntungkan karena dapat mengurangi beban pajak dengan mengakui biaya barang

terbaru terlebih dahulu. Namun, metode ini memiliki kekurangan, terutama dalam penilaian persediaan akhir, di mana mungkin tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya dan kompleksitas administrasi yang terkait dengannya. Pilihan metode penilaian persediaan harus sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku dan kebutuhan bisnis.

3. Metode Weighted Average

Dalam akuntansi, Metode Weighted Average, atau metode rata-rata, digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP) dan nilai persediaan akhir. Metode ini mengumpulkan biaya untuk semua persediaan yang dibeli dan kemudian membaginya dengan jumlah unit yang tersedia.

Misalkan perusahaan memiliki urutan pembelian persediaan sebagai berikut:

100 unit pada harga \$10 per unit (Batch 1)
150 unit pada harga \$12 per unit (Batch 2)
200 unit pada harga \$15 per unit (Batch 3)
Total biaya dan total unit:

Total biaya = $(100 * \$10) + (150 * \$12) + (200 * \$15) = \$1000 + \$1800 + \$3000 = \$5800$

Total unit = $100 + 150 + 200 = 450$ unit

Biaya rata-rata per unit = Total biaya / Total unit = $\$5800 / 450 = \12.89 per unit (dibulatkan).

Jika perusahaan menjual 250 unit, HPP dihitung sebagai:

HPP = 250 unit * \$12.89 = \$3222.50

Persediaan akhir terdiri dari 200 unit dengan nilai:

Persediaan akhir = 200 unit * \$12.89 = \$2578.00

Kelebihan Metode Rata-rata:

- 1) Metode ini cukup mudah dihitung dan diterapkan dalam sistem akuntansi.
- 2) Stabilisasi Biaya: Menggunakan biaya rata-rata dapat mengurangi fluktuasi biaya. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih stabil tentang biaya persediaan akhir dan barang yang dijual.
- 3) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi: Diatur oleh Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat (GAAP).

Kekurangan Metode Rata-rata:

- 1) Kurang Akurat dalam Periode Harga Berfluktuasi: Selama periode harga berfluktuasi yang signifikan, biaya rata-rata mungkin tidak menunjukkan biaya persediaan terkini atau asli.
- 2) Tidak Mengoptimalkan Pajak: Karena biaya rata-rata yang digunakan, metode ini mungkin kurang efektif daripada metode LIFO dalam mengurangi beban pajak selama periode inflasi.

Pilihan metode penilaian persediaan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis dan kondisinya. Metode rata-rata, yang mudah diterapkan dan sederhana,

menghitung biaya rata-rata dari semua barang yang tersedia untuk dijual. Namun, metode ini mungkin tidak selalu mencerminkan biaya terkini, tetapi itu diterima secara luas dan dapat memberikan gambaran yang lebih stabil tentang biaya persediaan.

C. Pengaruh Perubahan Harga Terhadap Metode Penilaian Persediaan

Metode FIFO (First In, First Out)

Pengaruh Kenaikan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Dalam metode FIFO, barang yang pertama kali dibeli (dengan harga lebih rendah) dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu, HPP cenderung lebih rendah selama periode kenaikan harga.

Laba: Laba cenderung lebih tinggi karena HPP yang lebih rendah.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga yang lebih baru (lebih tinggi), yang mencerminkan harga pasar saat ini.

Pengaruh Penurunan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Barang yang pertama kali dibeli (dengan harga lebih tinggi) dijual terlebih dahulu. Ini dapat menyebabkan HPP lebih tinggi selama periode penurunan harga.

Laba: Laba cenderung lebih rendah karena HPP yang lebih tinggi.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga yang lebih baru (lebih

rendah), yang mencerminkan harga pasar saat ini.

Metode LIFO (Last In, First Out)

Pengaruh Kenaikan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Dalam metode LIFO, barang yang terakhir kali dibeli (dengan harga lebih tinggi) dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu, HPP cenderung lebih tinggi selama periode kenaikan harga.

Laba: Laba cenderung lebih rendah karena HPP yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi beban pajak.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga yang lebih lama (lebih rendah), yang mungkin tidak mencerminkan harga pasar saat ini.

Pengaruh Penurunan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Barang yang terakhir kali dibeli (dengan harga lebih rendah) dijual terlebih dahulu. Ini dapat menyebabkan HPP lebih rendah selama periode penurunan harga.

Laba: Laba cenderung lebih tinggi karena HPP yang lebih rendah.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga yang lebih lama (lebih tinggi), yang mungkin tidak mencerminkan harga pasar saat ini.

Metode Average (Rata-Rata)

Pengaruh Kenaikan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Metode rata-rata menghasilkan HPP yang berada di antara harga lama dan harga baru, memberikan stabilitas dalam penentuan HPP selama kenaikan harga.

Laba: Laba cenderung lebih stabil karena HPP tidak berfluktuasi sebanyak metode FIFO atau LIFO.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan biaya rata-rata, yang juga akan berada di antara harga lama dan harga baru.

Pengaruh Penurunan Harga

Harga Pokok Penjualan (HPP): Sama seperti pada kenaikan harga, HPP cenderung stabil karena menggunakan biaya rata-rata.

Laba: Laba cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga yang tajam.

Persediaan Akhir: Persediaan akhir dinilai berdasarkan biaya rata-rata, memberikan nilai yang lebih stabil dibandingkan metode lain.

Perubahan harga mempengaruhi metode penilaian persediaan secara berbeda:

FIFO: Lebih mencerminkan harga pasar saat ini dalam persediaan akhir, tetapi dapat menyebabkan laba dan beban pajak yang lebih tinggi selama kenaikan harga.

LIFO: Dapat mengurangi beban pajak selama kenaikan harga, tetapi nilai persediaan akhir mungkin tidak mencerminkan harga pasar saat ini.

Average: Menyediakan stabilitas dalam HPP dan laba, mencerminkan nilai rata-rata dari persediaan.

- D. Pengaruh FIFO, LIFO, dan Weighted Average terhadap laporan keuangan
1. Pengaruh Metode FIFO (First In, First Out) terhadap Laporan Keuangan

Harga Pokok Penjualan (HPP):

FIFO menggunakan biaya barang yang pertama kali dibeli untuk menghitung HPP. Dalam periode kenaikan harga, HPP akan lebih rendah karena barang yang dijual berasal dari batch yang lebih lama dan lebih murah. Dalam periode penurunan harga, HPP akan lebih tinggi karena barang yang dijual berasal dari batch yang lebih lama dan lebih mahal.

Laba Kotor:

Dalam periode kenaikan harga, laba kotor akan lebih tinggi karena HPP yang lebih rendah. Dalam periode penurunan harga, laba kotor akan lebih rendah karena HPP yang lebih tinggi.

Persediaan Akhir:

Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga barang yang paling baru dibeli. Selama kenaikan harga, nilai persediaan akhir akan lebih tinggi, mencerminkan harga pasar saat ini. Selama penurunan harga, nilai persediaan akhir akan lebih rendah, mencerminkan harga pasar yang lebih rendah.

Laba Bersih dan Pajak:

Karena laba kotor yang lebih tinggi selama kenaikan harga, laba bersih juga akan lebih tinggi, yang berarti beban pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, selama penurunan harga, laba bersih akan lebih rendah, yang berarti beban pajak yang lebih rendah.

2. Pengaruh Metode LIFO (Last In, First Out) terhadap Laporan Keuangan

Harga Pokok Penjualan (HPP):

LIFO menggunakan biaya barang yang terakhir kali dibeli untuk menghitung HPP. Dalam periode kenaikan harga, HPP akan lebih tinggi karena barang yang dijual berasal dari batch yang lebih baru dan lebih mahal. Dalam periode penurunan harga, HPP akan lebih rendah karena barang yang dijual berasal dari batch yang lebih baru dan lebih murah.

Laba Kotor:

Dalam periode kenaikan harga, laba kotor akan lebih rendah karena HPP yang lebih tinggi. Dalam periode penurunan harga, laba kotor akan lebih tinggi karena HPP yang lebih rendah.

Persediaan Akhir:

Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga barang yang paling lama dibeli. Selama kenaikan harga, nilai persediaan akhir akan lebih rendah karena menggunakan harga lama yang lebih murah.

Selama penurunan harga, nilai persediaan akhir akan lebih tinggi karena menggunakan harga lama yang lebih mahal.

Laba Bersih dan Pajak:

Karena laba kotor yang lebih rendah selama kenaikan harga, laba bersih juga akan lebih rendah, yang berarti beban pajak yang lebih rendah. Sebaliknya, selama penurunan harga, laba bersih akan lebih tinggi, yang berarti beban pajak yang lebih tinggi.

3. Pengaruh Metode Weighted Average (Rata-Rata Tertimbang) terhadap Laporan Keuangan

Harga Pokok Penjualan (HPP):

Weighted Average menggunakan biaya rata-rata dari semua barang yang tersedia untuk dijual selama periode. HPP cenderung lebih stabil dibandingkan dengan FIFO atau LIFO karena menggunakan rata-rata biaya.

Laba Kotor:

Laba kotor akan lebih stabil karena HPP tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang tajam. Tidak akan terlalu tinggi dalam periode kenaikan harga dan tidak terlalu rendah dalam periode penurunan harga.

Persediaan Akhir:

Persediaan akhir dinilai berdasarkan biaya rata-rata, yang

memberikan nilai yang lebih stabil dibandingkan metode lainnya. Nilai persediaan akhir akan berada di antara nilai yang diberikan oleh FIFO dan LIFO.

Laba Bersih dan Pajak:

Laba bersih akan lebih stabil karena laba kotor yang tidak terlalu berfluktuasi. Beban pajak juga akan lebih stabil karena laba bersih yang lebih konsisten.

BAB VI

Akuntansi untuk Investasi

Oleh: Adi Dwi Purnomo, S. Kom., M. Akt.

Investasi memainkan peran penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Baik perusahaan maupun individu berinvestasi untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk pertumbuhan aset, diversifikasi risiko, dan pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, akuntansi untuk investasi menjadi aspek krusial dalam pelaporan keuangan yang membantu dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan dan kinerja investasi.

Akuntansi untuk investasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal tentang investasi yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Informasi ini digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi yang informasional dan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai wajar dari investasi tersebut.

Akuntansi untuk investasi diatur oleh prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) atau standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards, IFRS). Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana investasi harus dicatat, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

A. Pengertian Investasi

Investasi dalam akuntansi adalah pembelian atau akuisisi aset yang diharapkan akan memberikan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Aset ini bisa berupa aset finansial seperti saham dan obligasi, atau aset fisik seperti properti dan peralatan.

Investasi adalah alokasi dana atau sumber daya ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan di masa depan. Secara umum, investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk aset finansial seperti saham dan obligasi, serta aset fisik seperti real estate dan komoditas.

Akuntansi untuk investasi adalah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Investasi dapat berupa saham, obligasi, properti, atau jenis aset lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari akuntansi untuk investasi. Investasi biasanya diklasifikasikan berdasarkan tujuan kepemilikan dan jangka waktu, seperti:

Jenis Investasi dalam Akuntansi

a. Investasi Jangka Pendek:

Investasi yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu satu tahun atau kurang. Contohnya termasuk surat berharga dan saham yang diperdagangkan di pasar saham.

- Surat Berharga: Instrumen keuangan seperti treasury bills atau commercial paper yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- Deposito Berjangka: Simpanan di bank yang jatuh temponya dalam satu tahun.

b. Investasi Jangka Panjang:

Investasi yang dimaksudkan untuk dipegang lebih dari satu tahun, seperti real estate atau saham dalam perusahaan afiliasi.

- Saham: Kepemilikan dalam perusahaan lain yang dimaksudkan untuk dipegang lebih dari satu tahun.
- Obligasi: Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.
- Properti: Investasi dalam real estate yang dimaksudkan untuk dipegang dalam jangka panjang.

B. Metode Akuntansi Investasi: Metode Ekuitas, Metode Cost, Metode Fair Value

Dalam akuntansi investasi, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan investasi berdasarkan tingkat kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki oleh investor terhadap entitas yang diinvestasikan. Tiga metode utama adalah Metode Ekuitas, Metode Cost, dan Metode Fair Value.

1. Metode Ekuitas (Equity Method)

Metode Ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak memiliki kendali penuh atas entitas yang diinvestasikan. Pengaruh signifikan biasanya ditandai dengan kepemilikan saham sebesar 20-50%. Karakteristik Metode Ekuitas diantaranya:

- Pengakuan Investasi Awal: Dicatat sebesar biaya perolehan.
- Penyesuaian Nilai Investasi: Nilai investasi disesuaikan setiap periode berdasarkan bagian

proporsional investor atas laba atau rugi bersih entitas yang diinvestasikan.

- Dividen: Dividen yang diterima dari entitas yang diinvestasikan mengurangi nilai investasi yang dicatat.

Contoh Pencatatan:

- **Investasi Awal:**

```
printout Copy code  
  
Debit: Investasi pada Perusahaan A $100,000  
Kredit: Kas $100,000
```

- **Bagian Laba Bersih:** Jika bagian investor atas laba bersih entitas yang diinvestasikan adalah \$10,000:

```
printout Copy code  
  
Debit: Investasi pada Perusahaan A $10,000  
Kredit: Pendapatan dari Investasi $10,000
```

- **Penerimaan Dividen:** Jika dividen yang diterima adalah \$5,000:

```
printout Copy code  
  
Debit: Kas $5,000  
Kredit: Investasi pada Perusahaan A $5,000
```

2. Metode Cost (Cost Method)

Metode Cost digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan atas entitas yang diinvestasikan, biasanya ditandai dengan kepemilikan saham kurang dari 20%. Karakteristik Metode Cost:

- Pengakuan Investasi Awal: Dicatat sebesar biaya perolehan.
- Pengakuan Pendapatan: Pendapatan diakui hanya ketika dividen diterima.

- Tidak Ada Penyesuaian Nilai: Nilai investasi tidak disesuaikan untuk bagian laba atau rugi bersih entitas yang diinvestasikan.

Contoh Pencatatan:

- Investasi Awal:

```

plain text Copy code
Debit: Investasi pada Perusahaan B $50,000
Kredit: Kas $50,000

```

- Penerimaan Dividen: Jika dividen yang diterima adalah \$2,000:

```

plain text Copy code
Debit: Kas $2,000
Kredit: Pendapatan Dividen $2,000

```

3. Metode Nilai Wajar (Fair Value Method)

Metode Nilai Wajar digunakan untuk investasi yang dipegang untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, dan investasi ini diukur berdasarkan nilai pasar saat ini. Karakteristik Metode Nilai Wajar:

- Pengakuan Investasi Awal: Dicatat sebesar biaya perolehan awal.
- Penilaian Berkala: Investasi dinilai ulang setiap periode berdasarkan nilai wajar.
- Pengakuan Laba/Rugi: Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi (untuk investasi yang dipegang untuk diperdagangkan) atau dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (untuk investasi tersedia untuk dijual).

Contoh Pencatatan:

- Investasi Awal

```

plain text Copy code
Debit: Investasi Saham $20,000
Kredit: Kas $20,000

```

- Penyesuaian Nilai Wajar: Jika nilai pasar meningkat menjadi \$22,000:

```

plantot
Copy code
Debit: Investasi Saham $2,000
Kredit: Keuntungan Tidak Direalisasi $2,000

```

Pemilihan metode akuntansi untuk investasi tergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki oleh investor atas entitas yang diinvestasikan. Metode Ekuitas digunakan untuk investasi dengan pengaruh signifikan, Metode Cost digunakan untuk investasi tanpa pengaruh signifikan, dan Metode Nilai Wajar digunakan untuk investasi yang dipegang untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual. Setiap metode memiliki implikasi yang berbeda terhadap pencatatan, penilaian, dan pelaporan investasi dalam laporan keuangan.

C. Pengaruh Metode Akuntansi Investasi terhadap Laporan Keuangan

Pemilihan metode akuntansi investasi yang tepat sangat penting karena memiliki dampak signifikan pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah analisis mengenai bagaimana Metode Ekuitas, Metode Cost, dan Metode Fair Value mempengaruhi laporan keuangan.

1. Metode Ekuitas (Equity Method)

Pengaruh terhadap Neraca:

- Investasi: Dicatat sebagai aset non-lancar dan nilainya meningkat atau menurun sesuai dengan bagian investor dari laba atau rugi bersih entitas yang diinvestasikan.

- Ekuitas: Tidak ada dampak langsung kecuali pada laba ditahan melalui pengakuan laba atau rugi dari investasi.

Pengaruh terhadap Laporan Laba Rugi:

- Pendapatan Investasi: Bagian proporsional dari laba bersih entitas yang diinvestasikan diakui sebagai pendapatan investasi.
- Dividen: Dividen yang diterima mengurangi nilai tercatat investasi, bukan diakui sebagai pendapatan.

Pengaruh terhadap Arus Kas:

- Investasi Awal: Keluar kas pada saat investasi awal.
- Dividen Diterima: Masuk kas dari dividen yang diterima.

Contoh Dampak:

- Jika perusahaan A memiliki 30% saham di perusahaan B dan perusahaan B melaporkan laba bersih sebesar \$100,000, perusahaan A akan mengakui \$30,000 sebagai pendapatan investasi.

2. Metode Cost (Cost Method)

Pengaruh terhadap Neraca:

- Investasi: Dicatat sebagai aset non-lancar pada biaya perolehan dan tidak disesuaikan kecuali terjadi penurunan nilai (impairment).
- Ekuitas: Tidak ada dampak langsung kecuali penurunan nilai diakui.

Pengaruh terhadap Laporan Laba Rugi:

- Pendapatan Dividen: Hanya dividen yang diterima dari entitas yang diinvestasikan yang diakui sebagai pendapatan.
- Tidak Ada Penyesuaian: Tidak ada pengakuan pendapatan atau beban terkait perubahan nilai

investasi atau laba/rugi entitas yang diinvestasikan.

Pengaruh terhadap Arus Kas:

- Investasi Awal: Keluar kas pada saat investasi awal.
- Dividen Diterima: Masuk kas dari dividen yang diterima.

Contoh Dampak:

- Jika perusahaan A memiliki 10% saham di perusahaan B dan menerima dividen sebesar \$5,000, perusahaan A akan mengakui \$5,000 sebagai pendapatan dividen.

3. Metode Nilai Wajar (Fair Value Method)

Pengaruh terhadap Neraca:

- Investasi: Dicatat pada nilai wajar, dengan penyesuaian berkala untuk mencerminkan perubahan nilai pasar.
- Aset Lancar atau Non-Lancar: Investasi yang dipegang untuk diperdagangkan dicatat sebagai aset lancar, sedangkan investasi tersedia untuk dijual dicatat sebagai aset non-lancar.

Pengaruh terhadap Laporan Laba Rugi:

- Keuntungan atau Kerugian: Perubahan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk investasi yang dipegang untuk diperdagangkan, pengakuan dilakukan di laporan laba rugi. Untuk investasi tersedia untuk dijual, pengakuan dilakukan di laporan laba rugi komprehensif lainnya.

Pengaruh terhadap Arus Kas:

- Investasi Awal: Keluar kas pada saat investasi awal.
- Penjualan Investasi: Masuk kas dari penjualan investasi yang diukur pada nilai wajar.

Contoh Dampak:

- Jika nilai pasar investasi meningkat dari \$20,000 menjadi \$22,000, perusahaan akan mengakui keuntungan tidak direalisasi sebesar \$2,000.

Tabel 6.1.
Perbandingan Dampak pada Laporan Keuangan

Metode	Neraca	Laporan Laba Rugi	Arus Kas
Metode Ekuitas	Investasi dicatat dan disesuaikan sesuai bagian laba/rugi entitas yang diinvestasikan	Bagian laba/rugi dari entitas yang diinvestasikan	Kas keluar saat investasi awal, kas masuk dari dividen
Metode Cost	Investasi dicatat pada biaya perolehan	Hanya pendapatan dividen yang diakui	Kas keluar saat investasi awal, kas masuk dari dividen
Metode Nilai Wajar	Investasi dicatat pada nilai wajar, disesuaikan berkala	Keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi atau laba rugi komprehensif	Kas keluar saat investasi awal, kas masuk dari penjualan investasi

Pemilihan metode akuntansi investasi memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Metode Ekuitas memberikan gambaran lebih dinamis karena mencerminkan bagian laba atau rugi dari entitas yang diinvestasikan, sementara Metode Cost lebih statis dan hanya mencatat pendapatan dividen. Metode Nilai Wajar memberikan informasi yang lebih akurat tentang nilai pasar investasi namun juga membawa volatilitas yang lebih tinggi ke laporan laba rugi. Pemilihan metode harus sesuai dengan tingkat pengaruh dan tujuan investasi perusahaan untuk memastikan pelaporan yang akurat dan transparan.

D. Analisis Risiko dan Pengaruhnya terhadap Akuntansi Investasi

Investasi mengandung berbagai jenis risiko yang harus dianalisis dengan cermat karena berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Berikut adalah jenis-jenis risiko utama yang terkait dengan investasi serta pengaruhnya terhadap akuntansi investasi. Jenis-Jenis Risiko dalam Investasi:

1. Risiko Pasar (Market Risk):

Risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar yang mempengaruhi nilai investasi. Pengaruh terhadap Akuntansi: Nilai wajar investasi harus disesuaikan berdasarkan harga pasar saat ini. Penurunan nilai pasar dapat menyebabkan pengakuan kerugian yang belum direalisasi.

2. Risiko Kredit (Credit Risk):

Risiko bahwa pihak yang berhutang tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka. Pengaruh terhadap Akuntansi: Untuk investasi dalam bentuk obligasi atau piutang, perlu dilakukan analisis kredit untuk menentukan kemungkinan gagal bayar. Jika terjadi penurunan kualitas kredit, perlu diakui penurunan nilai (impairment).

3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk):

Risiko bahwa investor tidak dapat menjual investasi tanpa mengalami kerugian signifikan. Pengaruh terhadap Akuntansi: Investasi yang tidak likuid mungkin harus dinilai pada harga yang lebih rendah jika penjualan segera diperlukan, mengakibatkan pengakuan kerugian.

4. Risiko Operasional (Operational Risk):

Risiko yang timbul dari kegagalan sistem internal, proses, atau tenaga kerja. Pengaruh terhadap Akuntansi: Kesalahan operasional

dapat mempengaruhi nilai investasi atau pengakuan pendapatan. Risiko ini memerlukan pengendalian internal yang kuat.

5. Risiko Hukum dan Regulasi (Legal and Regulatory Risk):

Risiko yang timbul dari perubahan hukum atau peraturan yang dapat mempengaruhi investasi. Pengaruh terhadap Akuntansi: Perubahan regulasi dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi atau pengungkapan yang diperlukan untuk investasi tertentu.

6. Risiko Inflasi (Inflation Risk):

Risiko bahwa inflasi akan mengikis nilai riil dari pengembalian investasi. Pengaruh terhadap Akuntansi: Penyesuaian nilai wajar investasi dapat diperlukan jika inflasi mempengaruhi nilai pasar aset.

Pengaruh Risiko terhadap Metode Akuntansi Investasi

1. Metode Ekuitas (Equity Method):

Risiko Pasar dan Kredit: Pengaruh risiko pasar dan kredit dapat mempengaruhi laba atau rugi entitas yang diinvestasikan, yang pada gilirannya mempengaruhi bagian investor dalam laba atau rugi tersebut. Risiko Likuiditas: Risiko likuiditas mungkin kurang berdampak langsung, tetapi dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang.

2. Metode Cost (Cost Method):

Risiko Pasar: Tidak ada penyesuaian nilai wajar, sehingga risiko pasar tidak tercermin langsung dalam laporan keuangan, kecuali terjadi penurunan nilai yang signifikan. Risiko Kredit: Penurunan nilai (impairment) diakui jika ada bukti bahwa investasi tidak dapat dipulihkan.

3. Metode Nilai Wajar (Fair Value Method):

Risiko Pasar: Penyesuaian nilai wajar dilakukan setiap periode, sehingga fluktuasi pasar langsung tercermin dalam laporan keuangan. Risiko Kredit: Pengukuran nilai wajar mencakup pertimbangan risiko kredit yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Risiko Likuiditas: Investasi yang tidak likuid mungkin dinilai dengan diskon, mencerminkan ketidakmampuan untuk menjual aset pada harga pasar.

Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan

1. Kuantitatif dan Kualitatif:

Pengungkapan risiko harus mencakup informasi kuantitatif dan kualitatif tentang jenis risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

2. Sensitivitas:

Analisis sensitivitas harus disediakan untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam asumsi pasar utama dapat mempengaruhi nilai wajar investasi.

3. Kebijakan Manajemen Risiko:

Laporan keuangan harus mencakup kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko investasi.

Contoh Pengaruh Risiko terhadap Laporan Keuangan.

Contoh Pengaruh Risiko Pasar:

Jika perusahaan memiliki investasi dalam saham yang nilainya menurun drastis, penurunan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi jika menggunakan metode nilai wajar, atau sebagai penurunan nilai (impairment) jika menggunakan metode cost.

Contoh Pengaruh Risiko Kredit:

Jika ada indikasi bahwa perusahaan penerbit obligasi mungkin gagal membayar bunga atau pokok, perusahaan harus menilai ulang nilai investasi dan mungkin mengakui kerugian penurunan nilai.

Contoh Pengaruh Risiko Likuiditas:

Jika investasi tidak likuid dan perlu dijual dengan diskon, perusahaan harus mencatat kerugian tersebut dalam laporan keuangan, mencerminkan nilai realisasi yang lebih rendah.

Analisis risiko adalah komponen penting dalam akuntansi investasi, karena setiap jenis risiko dapat mempengaruhi nilai, pengakuan, dan pelaporan investasi dalam laporan keuangan. Metode akuntansi yang dipilih—baik itu Metode Ekuitas, Metode Cost, atau Metode Nilai Wajar—harus mampu mencerminkan dampak dari risiko-risiko ini secara akurat. Pengungkapan risiko yang transparan dan analisis sensitivitas yang memadai dalam laporan keuangan membantu pemangku kepentingan memahami dampak potensial dari risiko terhadap posisi keuangan perusahaan.

BAB VII

Akuntansi Leasing

Oleh: Dr. Irawati, SE, M. Ak, Ak, CA

A. Pengertian Leasing

dua pihak yaitu, peminjam dan yang meminjam, yang biasanya sering disebut pemilik dan penyewa, dimana pembayarannya dapat berupa angsuran atau cicilan maupun langsung lunas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1c " Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lense) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lense) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran".

Lease adalah suatu kesepakatan kontrak antara lessor dan lesse.perjanjian ini memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor, untuk jangka waktu tertentu. Dalam retun untuk penggunaan property, penyewa membuat pembayaran sewa selama jangka waktu sewa kepada lessor" (Kieso, 2005 : 1089). "Sebuah kontrak yang merinci persyaratan-persyaratan dimana pemilik property, yaitu lessor mentransfer hak pengguna properti kepada lessee". (Stice, Skousen, 2009 : 289).

Leasing adalah kegiatan sederhana yang dipraktikkan Bangsa Sumeria pada 2.000 SM. Hal

ini dibuktikan dengan temuan dokumen terbuat dari tanah yang berisi leasing berbagai macam kebutuhan seperti air dan hewan ternak.

Selanjutnya praktik leasing digunakan bangsa Babilonia, Mesir, Yunani Kuno, dan Arab. Pada zaman modern, leasing lahir di Amerika Serikat pada tahun 1850. Tom M Clark tercatat sebagai orang pertama yang menggunakan leasing untuk menyewa kereta api.

Di Indonesia, leasing berkembang pada 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama MenKeu (Menteri Keuangan), Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Keputusan perizinan usaha leasing tersebut melahirkan banyak usaha serupa di Indonesia.

Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

- a. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang
- b. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian
- c. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewagunausahakan.

Standard dan peraturan yang berkaitan dengan sewa guna usaha PSAK 73 Tentang Sewa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 September 2017.

PSAK 73: Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73: Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang

merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

PSAK 73: Sewa akan menggantikan:

- a. PSAK 30: Sewa;
- b. ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa;
- c. ISAK 23: Sewa Operasi “Insentif”;
- d. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- e. ISAK 25: Hak atas Tanah.

B. Jenis-jenis Leasing

1. Finance/Capital lease (sewa guna usaha modal)

Pencatatan seolah-olah perjanjian sewa guna usaha pengalihan kepemilikan asset dari lessor ke lessee. Adanya pengakuan penjualan asset dan pendapatan bunga dari transaksi sewa guna usaha tersebut.

2. Operating lease (sewa guna usaha operasi)

Pencatatan sebagai perjanjian sewa, tanpa pemindahan kepemilikan yang berkaitan dengan sewa guna usaha tersebut. Pemilik tidak mengakui adanya penjualan asset tetapi mengakui adanya pendapatan sewa yang berkaitan dengan sewa guna usaha tersebut.

C. Pengaruh Leasing terhadap Laporan Keuangan

Leasing (sewa guna usaha) memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan

perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaruh leasing terhadap laporan keuangan:

1. Neraca (Balance Sheet)
 - a. Aset: Dalam sewa guna usaha modal (capital lease atau finance lease), aset sewa akan diakui sebagai aset tetap di neraca. Ini meningkatkan total aset perusahaan.
 - b. Liabilitas: Lease liability (kewajiban sewa) akan dicatat sebagai kewajiban jangka panjang, meningkatkan total liabilitas perusahaan.
 - c. Ekuitas: Perubahan dalam aset dan liabilitas dapat mempengaruhi ekuitas pemegang saham, meskipun tidak secara langsung.
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)
 - a. Beban Penyusutan: Aset yang disewakan di bawah sewa guna usaha modal akan disusutkan setiap periode, menambah beban penyusutan di laporan laba rugi.
 - b. Beban Bunga: Selain itu, beban bunga dari kewajiban sewa akan diakui setiap periode, menambah beban bunga di laporan laba rugi.
 - c. Beban Sewa Operasional: Untuk sewa guna usaha operasional (operating lease), pembayaran sewa akan diakui sebagai beban sewa di laporan laba rugi.
3. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
 - a. Arus Kas Operasi: Pembayaran sewa guna usaha operasional akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas operasi.
 - b. Arus Kas Pendanaan: Untuk sewa guna usaha modal, pembayaran pokok sewa akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, sedangkan pembayaran bunga

akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas operasi.

4. Rasio Keuangan

a. Rasio Leverage: Dengan meningkatnya liabilitas akibat kewajiban sewa, rasio leverage seperti Debt-to-Equity Ratio dan Debt-to-Asset Ratio akan meningkat.

b. Rasio Likuiditas: Pembayaran sewa yang besar dapat mempengaruhi rasio likuiditas seperti Current Ratio dan Quick Ratio, terutama jika banyak arus kas keluar dari aktivitas operasi.

c. Rasio Profitabilitas: Beban bunga dan penyusutan yang meningkat dapat mempengaruhi rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).

5. Pengungkapan (Disclosure)

Catatan atas Laporan Keuangan: Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan informasi tentang jenis, jumlah, dan jangka waktu sewa, baik untuk sewa guna usaha operasional maupun sewa guna usaha modal, dalam catatan atas laporan keuangan.

Contoh Perubahan Standar Akuntansi Leasing

Penerapan standar akuntansi baru seperti IFRS 16 (untuk perusahaan yang menggunakan IFRS) dan ASC 842 (untuk perusahaan yang menggunakan GAAP di AS) membawa perubahan signifikan pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian sewa di laporan keuangan. Di bawah IFRS 16, hampir semua sewa diakui di neraca, kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah, yang berdampak besar pada neraca dan rasio keuangan perusahaan.

D. Analisis Keputusan Leasing

Sebagaimana dijelaskan pada awal bab ini, akuntansi lease adalah bidang yang banyak digunakan untuk menghindari statement No. 13. Dalam praktik, aturan akuntansi untuk mengkapitalisasi lease sebagian telah dibuat tidak efektif oleh keinginan yang kuat dari lessee untuk menolak kapitalisasi. Leasing umumnya melibatkan jumlah dolar yang besar, yang apabila dikapitalisasi akan meningkatkan secara material kewajiban yang dilaporkan dan karenanya mempengaruhi secara negatif rasio hutang terhadap ekuitas.

Untuk menghindari kapitalisasi aktiva yang dilease, perjanjian lease dirancang, ditulis, dan diinterpretasikan sehingga tidak satupun dari empat kriteria kapitalisasi lease yang terpenuhi dari sudut pandang lessee. Pengaturan perjanjian lease seperti itu tidak terlalu sulit jika spesifikasi berikut terpenuhi:

- Pastikan bahwa lease tidak mencakup pengalihan hak kepemilikan properti kepada lessee.
- Jangan memasukkan opsi pembelian dengan harga khusus (bargain purchase option).
- Tetapkan masa lease lebih kecil 75% dari estimasi umur ekonomis properti yang dilease.
- Atur agar nilai sekarang dari pembayaran lease minimum lebih kecil 90% dari nilai wajar properti yang dilease.

Menghindari tiga kriteria pertama relatif mudah, tetapi membutuhkan sedikit kecerdikan untuk menghindari pengujian pemulihan 90% bagi lessee sekaligus memenuhi keinginan lessor. Dua faktor yang melibatkan usaha ini adalah (1) penggunaan suku bunga pinjaman inkremental oleh

lessee apabila lebih tinggi dari suku bunga implisit lessor, dengan menghilangkan informasi tentang suku bunga implisit bagi lessee; dan (2) penjamin nilai residu.

Penggunaan suku bunga yang lebih tinggi oleh lessee mungkin merupakan alasan yang lebih populer. Walaupun lessee mengetahui nilai wajar properti yang dilease dan tentu saja pembayaran sewa, namun mereka umumnya tidak mengetahui estimasi nilai residu yang digunakan oleh lessor.

Penjamin nilai residu adalah cara lain yang unik tetapi umum digunakan oleh lessee dan lessor. Pada kenyataannya, telah muncul industri baru untuk menghindari simerti antara lessee dan lessor dalam hal akuntansi untuk lease. Penjaminan nilai residu telah mengakibatkan berkembangnya banyak perusahaan yang inti fungsinya, atau bahkan satu-satunya fungsi, adalah untuk menjamin nilai residu aktiva dilease.

Karena nilai residu yang dijamin dimasukkan dalam pembayaran lease minimum untuk lessor, maka pemulihan 90% dari pengujian nilai pasar wajar dipenuhi. Lease ini bukan merupakan lease operasi bagi lessor. Namun, karena nilai residu dijamin oleh pihak ketiga, maka pembayaran lease minimum oleh lessee tidak mencakup penjaminan itu.

BAB VIII

Akuntansi Konsolidasi

Oleh: Hanifah, S.E., M.M.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan terintegrasi, perusahaan seringkali tidak berdiri sendiri. Banyak entitas bisnis memiliki struktur kepemilikan yang terdiri dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menyajikan laporan keuangan yang memberikan gambaran komprehensif tentang keseluruhan grup perusahaan.

A. Pengertian Konsolidasi

Akuntansi konsolidasi adalah proses penggabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu set laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi grup sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Proses ini mencakup penggabungan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dari semua entitas yang berada dalam kendali perusahaan induk.

Akuntansi konsolidasi adalah proses penggabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan untuk menghasilkan satu set laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi grup perusahaan sebagai satu entitas ekonomi tunggal.

Akuntansi konsolidasi adalah proses penggabungan laporan keuangan dari perusahaan

induk dan anak perusahaan menjadi satu set laporan keuangan tunggal. Tujuannya adalah untuk menyajikan kondisi keuangan dan hasil operasi dari suatu grup perusahaan seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal.

B. Metode Konsolidasi: Metode Persentase Kepentingan, Metode Akuisisi

1. Metode Persentase Kepentingan (Proportional Consolidation Method)

Metode Persentase Kepentingan (Proportional Consolidation Method) adalah salah satu metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi dalam entitas yang dimiliki secara bersama-sama, terutama dalam bentuk usaha patungan (joint ventures). Dalam metode ini, investor mengakui bagian proporsional dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dari usaha patungan ke dalam laporan keuangannya berdasarkan persentase kepemilikannya.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait Metode Persentase Kepentingan:

a) Pengakuan Proporsional:

Investor mengakui bagian proporsional dari semua elemen laporan keuangan usaha patungan. Jika investor memiliki 50% dari usaha patungan, maka investor akan mengakui 50% dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban usaha patungan tersebut.

b) Penggabungan dalam Laporan Keuangan:

Elemen-elemen dari usaha patungan digabungkan secara baris per baris dengan elemen-elemen laporan keuangan investor. Hal ini berbeda dengan metode ekuitas, di

mana investasi dalam usaha patungan diakui sebagai satu baris dalam laporan posisi keuangan dan bagian laba/rugi dari usaha patungan diakui dalam laporan laba rugi.

c) **Transparansi:**

Metode ini memberikan transparansi yang lebih besar terhadap komponen-komponen aset dan kewajiban yang dimiliki melalui usaha patungan, karena semua elemen tersebut diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan.

d) **Penyederhanaan Pengungkapan:**

Walaupun memberikan transparansi yang lebih besar, metode ini dapat menambah kompleksitas laporan keuangan karena perlu menyertakan rincian proporsional dari usaha patungan.

e) **Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi:**

Penggunaan metode ini harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) atau GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). IFRS 11, misalnya, tidak lagi mengizinkan penggunaan metode persentase kepentingan untuk entitas bersama.

Contoh Penerapan Metode Persentase Kepentingan:

Misalkan, Perusahaan A memiliki 40% kepemilikan dalam usaha patungan XYZ. Laporan keuangan usaha patungan XYZ menunjukkan total aset sebesar \$1.000.000, total kewajiban sebesar \$600.000, pendapatan sebesar \$800.000, dan beban sebesar \$500.000. Maka, dalam laporan

keuangan Perusahaan A, bagian proporsional yang akan diakui adalah:

- Aset: $\$1.000.000 \times 40\% = \400.000
- Kewajiban: $\$600.000 \times 40\% = \240.000
- Pendapatan: $\$800.000 \times 40\% = \320.000
- Beban: $\$500.000 \times 40\% = \200.000

Bagian-bagian ini akan dimasukkan dalam laporan keuangan Perusahaan A pada masing-masing pos yang relevan. Metode Persentase Kepentingan umumnya digunakan ketika kontrol bersama ada dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengatur pengelolaan dan operasional usaha patungan. Meskipun demikian, penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada standar akuntansi yang diterapkan dan regulasi setempat.

Proses Konsolidasi Metode Persentase Kepentingan:

- I. Identifikasi Proporsi Kepemilikan: Tentukan persentase kepemilikan induk perusahaan dalam anak perusahaan.
- II. Penggabungan Laporan Keuangan: Gabungkan bagian dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.
- III. Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan: Hapus transaksi antar perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.

Contoh: Jika PT Induk memiliki 40% saham dalam PT Anak, maka dalam laporan keuangan konsolidasi, PT Induk hanya akan menggabungkan 40% dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban PT Anak.

Kelebihan metode ini Menyajikan informasi yang lebih relevan tentang bagian kepemilikan dan

tanggung jawab perusahaan induk. Mempermudah analisis pengaruh ekonomi dari investasi bersama. Kekurangan metode ini Dapat membingungkan jika perusahaan induk memiliki banyak anak perusahaan dengan persentase kepemilikan yang berbeda-beda. Tidak memberikan gambaran penuh dari kinerja anak perusahaan.

Metode Akuisisi (Acquisition Method)

Metode Akuisisi (Acquisition Method) adalah metode yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat kombinasi bisnis. Metode ini mengharuskan perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mengakui aset yang diperoleh, kewajiban yang diambil alih, serta kepentingan non-pengendali (jika ada) pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Berikut adalah poin-poin penting tentang Metode Akuisisi:

a) Identifikasi Pihak Pengakuisisi:

Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh kendali atas pihak yang diakuisisi.

b) Penentuan Tanggal Akuisisi:

Tanggal akuisisi adalah tanggal ketika pengakuisisi mendapatkan kendali atas pihak yang diakuisisi. Semua pengukuran dalam metode akuisisi dilakukan pada tanggal ini.

c) Pengukuran Nilai Wajar:

Aset teridentifikasi, kewajiban teridentifikasi, dan kepentingan non-pengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

d) Goodwill:

Goodwill diakui jika total imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas pengakuisisi yang sebelumnya dimiliki (jika ada) melebihi nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Jika perbedaan ini negatif (harga akuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih), maka diakui sebagai keuntungan dari pembelian murah (bargain purchase) dalam laporan laba rugi.

e) Pengungkapan:

Pengakuisisi harus memberikan pengungkapan yang cukup dalam laporan keuangannya untuk memungkinkan pengguna memahami sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi.

Langkah-langkah dalam Metode Akuisisi

- i. Mengidentifikasi Pihak Pengakuisisi: Menentukan entitas yang memperoleh kendali atas entitas lain.
- ii. Menentukan Tanggal Akuisisi: Menetapkan tanggal pengakuisisi memperoleh kendali.
- iii. Mengukur Imbalan yang Dialihkan: Mengukur nilai wajar dari imbalan yang dialihkan oleh pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi.
- iv. Mengakui dan Mengukur Aset yang Diperoleh dan Kewajiban yang Diambil Alih: Mengakui aset teridentifikasi dan kewajiban teridentifikasi pihak yang diakuisisi pada nilai wajarnya.
- v. Mengakui Goodwill atau Keuntungan dari Pembelian Murah: Menghitung dan mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian murah berdasarkan selisih antara imbalan

yang dialihkan dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi.

Contoh Penerapan Metode Akuisisi

Misalkan, Perusahaan A mengakuisisi Perusahaan B. Imbalan yang dialihkan adalah \$10 juta. Aset teridentifikasi Perusahaan B memiliki nilai wajar sebesar \$12 juta dan kewajiban teridentifikasi sebesar \$5 juta. Maka perhitungan goodwill adalah sebagai berikut:

- Imbalan yang Dialihkan: \$10 juta
- Nilai Wajar Aset Teridentifikasi: \$12 juta
- Nilai Wajar Kewajiban Teridentifikasi: \$5 juta
- Nilai Wajar Aset Bersih: \$12 juta - \$5 juta = \$7 juta
- Goodwill: \$10 juta - \$7 juta = \$3 juta

Dalam kasus ini, Perusahaan A akan mencatat goodwill sebesar \$3 juta pada laporan keuangannya. Metode Akuisisi memastikan bahwa laporan keuangan pengakuisisi mencerminkan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan setelah kombinasi bisnis.

Proses Konsolidasi Metode Akuisisi:

- I. Pengakuan Aset dan Kewajiban: Aset dan kewajiban anak perusahaan diakui pada nilai wajar saat akuisisi.
- II. Goodwill: Jika harga akuisisi lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih anak perusahaan, selisih tersebut diakui sebagai goodwill.
- III. Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan: Menghilangkan semua transaksi antar perusahaan untuk mencegah penggandaan pendapatan dan beban.

IV. Penyesuaian Periode Akuisisi: Melakukan penyesuaian untuk pendapatan dan beban yang terjadi sebelum tanggal akuisisi.

Contoh: Jika PT Induk membeli 80% saham PT Anak dan nilai wajar aset bersih PT Anak adalah Rp100 miliar, sedangkan harga pembelian adalah Rp120 miliar, maka Rp20 miliar diakui sebagai goodwill.

Kelebihan Metode Akuisisi; Menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan pengendalian penuh atas anak perusahaan. Memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai ekonomi yang diperoleh dari akuisisi.

Kekurangan Metode Akuisisi: Proses penilaian nilai wajar dapat rumit dan subyektif. Goodwill perlu diuji penurunan nilainya secara berkala, yang dapat mempengaruhi laba perusahaan.

9.1. Tabel Perbandingan Metode Konsolidasi

Aspek	Metode Persentase Kepentingan	Metode Akuisisi
Kepemilikan	Kepemilikan bersama (joint control)	Pengendalian penuh melalui pembelian saham
Pengakuan Aset/Kewajiban	Sesuai persentase kepemilikan	Nilai wajar pada tanggal akuisisi
Goodwill	Tidak diakui	Diakui jika harga beli > nilai wajar aset bersih
Eliminasi Transaksi	Proporsional sesuai kepemilikan	Semua transaksi antar perusahaan dieliminasi
Kompleksitas	Lebih sederhana	Lebih kompleks karena penilaian nilai wajar

Metode yang digunakan dalam konsolidasi bergantung pada tingkat kendali yang dimiliki oleh perusahaan induk dan jenis hubungan kepemilikan yang ada antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Pemilihan metode yang tepat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan hasil operasi grup perusahaan.

C. Pengaruh Konsolidasi terhadap Laporan Keuangan

Konsolidasi dalam laporan keuangan adalah proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Tujuannya adalah untuk menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan grup perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Pengaruh konsolidasi terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari berbagai aspek, berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- a) Penggabungan Aset dan Kewajiban: Semua aset dan kewajiban anak perusahaan digabungkan dengan aset dan kewajiban perusahaan induk. Ini berarti total aset dan kewajiban grup akan meningkat sesuai dengan penambahan dari anak perusahaan.
- b) Eliminasi Saldo Antar Perusahaan: Transaksi dan saldo antar perusahaan dalam grup yang saling berhubungan dieliminasi untuk mencegah penggandaan. Misalnya, piutang usaha dari perusahaan induk kepada anak perusahaan dan sebaliknya akan dieliminasi.
- c) Kepentingan Non-Pengendali: Bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk diakui sebagai kepentingan non-pengendali di bagian ekuitas laporan keuangan konsolidasi.

2. Laporan Laba Rugi

- a. Penggabungan Pendapatan dan Beban: Pendapatan dan beban anak perusahaan digabungkan dengan pendapatan dan beban perusahaan induk. Ini berarti total pendapatan

dan beban grup akan mencerminkan kinerja seluruh entitas ekonomi.

- b. Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan: Pendapatan dan beban yang terjadi antara perusahaan dalam grup dieliminasi. Misalnya, penjualan dari induk ke anak perusahaan dan beban terkait akan dieliminasi.
- c. Bagian Laba/Rugi Kepentingan Non-Pengendali: Bagian laba atau rugi yang terkait dengan kepentingan non-pengendali diakui terpisah dari laba bersih induk.

3. Laporan Arus Kas

- a) Penggabungan Arus Kas: Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari anak perusahaan digabungkan dengan arus kas perusahaan induk.
- b) Eliminasi Arus Kas Antar Perusahaan: Arus kas yang terjadi antara perusahaan dalam grup, seperti pinjaman antar perusahaan atau dividen antar perusahaan, dieliminasi.

4. Goodwill dan Aset Tak Berwujud

- a. Pengakuan Goodwill: Jika perusahaan induk mengakuisisi anak perusahaan dengan harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya, selisihnya diakui sebagai goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.
- b. Penilaian Aset Tak Berwujud: Aset tak berwujud yang diidentifikasi selama akuisisi dicatat pada nilai wajarnya.

5. Penyesuaian dan Eliminasi Konsolidasi

- a) Eliminasi Investasi Induk pada Anak: Investasi perusahaan induk dalam ekuitas anak perusahaan dieliminasi terhadap bagian ekuitas anak perusahaan yang terkait.

- b) Penyesuaian Laba Ditahan: Laba ditahan anak perusahaan pada tanggal akuisisi dieliminasi terhadap laba ditahan perusahaan induk.

Contoh Penerapan Konsolidasi

Misalkan, Perusahaan Induk A memiliki 80% saham di Perusahaan Anak B. Berikut adalah ilustrasi sederhana bagaimana konsolidasi mempengaruhi laporan keuangan:

Sebelum Konsolidasi

Perusahaan Induk A:

- Aset: \$1.000.000
- Kewajiban: \$400.000
- Ekuitas: \$600.000
- Pendapatan: \$500.000
- Beban: \$300.000
- Laba Bersih: \$200.000

Perusahaan Anak B:

- Aset: \$500.000
- Kewajiban: \$200.000
- Ekuitas: \$300.000
- Pendapatan: \$300.000
- Beban: \$150.000
- Laba Bersih: \$150.000

Setelah Konsolidasi

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi:

- Aset: \$1.500.000 (Aset Induk + Aset Anak)
- Kewajiban: \$600.000 (Kewajiban Induk + Kewajiban Anak)
- Ekuitas: \$900.000 (Ekuitas Induk, termasuk kepentingan non-pengendali sebesar \$60.000 atau 20% dari \$300.000 ekuitas anak)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi:

- Pendapatan: \$800.000 (Pendapatan Induk + Pendapatan Anak)

- Beban: \$450.000 (Beban Induk + Beban Anak)
- Laba Bersih: \$350.000
- Kepentingan Non-Pengendali: \$30.000 (20% dari Laba Bersih Anak)

Dengan cara ini, laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran yang lebih lengkap dan transparan mengenai posisi keuangan dan hasil operasi seluruh grup perusahaan.

D. Analisis Kinerja Perusahaan Konsolidasi

Analisis kinerja perusahaan konsolidasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan analisis dan informasi yang ingin diperoleh. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat Anda ikuti dalam melakukan analisis kinerja perusahaan konsolidasi:

1. Analisis Laporan Keuangan Konsolidasi:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca):

Tinjau total aset, kewajiban, dan ekuitas untuk memahami struktur keuangan perusahaan konsolidasi. Bandingkan perubahan dalam aset dan kewajiban dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren dan pola.

b. Laporan Laba Rugi:

Tinjau pendapatan dan beban operasional untuk memahami kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih dari periode ke periode.

c. Laporan Arus Kas:

Analisis arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Tinjau penggunaan dan sumber dana untuk memperoleh wawasan tentang kegiatan investasi dan pendanaan perusahaan.

2. Analisis Rasio Keuangan:

- a) Rasio Likuiditas: Hitung rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- b) Rasio Profitabilitas: Hitung rasio profitabilitas seperti ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan aset dan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba.
- c) Rasio Solvabilitas: Tinjau rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- d) Rasio Aktivitas: Hitung rasio aktivitas seperti rasio perputaran piutang dan rasio perputaran persediaan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset perusahaan.

3. Analisis Trend dan Perbandingan:

- a. Tinjau tren kinerja perusahaan konsolidasi dari beberapa periode untuk mengidentifikasi pertumbuhan atau penurunan yang signifikan dalam berbagai metrik keuangan.
- b. Bandingkan kinerja perusahaan konsolidasi dengan pesaing atau industri untuk menilai posisi relatif perusahaan dalam pasar.

4. Analisis Tambahan:

- a) Tinjau kinerja unit bisnis atau segmen operasional yang berbeda dalam perusahaan konsolidasi untuk mengidentifikasi kontribusi relatif mereka terhadap keseluruhan kinerja.
- b) Lakukan analisis sensitivitas untuk memahami dampak potensial dari perubahan dalam kondisi pasar atau faktor eksternal lainnya terhadap kinerja perusahaan.

Dengan melakukan analisis kinerja perusahaan konsolidasi secara komprehensif, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Selain itu, analisis ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan bisnis.

Oleh: Wajib Ginting

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Berkaitan dengan aspek perpajakan di berbagai transaksi pajak di Indonesia yang semakin kompleks. Selain membahas berbagai aspek peraturan perpajakan dan sistem perpajakan maka keahlian dan proses membayar beban pajak sebesar berapa yang menjadi kewajiban sesuai peraturan dan terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya tidak perlu karena kesalahan administrasi ataupun ketidak pahaman terkait undang-undang dan aturan perpajakan.

Seringnya dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perpajakan yang terbaru, dengan harapan dapat menjadi sumber pembelajaran dan informasi terkini, khususnya bagi pelaku bisnis, praktisi perpajakan, dan para karyawan perusahaan yang menangani perpajakan,

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah;

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase. Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E) dan secara umum sesuai ketentuan perubahan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku umum.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang

dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa Badan Usaha itu seperti bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sejak Januari 2022 maka mulai berlaku ketentuan tentang pajak Penghasilan yang terbaru. Terdapat satu lagi lapis penghasilan orang pribadi atau bracket yang dikenakan tarif pajak penghasilan atau PPh. Tambahan 1 layer PPh orang pribadi itu adalah tarif PPh sebesar 35 persen bagai penghasilan kena pajak senilai di atas 5 miliar Rupiah, sehingga orang-orang kaya wajib membayar pajaknya secara lebih mahal. Sedangkan di sisi lain, maka pemerintah meningkatkan batas tarif pajak penghasilan terendah sebesar 5 persen menjadi 60 juta Rupiah dari sebelumnya yang sebesar 50 juta Rupiah. Berikut ini rincian lengkapnya:

- WP berpenghasilan kena pajak hingga 60 juta Rupiah wajib membayar tarif pajak 5 persen
- WP berpenghasilan di atas 60 juta Rupiah hingga 250 juta Rupiah dikenakan tarif pajak 15 persen
- WP berpenghasilan kena pajak 250 juta Rupiah hingga 500 juta Rupiah dikenakan tarif pajak 25 persen
- WP berpenghasilan kena pajak 500 juta Rupiah hingga 5 miliar Rupiah dikenakan tarif pajak 30 persen
- WP berpenghasilan di atas 5 miliar Rupiah dikenakan tarif pajak 35 persen

Lalu tarif PPh Badan Usaha juga naik menjadi sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dalam melaporkan pajak maka hitung dulu total seluruh penghasilan kotor lalu kurangi dengan biaya untuk mendapatkan, dan menagih, juga memelihara penghasilan, termasuk biaya pensiun, dan hutang, serta kredit bank, hingga diketahui total pendapatan bersihnya. Kemudian kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Pengusaha Orang Pribadi, hingga diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) nya.

B. Pengaruh Pajak Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban, sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai. Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah dan pengguna lainnya. Secara lebih rinci bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aset, kewajiban, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada orang lain yang membutuhkan agar bisa menilai kondisi perusahaan dan bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis perusahaan.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Sukrisno dan Trisnawati, 2014)

Tujuan penyusunan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode tertentu, yaitu laba rugi, komposisi, dan rincian penghasilan (pendapatan dan keuntungan) dan beban serta pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, pengembalian investasi (return on investment), laba per saham (earnings per share), serta ramalan tentang kemampuan arus kas entitas tersebut.

Investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai harga saham, kemudian melakukan keputusan untuk membeli atau menjual investasi di sebuah entitas. Kreditur menggunakan informasi untuk menentukan kelayakan sebuah entitas untuk diberikan kredit, sehingga sangat memperhatikan kemampuan entitas untuk membayar utang dan bunga di masa mendatang. Pihak pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan berapa jumlah pajak yang dibayar entitas. (Martani, et al., 2015).

Kinerja keuangan mengacu pada tindakan untuk melakukan aktivitas keuangan yang sedang atau telah mencapai tujuan. Berdasarkan definisi terkait kinerja keuangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan data keuangan selama periode tertentu yang mengacu pada sejauh mana pencapaian tujuan keuangan (Erdur, 2014).

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan dalam Casanova dan Nindito (2014) adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, dan mengetahui tingkat rentabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.

Pengukuran kinerja terkait dengan pengukuran pelaksanaan operasional perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada diperusahaan (Damanik dkk, 2016).

Pajak dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh undang undang pajak dimana suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan

seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan

Manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (tax management) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai

Berdasarkan PSAK No. 46 pengertian pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dikompensasi pada periode mendatang. Bila dampak pajak di masa mendatang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Peraturan perpajakan memberikan batasan lebih ketat dalam penghitungan pajaknya hanya mengakui besarnya penghasilan atau biaya pada saat di terima atau dikeluarkan sebagai dasar dalam penghitungan laba rugi fiskalnya. Dengan kata lain perpajakan hanya mengakui beban pajak pada periode tersebut dan tidak mengakui adanya beban pajak tangguhan (Timuriana dan Muhamad, 2015).

Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan, cenderung penekanannya kepada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila terjadi perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung tersebut (Sari, 2014). Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial (laba komersial) yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan/atau menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Dalam perhitungan pajak diawali dari laporan keuangan sesuai PSAK selanjutnya dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal dengan proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial (laba komersial) yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan/atau menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Tujuan agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan dalam SPT tahunan PPh terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contoh PT. Untung Terus Omzet tahun 2028 adalah 360 M dan ada Penghasilan Netto LN 100 M, HPP dan Beban Akuntansi 200 M Namun sesue Fiskal ada Undeductible 80 M ada juga Penghasilan lain Bunga dari Bank 20 M, Sewa Mesin 50 M Dan Deviden 30 M (Kepemilikan Saham 50%) Data Kredit Pajak yang telah dipotong pihak lain dan yang disetor sendiri: PPh psl 22 3.000.000.000 PPh psl 23 1.200.000.000 PPh psl 24 yang dipotong di Hongkong dari Penghasilan Netto LN

$25\% \times 100.000.000.000 = 20.000.000.000$ dan PPh psl 25 adalah 36.000.000.000, Asumsi Tarif PPh tahun 2028=20%

Perhitungan Koreksi Fiskal Dalam Ribuan Rp

Keterangan		
Peredaran Usaha (Penjualan):		360.000.000
HPP dan Biaya Usaha		200.000.000
Laba Operasi Bruto		160.000.000
Penghasilan bunga, jasa giro (final)		20.000.000
Penghasilan Sewa Mesin		60.000.000
Penghasilan Dividen-Saham 50%		30.000.000
PN LN Hongkong		100.000.000
P.N (Laba Akuntansi)		370.000.000
Koreksi Positif:		
HPP dan Beban	80.000.000	80.000.000
Koreksi Negatif		
Jasa Giro	20.000.000	
Devidend	30.000.000	(50.000.000)
Laba Fiskal		400.000.000

$\text{PPh Terutang} = 20\% \times 400.000.000 = 80.000.000$

Dari Penghasilan LN (Hongkong) =100.000.000 Dipotong

Pajak di Hongkong 25

$= 25\% \times 100.000.000 = 25.000.000$

Perhitungan PPh Psl 24 Di Potong di

Hongkong =25.000.000 Maximal PPh 24

$= (\text{PN LN} : \text{PN DN \& LN}) \times \text{PPh Terutang}$

$= (100.000.000 : 400.000.000) \times 80.000.000$

$= 20.000.000$

Kredit PPh 24 yang dapat di Kreditkan dipilih yang

Terkecil =20.000.000

Perhitungan PPh (Dalam Ribuan Rp)

$\text{PPh Terutang} = 20\% \times 400.000.000 = 80.000.000$

Misalnya Kredit Pajak dan Angsuran Pajak
yg disetor sendiri:

PPh psl 22	3.000.000
PPh psl 23	1.200.000
PPh psl 24.....	20.000.000
PPh psl 25	36.000.000
Total Kredit Pajak.....	<u>60.200.000-</u>
PPh KB atau LB (KB PPh Psl 29).....	19.800.000

Jurnal yang dilakukan

PPh Terutang.....	80.000.000
PPh psl 22	3.000.000
PPh psl 23	1.200.000
PPh psl 24.....	20.000.000
PPh psl 25	36.000.000
PPh Psl 29.....	19.800.000

C. Strategi Perencanaan Pajak

Untuk dapat menerapkan perencanaan pajak, bisa menggunakan beberapa teknik dasar di bawah ini. Pada umumnya, ada lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak:

1. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

2. Tax Saving

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan

pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

4. Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku dan mengikuti perkembangan aturan yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

Perencanaan pajak perusahaan juga perlu memperhatikan kerangka waktunya, yang meliputi:

1. Routine Budget Process Time frame, meliputi transaksi bersifat rutin baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Build-in Under Corporate Planning Corporate Tax Management, yakni ketika perusahaan memiliki strategi bisnis, maka perlu dipikirkan pula strategi *tax planning*. Sebagai contoh pembukaan gerai baru yang memerlukan sentralisasi PPN *fund* untuk mempermudah perhitungan PPN yang dipungut.
3. Incidental, yakni saat terjadi transaksi khusus pada waktu tertentu misalnya saja ketika pengambilalihan usaha maupun ketika perusahaan IPO tentu perlakukan pajaknya juga berbeda.

Sebagai contoh, PT. ABAH lebih banyak melakukan penjualan ekspor dari pada penjualan dalam negeri. Di mana bahan baku untuk produksi menggunakan bahan baku dari luar negeri, sehingga akan dikenakan tarif PPN 11%. Sementara, penjualan ekspor memiliki tarif PPN 0%. Hal ini dapat berimbas pada PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran.

Dalam hal ini, penerapan perencanaan pajak yang bisa dilakukan ialah dengan mengelola faktur pajak masukan, *voucher* pembayaran, hingga *bank account*. Tindakan ini untuk mengelola restitusi pajak yang berjalan. Pencatatan akuntansi dan rekonsiliasi bank pun harus tertata dengan baik.

D. Proses Pelaporan Pajak

Agar proses lapor SPT Badan dapat berjalan lancar, siapkan dokumen lapor SPT Tahunan Badan dengan baik. Laporan pajak tahunan perusahaan berisikan bukti Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut dari laba usaha badan yang harus tercantum dalam proses penyampaian SPT Tahunan Badan

SPT Pajak Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran setoran tahunan pajak oleh Badan Usaha. Bukti dari SPT ini wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak yang penyampaianya dapat dilakukan secara *online*. Kewajiban pelaporan SPT Badan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir SPT PPh WP orang Pribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Pertama Kita harus menyiapkan Dokumen Sesuai Syarat Lapor SPT Badan Perlu diketahui, laporan pajak tahunan badan relatif lebih kompleks dibanding pajak pribadi. Oleh karena itu, siapkan semua hal yang dibutuhkan agar proses lapor SPT Badan ini dapat berjalan lancar dengan perhitungan pajak yang benar. Persiapan berkas lapor SPT Tahunan perusahaan ini mulai dari syarat yang harus dipenuhi dan yang harus dilampirkan.

a. Syarat umum dan khusus lapor SPT Badan

Berikut syarat umum yang harus disiapkan untuk lapor SPT Badan *online*: adalah NPWP Badan dan Sertifikat Elektronik

b. Sedangkan syarat khusus lapor SPT Badan di antaranya:

1. Dokumen pendirian usaha
2. Dokumen izin usaha
3. SPT Masa
4. Laporan keuangan sudah diaudit
5. Formulir SPT PPh Badan 1771

6. Kemudian Anda harus menyiapkan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Berikut detail dokumen yang harus disiapkan untuk lapor SPT Tahunan Badan

- Arsip pemotongan SPT Masa PPh Pasal 21 (periode Januari s/d Desember).
- Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember.
- Arsip Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Bukti Pungutan atau Bukti Pembayaran Pasal 22 Import Masa Januari s/d Desember). Hal ini juga termasuk dalam pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 untuk kegiatan usaha.
- Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember.
- Arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember.
- Arsip Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa untuk periode Januari s/d Desember.
- SPT Masa PPN (termasuk semua Faktur Pajak yang masuk [Pajak Masukan] dan Faktur Pajak yang keluar [Pajak Keluaran] periode Januari s/d Desember)
- Laporan Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik.
- Akte pendirian dan/atau akte perubahannya.
- Lampiran SPT Tahunan PPh Badan setahun sebelumnya, misalnya Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, promosi dan lain-lain.

- Pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha.
- Pencocokan atas pembelian dan biaya usaha.
- Pencocokan untuk komponen neraca.
- Pencocokan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahunan Formulir 1771.

Dari semua dokumen tersebut disusun dalam sebuah Laporan Keuangan jadi satu untuk diisikan pada saat mengisi SPT tahunan badan.

c. Dokumen lainnya

Dokumen yang perlu disiapkan namun bersifat opsional atau sesuai aktivitas perpajakannya di antaranya:

1. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran.

Jika WP yang menggunakan perhitungan PPh badan sesuai PP No. 23 Tahun 2018, maka harus menyiapkan Bukti Pembayaran PPh Final Masa periode Januari s/d Desember.

2. Laporan *Debt to Equity Ratio* & Utang Swasta Luar Negeri

Laporan perhitungan antara utang dan modal (*DER/Debt to Equity*) dan utang swasta luar negeri ini khusus Wajib Pajak PT (Perseroan Terbatas) yang membebankan utang.

3. Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal

Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal (*ikhtisar master file/IMF*] dan *local file/LF*) ini diperlukan khusus bagi Wajib Pajak dengan Transaksi Hubungan Istimewa.

4. Laporan Penyampaian CbCR

Laporan Per Negara atau *Country by Country Report* (CbC Report) adalah salah satu dokumen *transfer pricing* yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional.

5. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* dan sejenisnya

Dokumen berupa daftar nominatif biaya *entertainment* ini diperlukan hanya jika ada.

6. Daftar Nominatif Biaya Promosi

Daftar nominatif biaya promosi ini juga diperlukan untuk dilampirkan jika ada.

Dari semua dokumen tersebut disusun dalam sebuah Laporan Keuangan jadi satu untuk diisikan pada saat pengisian SPT.

d. Mulai Melaporkan SPT

Setelah menyiapkan semua hal yang diperlukan dan berkas untuk lapor SPT Badan, Anda dapat mulai menyampaikan SPT dengan e Form Pastikan di Komputer telah terinstal IBM Viewer Kalau Belum Ada Instal dulu di dashboard tadi ada Petunjuk No 1 untuk Link instal IBM Viewer dan Petunjuk No 2 Untuk Tata cara Instal

ikuti langkah langkah sebagai berikut :

- Login ke DJP : <https://www.pajak.go.id>
- Klik Login di kanan atas
- Muncul DJP on Line Isi NPWP, Password dan Kode Keamanan
- Klik Login lalu Muncul Dashboard DJP
- Klik Lapor

Lihat Dashboard ada Profil, Bayar, lapor

Klik Lapor

Klik e-Form (Kalau tadi IBM Viewer Blm terinstal Harus di Instal dulu)

Muncul daftar SPT yang Pernah di Lapor

Buat SPT

Isi Tahun Pajak contoh 2024..... Jangan lupa sesuekan Status Normal

Kirim Permintaan maka otomatis muncul e-form

Nanti ada di histori Download

Buka SPT e-Form dan isi tekan tombol Buka Kembali baru ke Lampiran Berikut

Buka Daftar Penyusutan A1 dan isi

Dalam Pengisian + untuk nambah data dan - untuk menghapus data

Setiap mengisi klik Buka

Lamp VI, V, IV (Isi no 14), III, II, I

Buka Induk Klik X tidak di audit

isi tempat, tanggal, Nama dan NPWP Pimpinan

X Kotak Laporan Keuangan

X Kotak Transkrip elemen Lap Keu
X Rincian Penghasilan Bruto jumlah tertentu
Buka Lamp 8A Transkript NK isikan Neraca dan laba Rugi

Buka Induk lanjutan dengan klik tombol sebelumnya diatas untuk kemabli ke induk
Unggah Lampiran Laba Rugi, Neraca, Peredaran Bruto yang telah di Scan tadi
Submit di kiri atas dengan Memasukkan kode verifikasi yang diterima dari Email
Submit Berhasil OK
Lihat tanda Printer diatas untuk Print Dokumen Pdf
Memastikan Berhasil lihat Lapor SPT e-Filling
Cetak Bukti Penerimaan elektronik tanda kotak paling kanan di tampilan SPT e-Filling tadi atau cek di email.

Ketika proses pelaporan selesai, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

1. Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Tanggal pembuatan BPE
4. Jam pembuatan BPE
5. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Apabila hasil laporan pajak tahunan perusahaan mengalami kurang bayar, segera lakukan pembayaran terlebih dahulu. Untuk dapat membayar SPT Pajak kurang bayar, terlebih dahulu buat Kode Billing dan setorkan jumlah kurang bayar melalui *virtual account* bank persepsi pada aplikasi e-Billing

Masuk DJP online Pilih Ebilling Muncul SSE
Masukan Data NPWP dan nama Wajib Pajak
Isi Masa dan Tahun Pajak Yang akan dibayar
Isi Jenis dan Kode Pajak

Isi jumlah Pajak Yang dibayar
Masukan Kode Keamanan yang Muncul
Cetak Kode Ebilling
Bayar Ke Kantor Pos atau Bank
Bukti Pembayaran ada NTPN yang akan diisikan ke SPT.

Oleh: Agnes Eyne Banea, SE., MSA., C.PFM

A. Pengertian Akuntansi Lingkungan hidup

Pengertian dari akuntansi lingkungan (*environment accounting*) menurut Arfan Ikhsan dalam buku Akuntansi Manajemen Lingkungan (2008), adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stakeholders* perusahaan.

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industry dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan, supaya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek.

Fungsi dari *environment accounting* (EA) dibagi menjadi 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.

1. Fungsi internal

Fungsi ini berkaitan dengan pihak-pihak internal suatu perusahaan sendiri seperti pihak yang menyelenggarakan usaha atau pihak yang berhubungan dengan produksi. Dalam faktor ini, yang paling menunjang adalah pimpinan

perusahaan karena pemimpin perusahaan bertanggung jawab untuk semua pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan di wilayah perusahaan.

2. Fungsi eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi dari EA yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Dalam fungsi ini, Perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan hasil dari konservasi lingkungan dalam bentuk akuntansi.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency (US EPA)* fungsi penting dari EA adalah untuk menyajikan rincian biaya-biaya yang berhubungan dengan lingkungan bagi para petinggi perusahaan.

Rincian biaya tersebut mampu mendorong pengidentifikasian tentang cara-cara mengurangi atau menghindari biaya yang tidak diperlukan ketika perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan

Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan perlu memiliki akuntansi lingkungan, salah satunya adalah memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.

Alasan penting lainnya adalah untuk memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia yang berada di sekitar perusahaan dan keberhasilan bisnis perusahaan.

Dengan adanya akuntansi lingkungan,

diharapkan bisa menghasilkan rincian biaya atau detail harga yang lebih tepat untuk produk dari proses lingkungan yang diperlukan dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan para pelanggan yang menyukai produk dengan barang/jasa yang *environmental friendly*.

Akuntansi Lingkungan dapat membantu sebuah perusahaan dalam hal menjaga kondisi lingkungan. Baik itu secara kesehatan maupun secara hubungan dengan masyarakat yang terdapat di sekitar perusahaan.

Akuntansi lingkungan juga akan memperhitungkan biaya selama proses konservasi dan pemulihan yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi perusahaan tidak melakukan kesalahan ketika harus mengambil langkah penting.

Akuntansi Lingkungan disarankan untuk ada di setiap perusahaan. Tetapi agar kinerja akuntansi perusahaan maksimal diperlukan untuk memperhatikan beberapa faktor yaitu:

1. Menyesuaikan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang telah dibuat. Evaluasi yang dibuat harus akurat dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Evaluasi juga harus dilakukan secara mendalam dan fokus kepada dampak lingkungan yang telah dibuat bahkan prediksi dampak yang akan terjadi di masa depan.
2. Menentukan target perusahaan atas dampak lingkungan yang telah ditimbulkan oleh perusahaan target langkah perusahaan ini bisa berbeda-beda, tergantung dengan kondisi perusahaan dan dampak lingkungan yang telah ditimbulkan oleh perusahaan.

Perencanaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi juga diharuskan agar tidak terjadi dampak yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan.

3. Menentukan alat ukur yang sesuai untuk menentukan persoalan lingkungan. Setiap masalah lingkungan memiliki tolak ukur yang berbeda. Alat ukur yang tepat akan mengetahui dampak persoalan lingkungan yang sebenarnya.
4. Penilaian administrasi untuk menetapkan target di masing-masing segmen yang terdampak.
5. Menghasilkan segmen akuntansi untuk mengukur divisi perusahaan.
6. Melakukan pengujian untuk masing-masing divisi.
7. Melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Tujuan Akuntansi Lingkungan

Tujuan akuntansi lingkungan (Pramanik, et.al., 2007) antara lain adalah untuk:

1. Mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
2. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (*activist*) atau penekan (*pressure group*) terkait isu lingkungan.
3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari

kelompok dan individu 'hijau', seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.

4. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.
5. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
6. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tentangan dari masyarakat.

B. Metode Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Lingkungan

Alat pengukuran kinerja lingkungan adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan menilai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, industri, atau organisasi. Alat-alat ini sangat penting dalam upaya mengelola dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan

Mengukur Kinerja Lingkungan:

Alat dan Metode yang Efektif

Mengukur kinerja lingkungan merupakan komponen penting dalam upaya keberlanjutan. Alat dan metode yang efektif dalam pengukuran ini tidak hanya memungkinkan pemantauan yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengelola dampak industri terhadap lingkungan. Dengan teknologi yang terus

berkembang, berbagai alat dan metode inovatif telah menjadi kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan lingkungan.

1. Definisi Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merujuk pada evaluasi dampak suatu aktivitas, proses, atau organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ini mencakup pengukuran dan pemantauan faktor-faktor seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, dampak terhadap keanekaragaman hayati, kualitas udara, air, dan tanah, serta dampak visual atau kebisingan. Kinerja lingkungan menyoroti cara di mana suatu entitas, baik industri, organisasi, atau proyek, berinteraksi dengan ekosistem sekitarnya. Pengukuran kinerja lingkungan tidak hanya memungkinkan identifikasi dampak, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, mengelola risiko, serta memastikan kegiatan tersebut berada dalam kerangka keberlanjutan. Dengan memahami dan memantau kinerja lingkungan, upaya untuk mengurangi jejak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem menjadi lebih terarah dan efektif.

2. Alat Pengukuran Kinerja Lingkungan

Alat pengukuran kinerja lingkungan adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan menilai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, industri, atau organisasi. Alat-alat ini sangat penting dalam upaya mengelola dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang beberapa alat

pengukuran kinerja lingkungan yang umum digunakan:

- a. *Life Cycle Assessment* (LCA): LCA adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup suatu produk atau proses, mulai dari produksi hingga pembuangan akhir. LCA mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, dan dampak lainnya. Hasil LCA membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang menyebabkan dampak lingkungan dan memberikan panduan untuk perbaikan.
- b. *Sistem Informasi Geografis* (SIG): SIG adalah alat pemetaan yang memungkinkan pengguna untuk memetakan dan menganalisis data lingkungan berdasarkan lokasi geografis. Ini membantu dalam pemahaman dampak yang berkaitan dengan lokasi, seperti polusi air atau pemakaian lahan. SIG juga digunakan untuk perencanaan lingkungan, manajemen sumber daya alam, dan pemantauan perubahan lingkungan seiring berjalannya waktu.
- c. Sensor dan Teknologi IoT: Sensor dan *Internet of Things* (IoT) digunakan untuk pemantauan lingkungan secara real-time. Sensor ini dapat mengukur parameter seperti kualitas udara, air, dan tanah, serta suhu, kelembaban, atau radiasi. Data dari sensor ini dapat diakses secara langsung dan membantu dalam mendeteksi

perubahan lingkungan yang signifikan dan meresponnya dengan cepat.

- d. Analisis Pemetaan Citra Satelit: Citra satelit digunakan dalam pemantauan skala besar untuk mengukur perubahan lingkungan dari atas. Citra ini membantu dalam pemetaan perubahan tutupan lahan, deforestasi, pemantauan kebakaran hutan, serta pemantauan perubahan iklim. Citra satelit juga digunakan dalam mengidentifikasi polusi dan perubahan keanekaragaman hayati.
- e. Analisis Big Data: Dengan kemajuan teknologi, analisis big data digunakan untuk memproses dan menganalisis volume besar data lingkungan yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Ini membantu dalam mendapatkan wawasan mendalam tentang dampak lingkungan serta tren jangka panjang.

Alat-alat di atas adalah hanya sebagian dari berbagai alat pengukuran kinerja lingkungan yang digunakan di berbagai sektor, termasuk industri, perusahaan, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Penggunaan alat ini memungkinkan pemantauan yang akurat, evaluasi dampak, dan perbaikan yang tepat guna dalam usaha menjaga keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Metode Pengukuran Kinerja Lingkungan

Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja lingkungan, yang membantu dalam pemantauan, evaluasi, dan manajemen dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Berikut penjelasan lengkap mengenai beberapa metode penting:

1. **Kuantifikasi Emisi:** Metode ini mengukur dan menghitung emisi gas rumah kaca, polutan udara, limbah cair, dan zat berbahaya lainnya yang dihasilkan dari proses industri atau kegiatan manusia. Ini memungkinkan perusahaan untuk menilai dampaknya pada lingkungan dan menetapkan target pengurangan.
2. **Analisis Risiko Lingkungan:** Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas industri terhadap lingkungan. Analisis risiko membantu dalam mengidentifikasi skenario yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko tersebut.
3. **Pemantauan Kualitas Air dan Tanah:** Metode ini melibatkan pengukuran rutin terhadap kualitas air dan tanah untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia. Ini meliputi pengukuran kadar polutan, bahan kimia, dan logam berat dalam air dan tanah.
4. ***Life Cycle Assessment (LCA)*:** LCA adalah metode yang menganalisis dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup suatu produk atau proses, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan. Ini memungkinkan evaluasi lebih komprehensif terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan.
5. **Metode Pengukuran Keberlanjutan:** Meliputi pengukuran parameter seperti efisiensi energi, penggunaan sumber daya, dan dampak sosial ekonomi. Tujuannya adalah untuk

mengevaluasi sejauh mana suatu aktivitas atau perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

6. **Pemodelan dan Simulasi:** Metode ini menggunakan perangkat lunak dan model matematika untuk memprediksi dampak lingkungan dari skenario tertentu. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan dan pengembangan yang berdampak pada lingkungan.

Penggunaan metode ini dalam pengukuran kinerja lingkungan membantu perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi untuk memahami dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan, serta membantu dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak tersebut. Integrasi berbagai metode ini seringkali diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang kinerja lingkungan.

C. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Akuntansi Lingkungan

- **Tanggung-jawab Sosial Perusahaan / CSR**
CSR secara global mulai digunakan pada tahun 1970 dan kemudian menjadi sebuah isu setelah diterbitkannya buku berjudul “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business” oleh John Elkington pada tahun 1998. Elkington mengembangkan tiga hal penting yaitu economic growth, environmental protection, dan society equity yang kemudian berkembang menjadi profit, people, dan

planet (3P). Konsep Triple Bottom Line menurut Mulyadi dan Anwar (2012) menjelaskan mengenai perusahaan yang menginginkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan haruslah memperhatikan 3 komponen berikut:

1. Profit

Profit merupakan unsur terpenting dan tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit dapat ditingkatkan dengan meningkatkan manajemen perusahaan melalui pengurangan aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu, dan juga penggunaan bahan baku se-efisien mungkin.

2. People

Dukungan dari masyarakat dalam lingkungan bisnis diperlukan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Sebagai suatu kesatuan integral dengan masyarakat, perusahaan perlu memiliki komitmen dalam memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan nama baik dalam masyarakat akan membuat perusahaan menjaga eksistensinya dalam lingkungan tersebut.

3. Planet

Terdapat hubungan kausal antara perusahaan dengan lingkungan. Jika perusahaan merawat lingkungan mereka, maka alam akan memberikan timbal balik bagi perusahaan. Manfaat yang didapat tersebut antara lain

kesehatan, kenyamanan, dan juga ketersediaan bahan baku alami. Menurut Tija dan Setiawati (2012), Rustiarini (2010) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Kewajiban perusahaan atas CSR diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Pengungkapan CSR berpengaruh pada nilai perusahaan yang merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Hal ini sejalan dengan paradigm enlightened self-interest yang menyatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai jika

perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Hartanti, 2006 dalam Rustiarini, 2010). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seluruh kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pada pasal 6 yang menyatakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. PP tersebut lebih jauh lagi tidak menghalangi perseroan lainnya untuk berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Rouf (2011) mengungkapkan bahwa akuntansi sosial adalah modifikasi dan aplikasi oleh akuntan untuk keahlian atau skills, teknik dan disiplin konvensional akuntansi untuk analisis dan pemecahan masalah yang bersifat sosial. Estes (1976) mengungkapkan bahwa kinerja sosial suatu perusahaan terbagi atas:

1. Keterlibatan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan sosial yang cenderung menguntungkan masyarakat umum, termasuk untuk

pendidikan, kesehatan, perumahan dan sejenisnya.

2. Kegiatan internal sumber daya manusia ditujukan pada kesejahteraan karyawan termasuk remunerasi, pelatihan, keamanan dan kesehatan kondisi kerja.
3. Sumber daya fisik dan kontribusi lingkungan, misalnya bertanggung jawab pada kebijakan perlindungan lingkungan hidup.
4. Produk atau jasa kontribusi, misalnya bertanggung jawab pada kualitas produk.

Perkembangan bisnis telah memungkinkan terlahirnya perusahaan-perusahaan berskala besar. Perusahaan seperti ini, diberi label korporasi/corporation, beroperasi pada berbagai bidang usaha dan sebagian besar telah menjadi perusahaan multinasional. Tanpa ragu kita dapat menyebutnya sebagai organisasi ekonomi paling penting pada periode ini. Tujuan utama dari dibentuknya korporasi adalah untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis. Tapi kenyataannya, korporasi telah memiliki kekuatan melebihi kekuatan pemerintahan suatu negara. Kadangkala kendali tersebut dilakukan oleh korporasi berskala nasional. Yang lebih sering terjadi adalah kendali tersebut ada ditangan korporasi multinasional. Jika bisa dijadikan contoh kasus Lapindo, kasus Delco, Ltd., kasus Freeport mungkin sudah memiliki level kendali seperti itu, demikian pula

perusahaan-perusahaan minyak asing yang kukunya sudah menancap dengan sangat kuat di bumi pertiwi ini. Komentar Carey (1995) perlu diperhatikan:

“The twentieth century has been characterized by three developments of great political importance: the growth of democracy, the growth of corporate power, and the growth of propaganda as a means of protecting corporate power against democracy”.

Dengan power yang dimilikinya, korporasi merupakan pihak yang paling besar pengaruhnya terhadap tatanan lingkungan bumi. Dengan kemampuannya mengeksploitasi alam, tentu cukup kuat alasan untuk menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas berbagai kerusakan dalam tatanan masyarakat dan alamnya. Siapakah yang melakukan eksplorasi tambang minyak di lepas pantai Mexico? Dari adanya fakta tersebut, tentu sangat masuk akal kalau muncul himbauan atau bahkan tuntutan ke arah korporasi untuk lebih ramah dan lebih sensitif terhadap alam. Dampak dari pengrusakan alam tersebut pasti akan membuat penderitaan bagi masyarakat sekitarnya bahkan masyarakat dunia. Dengan latar belakang seperti itu, korporasi sebagai major exploiter dari sumber-sumber langka bumi, memiliki kewajiban untuk secara proaktif membangun sustainable future for the world”. Kalau bersandar pada konsep rasionalitas, maka kewajiban utama (manajemen) korporasi adalah memaksimalkan profit untuk para penyuplai modalnya, tanpa harus memperhatikan tanggung-jawab sosial. Karena konsep ini dapat membawa (bahkan sudah membuat) korporasi

menjadi predator lingkungan yang demikian ganas, maka upaya-upaya pengembangan teori tentang tanggung jawab sosial korporasi mulai dikembangkan, seperti stakeholder theory atau legitimacy theory. Bakan (2004) tidak menyarankan untuk melarang bentuk bisnis ini, tetapi menyarankan perlunya perbaikan sistem regulasi:

1. To bring corporations back to democratic control to ensure they respect the interest of citizens, communities, and the environment;
2. By making staffing of enforcement agencies more realistic (more teeth);
3. By prohibiting actions that may cause harm to people's health, safety, and the environment;
4. To improve genuine accountability;
5. To protect the role of workers and other associations that can monitor corporate behavior regarding the environment, consumer, and human rights.

D. Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Laporan Keuangan

-Pengaruh akuntansi lingkungan terhadap laporan keuangan

Akuntansi lingkungan adalah cabang akuntansi yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam praktik akuntansi perusahaan atau Lembaga pemerintah. Pengaruh akuntansi lingkungan terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pengungkapan Hasil Konservasi Lingkungan:
Perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan hasil dari konservasi

lingkungan dalam bentuk akuntansi.hal ini penting untuk memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mempunyai dampak negative terhadap Kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis perusahaan.

2. Pencatatan Biaya Lingkungan: Akuntansi Lingkungan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan rincian biaya atau detail harga yang lebih tepat untuk produksi dari proses lingkungan yang diperlukan.hal ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan para pelanggan yang menyukai produk dengan barang/jasa yang ramah lingkungan.
3. Pengakuan dan Pengukuran: Kebijakan memberikan pedoman untuk pencatatan kejadian-kejadian dan menetapkan pengaruh dari kejadian-kejadian tersebut terhadap posisi keuangan pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan apakah suatu kejadian atau peristiwa akan dicatat atau tidak.
4. Pengaruh terhadap nilai perusahaan: Akuntansi lingkungan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan Kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dapat mempengaruhi penerapan akuntansi lingkungan perusahaan yang memiliki visi dan nilai-nilai yang berpotensi pada lingkungan cenderung lebih aktif dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dalam laporan keuangan mereka.

Komite Standar Akuntansi Internasional atau yang disebut dengan *The International Accounting Standard Committee / IASC* mengembangkan sebuah konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional pada tahun 1990. Termasuk di dalamnya adalah tentang akuntansi lingkungan.

Ini dikarenakan semakin berkembangnya bisnis dan perusahaan sehingga perlu diadakan akuntansi lingkungan. Pengertian dari akuntansi lingkungan (*environment accounting*) menurut Arfan Ikhsan dalam buku Akuntansi Manajemen Lingkungan (2008), adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stakeholders* perusahaan.

Fungsi dari *environment accounting* (EA) dibagi menjadi 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.

1. Fungsi Internal.

Fungsi ini berkaitan dengan pihak-pihak internal suatu perusahaan sendiri seperti pihak yang menyelenggarakan usaha atau pihak yang berhubungan dengan produksi. Dalam faktor ini, yang paling menunjang adalah pimpinan perusahaan karena pemimpin perusahaan bertanggung jawab untuk semua pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan di wilayah perusahaan.

2. Fungsi Eksternal.

Fungsi eksternal merupakan fungsi dari EA yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Dalam fungsi ini, Perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan hasil dari konservasi lingkungan dalam bentuk akuntansi.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency (US EPA)* fungsi penting dari EA adalah untuk menyajikan rincian biaya-biaya yang berhubungan dengan lingkungan bagi para petinggi perusahaan.

Rincian biaya tersebut mampu mendorong pengidentifikasian tentang cara-cara mengurangi atau menghindari biaya yang tidak diperlukan ketika perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan

Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan perlu memiliki akuntansi lingkungan, salah satunya adalah memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.

Alasan penting lainnya adalah untuk memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia yang berada di sekitar perusahaan dan keberhasilan bisnis perusahaan.

Dengan adanya akuntansi lingkungan, diharapkan bisa menghasilkan rincian biaya atau detail harga yang lebih tepat untuk produk dari proses lingkungan yang diperlukan dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan para pelanggan yang menyukai produk dengan barang/jasa yang *Environmental friendly*.

Faktor-Faktor yang Membuat Akuntansi Lingkungan Sukses

Akuntansi Lingkungan dapat membantu sebuah perusahaan dalam hal menjaga kondisi lingkungan. Baik itu secara kesehatan maupun secara hubungan dengan masyarakat yang terdapat di sekitar perusahaan.

Akuntansi lingkungan juga akan memperhitungkan biaya selama proses konservasi dan pemulihan yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi perusahaan tidak melakukan kesalahan ketika harus mengambil langkah penting.

Akuntansi Lingkungan disarankan untuk ada di setiap perusahaan. Tetapi agar kinerja akuntansi perusahaan maksimal diperlukan untuk memperhatikan beberapa faktor yaitu:

1. Menyesuaikan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang telah dibuat. Evaluasi yang dibuat harus akurat dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Evaluasi juga harus dilakukan secara mendalam dan fokus kepada dampak lingkungan yang telah dibuat bahkan prediksi dampak yang akan terjadi di masa depan.
2. Menentukan target perusahaan atas dampak lingkungan yang telah ditimbulkan oleh perusahaan target langkah perusahaan ini bisa berbeda-beda, tergantung dengan kondisi perusahaan dan dampak lingkungan yang telah ditimbulkan oleh perusahaan. Perencanaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi juga diharuskan agar tidak terjadi dampak yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan.

3. Menentukan alat ukur yang sesuai untuk menentukan persoalan lingkungan. Setiap masalah lingkungan memiliki tolak ukur yang berbeda. Alat ukur yang tepat akan mengetahui dampak persoalan lingkungan yang sebenarnya.
4. Penilaian administrasi untuk menetapkan target di masing-masing segmen yang terdampak.
5. Menghasilkan segmen akuntansi untuk mengukur divisi perusahaan.
6. Melakukan pengujian untuk masing-masing divisi.
7. Melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Akuntansi lingkungan bisa memberikan manfaat yang baik pada perusahaan. Akuntansi lingkungan yang memahami bagaimana proses kinerja yang baik akan membawa proses perusahaan dan lingkungan menjadi lebih lancar.

Tidak terkecuali dengan akuntansi keuangan. Salah satu cara mudah untuk mengatur akuntansi keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan software akuntansi seperti Jurnal.

Oleh: Helly Aroza Siregar

A. Pentingnya Etika Dalam Akuntansi

Etika berasal dari kata Yunani 'Ethos' (jamak - ta etha), berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya sebagai bagian dari masyarakat.

Etika merupakan wujud perilaku yang harus ada dalam setiap profesi, dimana hal tersebut merupakan bagian dari karakter. Etika sebagai bagian dari karakter terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil dari manifestasi aturan yang telah digariskan dan ditetapkan. Adapun aturan yang membentuk karakter tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan suatu organisasi tertentu, dan lain sebagainya. Sementara aturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dengan jalan musyawarah antartokoh masyarakat. Aturan-aturan tersebut adalah hasil dari nilai-nilai interaksi dalam masyarakat yang mana membentuk suatu tatanan etika yang berlaku dalam menjalankan suatu profesi tertentu.

Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya (IAI, 2020).

Etika dalam akuntansi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang harus diterapkan oleh seseorang yang berprofesi dalam bidang akuntansi untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Hal ini melibatkan integritas, objektivitas, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit.

Adapun profesi dalam akuntansi tersebut yaitu sebagai seorang staf akunting yang bekerja pada perusahaan maupun pada organisasi indak indak, seorang akuntan yang bekerja sebagai auditor internal maupun eksternal, seorang akuntan manajemen, dan seorang pengajar di bidang akuntansi. Sumber daya manusia yang berperan dalam berbagai profesi tersebut harus menerapkan etika agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan standar moral yang sudah ditetapkan.

Profesi akuntan dalam melaksanakan seluruh tugasnya hendaknya senantiasa merujuk pada etika profesi. Kode Etik/Etika profesi akuntansi yang telah digariskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mana dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan indak, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia indakan n dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Setiap profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa dicoba dan diuji oleh berbagai ujian yang bisa membawa profesi tersebut pada suatu pelanggaran. Demikian pula dengan profesi akuntansi. Urgensi dari penerapan etika dalam akuntansi adalah untuk menghindari

penyalahgunaan wewenang dan tugas dari seseorang yang berprofesi di bidang akuntansi agar dapat menjalankan tugasnya secara indakan nal.

Menerapkan etika dalam bidang akuntansi memiliki manfaat yang penting, baik bagi para akuntan maupun bagi masyarakat secara umum. Beberapa manfaat utama termasuk:

1. Meningkatkan Kredibilitas Profesi: Dengan mematuhi kode etik akuntansi, seseorang yang berprofesi di bidang akuntansi dapat meningkatkan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia. Ketika masyarakat melihat bahwa para akuntan bertindak dengan integritas dan profesionalisme, mereka akan memiliki kepercayaan yang lebih besar bahwa profesi di bidang akuntansi adalah profesi yang penting dan dapat memberikan kinerja yang baik dalam setiap tugas yang dilakukan. Misalnya sebagai akuntan indak, kredibilitas informasi keuangan yang disajikan oleh para akuntan akan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Maulana (2020) dan Paradina (2021) yang menyebutkan bahwa kode etik akuntan baik disektor swasta maupun indak pemerintahan berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan, atau dengan kata lain hasil audit yang dilakukan dapat dipercaya oleh indak.
2. Meningkatkan Kepercayaan: dalam hubungannya sebagai seorang akuntan public, kode etik akuntan memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan antara akuntan dan klien. Dengan mematuhi

prinsip-prinsip etika, para akuntan dapat memperoleh kepercayaan klien dan masyarakat, yang sangat penting untuk mempertahankan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

3. Melindungi Kepentingan Klien: kode etik akuntan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan klien. Dengan menjaga kerahasiaan informasi klien dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, para akuntan dapat memberikan perlindungan kepada klien mereka dari penyalahgunaan atau penipuan.
4. Mendorong Pertumbuhan Bisnis: Praktik akuntansi yang etis dan indakan nal dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan bisnis. Informasi keuangan yang andal dan transparan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang baik dan strategis. Hal ini didukung dengan penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019).
5. Mendorong profesi di bidang akuntansi untuk dapat bersaing di era revolusi industry 4.0. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Puspitasasi (2019) yang membuktikan bahwa etika profesi memberikan pengaruh pada kemampuan sarjana akuntansi untuk bersaing dalam menghadapi era revolusi indakan 4.0.
6. Mendukung Pembangunan Ekonomi: Dengan adanya praktik akuntansi yang etis, Indonesia dapat membangun reputasi yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi dan

akuntabilitas terutama pada organisasi pemerintahan akan meningkatkan kinerja instansi pemerintahan (Novatiani, dkk: 2019). Hal ini dapat menarik investasi dan mendukung pembangunan ekonomi negara.

Dalam menerapkan etika akuntansi terdapat tantangan yang harus dihadapi. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Benturan Kepentingan: benturan kepentingan dalam penerapan ilmu akuntansi sangat berkaitan dengan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini terjadi karena pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak daripada principal atau pemilik perusahaan. Pihak manajemen berkepentingan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan untuk menunjukkan eksistensinya. Sementara hal ini akan merugikan principal ataupun pihak investor karena tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Benturan kepentingan juga terjadi pada organisasi pemerintahan, dimana terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi aparatur negara dengan kepentingan pelayanan indak yang harus dilaksanakannya. Kondisi benturan kepentingan lainnya adalah, kondisi seorang akuntan indak yang berhadapan dengan situasi di mana kepentingan klien bertentangan dengan prinsip etika yang harus diikuti. Dalam situasi ini, akuntan harus mampu membuat keputusan yang adil dan mempertahankan integritas mereka.

2. **Faktor Eksternal:** Akuntan juga dapat menghadapi tekanan dari pihak luar, seperti manajemen perusahaan atau klien, yang mendorong mereka untuk melanggar prinsip etika demi keuntungan pribadi atau organisasi. Akuntan harus memiliki keberanian dan kekuatan moral untuk menolak tekanan tersebut dan tetap mematuhi etika.
3. **Kompleksitas Regulasi:** Indonesia memiliki peraturan yang kompleks dalam bidang akuntansi. Para akuntan harus memahami dan mematuhi peraturan ini, tidak tetap mematuhi prinsip-prinsip etika yang lebih luas. Mengelola dan mematuhi semua peraturan ini dapat menjadi tantangan tersendiri.
4. **Kurangnya Kesadaran:** Beberapa akuntan mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya etika akuntansi dan prinsip-prinsip yang harus mereka ikuti. Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan mereka melanggar etika tanpa disengaja. Edukasi dan pelatihan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika akuntansi.
5. **Teknologi dan Etika:** Perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam menerapkan etika akuntansi. Misalnya, dengan kemajuan teknologi, ada risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi yang dapat mengancam kerahasiaan informasi klien. Akuntan perlu memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi

etika terkait penggunaan teknologi dalam praktik akuntansi mereka.

B. Standar Etika Profesional dalam Akuntansi

Standar etika profesional dalam akuntansi disusun dalam bentuk Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa profesi akuntansi dapat menjadi seorang akuntan dalam internal perusahaan, akuntan publik atau auditor eksternal dan akuntan manajemen, maka dalam menyusun kode etik tersebut, IAI berkolaborasi dengan IAPI dan IAMI sesuai dengan Nota Kesepahaman antara IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), dan IAMI (Institut Akuntan Manajemen Indonesia) tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia yang didukung oleh PPPK Kementerian Keuangan. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia.

Berikut ini adalah prinsip dasar etika untuk akuntan:

1. Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan indakan nal dan bisnis.
2. Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan indakan nal atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:

- a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian professional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa indakan nal yang kompeten, berdasarkan standar indakan nal dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar professional dan standar teknis yang berlaku.
4. Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan indakan nal dan bisnis.
 5. Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

Prinsip-prinsip tersebut secara umum berlaku untuk semua profesi di bidang akuntansi, tidak hanya berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai akuntan publik namun demikian pula berlaku bagi akuntan yang bekerja pada organisasi bisnis,

Akuntan yang bekerja pada organisasi bisnis atau pada perusahaan mungkin sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, pemilik merangkap sebagai pengelola atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan Akuntan dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak berpengaruh pada tanggung jawab

etika yang dibebankan kepada Akuntan tersebut. Dalam hal ini akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

C. Kasus Etika dalam Akuntansi Lanjutan

Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran etika dalam akuntansi yang diambil dari Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB).

Kasus yang pertama adalah masalah kinerja staf akunting pada perusahaan. Semua staf bekerja dari kantor perusahaan. Seorang staf junior baru saja kembali bekerja setelah mengambil cuti khusus untuk merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Karena alasan keuangan dia perlu bekerja penuh waktu. Dia mengalami kesulitan dengan pengaturan waktu antara melakukan perawatan ibunya di rumah dan jam kerja yang *fulltime*. Dia beberapa kali melewatkan pertemuan tim (yang biasanya dilakukan setiap awal hari), dan pulang kerja lebih awal. Pada dasarnya dia sangat kompeten dalam pekerjaannya, namun ketidakhadirannya memberikan stigma negatif bagi rekan-rekannya yang terlalu banyak bekerja. Anda adalah manajernya, dan Anda sadar bahwa alur kerja perusahaan berada di bawah tekanan. Salah satu kolega laki-lakinya mulai melontarkan komentar-komentar yang tidak pantas seperti “tempat perempuan adalah di rumah”, dan selalu meremehkannya di setiap kesempatan, sehingga membuatnya semakin stres. Untuk menyelesaikan hal ini maka, perlu diidentifikasi kode apa yang dilanggar.

Adapun kode etik yang dilanggar adalah integritas. Memang benar bahwa secara personal seorang anak harus merawat ibunya. Namun, disisi lain orang tersebut adalah seorang staf akunting yang memiliki komitmen terhadap perusahaan, sehingga dia harus berintegritas terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Sebagai seorang manajer dan atasan dari staf tersebut, hal yang sebaiknya dilakukan adalah mempertimbangkan kebijakan, prosedur dan pedoman perusahaan, praktik terbaik dan, dengan bantuan hukum jika diperlukan, undang-undang dan peraturan yang relevan. Apakah ada buku pegangan staf atau publikasi internal serupa yang mengatur masalah tersebut? Pertimbangkan sejauh mana peran Anda untuk menangani masalah staf seperti ini. Apakah kondisi tersebut berhubungan dengan departemen yang bertanggung jawab atas masalah sumber daya manusia? Periksa fakta yang relevan. Jika perlu, klarifikasi prosedur staf dengan departemen sumber daya manusia. Ambil nasihat hukum jika diperlukan.

Mempertimbangkan permasalahan dan mencoba mengidentifikasi solusi memungkinkan Anda menunjukkan bahwa Anda berperilaku profesional dan berupaya menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh staf junior. Secara keseluruhan, Anda harus terlihat bertindak adil – baik terhadap anggota staf junior, yang bertanggung jawab atas pengasuhan orang tuanya, maupun terhadap anggota staf lainnya. Anda mungkin ingin merekomendasikan kepada sumber daya manusia untuk mengadakan pelatihan di seluruh perusahaan mengenai penindasan dan pelecehan

serta kode etik perusahaan, untuk memastikan semua staf mengetahui informasi terkini.

Setelah mempertimbangkan semua solusi yang masuk akal, jika diperoleh kesimpulan bahwa karyawan junior tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka manajer harus mengalihkan perhatian pada pekerjaannya yang sedang ditangani oleh staf junior tersebut, apakah ada kemungkinan digantikan oleh sdm lain. Hal ini mungkin berada di luar kendali atasan, dan manajer harus menyampaikan fakta yang relevan kepada departemen sumber daya manusia atau pemilik/manajemen senior tentang kondisi tersebut. Kerahasiaan akan peristiwa ini harus dijaga setiap saat.

Kasus kedua adalah staf akunting yang tidak layak dalam penjualan. Anda adalah salah satu dari tiga mitra di sebuah firma akuntan. Lima tahun yang lalu, perusahaan tersebut ditunjuk sebagai akuntan eksternal di sebuah perusahaan rintisan yang sukses dan berkembang pesat, yang bertugas menyiapkan laporan akhir tahun dan laporan pajak. Bisnis ini awalnya berdagang dengan segelintir karyawan namun kini memiliki 200 tenaga kerja, namun tetap berada di bawah ukuran perusahaan yang memerlukan audit undang-undang.

Karena kedekatan Anda dengan direktur perusahaan (yang merupakan pemiliknya) dan beberapa stafnya, Anda menjadi sadar bahwa pembelian barang-barang produksi oleh staf ternyata disahkan oleh manajer produksi, dan kemudian diproses di luar sistem akuntansi. Hasil penjualan ini digunakan untuk mendanai kegiatan

amal perusahaan yang tidak tercantum dalam anggaran perusahaan.

Berdasarkan kondisi ini, pertanyaan yang muncul adalah, apakah menghilangkan pendapatan dari penjualan staf diluar pencatatan akuntansi akan mengakibatkan laporan keuangan dan laporan pajak menjadi menyesatkan? Apakah praktik tersebut tidak jujur, dan apa keterlibatan Anda?

Meskipun tujuan dari penjualan yang tidak tercatat tersebut untuk tujuan amal, namun perbuatan tersebut melanggar kode etik akuntan yaitu integritas. Pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan perbuatan yang tidak profesional dan dampaknya terhadap pajak perusahaan menunjukkan ketidakjujuran dalam melaporkan pendapatan yang seharusnya.

Dari sisi seorang akuntan eksternal yang mengetahui hal ini, hendaknya memegang kode etik objektivitas. Meskipun Anda sudah mengenal dekat pimpinan dan karyawan tersebut, namun objektivitas menilai kejadian tersebut harus tetap dipertahankan.

Selain itu, etika perilaku profesional juga harus dikedepankan. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku indakan nal, yang mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

Tidaklah tepat untuk membicarakan masalah ini dengan staf mana pun di perusahaan klien, meskipun direktur harus diberitahu tentang masalah tersebut sesegera mungkin dan dilibatkan dalam penyelesaiannya. Hal ini termasuk memfasilitasi penyediaan semua informasi relevan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Reputasi perusahaan Anda mungkin juga rentan, dan Anda harus mengungkapkan dilema etika ini kepada mitra Anda. Sepanjang proses penyelesaian, Anda harus selalu memberi informasi kepada mitra Anda.

Anda juga harus menentukan apakah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya cenderung menyesatkan dan, jika demikian, pertimbangkan tanggung jawab Anda (atau tanggung jawab klien Anda) untuk memberi tahu otoritas terkait (termasuk otoritas pajak). Anda harus sangat menyarankan kepada direktur bahwa kebijakan penjualan staf harus diterapkan untuk memastikan bahwa penjualan ini dicatat sepenuhnya dalam sistem akuntansi perusahaan di masa depan.

Hasoloan (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis dan melanggar etika misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan seperti itu. Dalam realita kegiatan bisnis sering kali ditemukan perusahaan yang indakan laporan keuangan yang berbeda untuk pihak-pihak yang berbeda. Ada laporan keuangan internal perusahaan, laporan keuangan untuk bank, dan laporan keuangan untuk

kantor pajak. Dengan melakukan praktik ini, bagian akuntansi perusahaan secara sengaja memanipulasi data dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan palsu tersebut.

D. Konsekuensi Pelanggaran Etika dalam Akuntansi

Merujuk pada Kode Etik Akuntan Indonesia yang dipublikasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus: (a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai. (b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi akuntansi IAI akan menerima sanksi profesi penegakan disiplin yaitu adanya sanksi administrasi dan sanksi profesi. Berdasarkan PO No 2 tahun 2020, DPN IAI akan mengenakan sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan dan pencabutan Chartered Accountant (CA), tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan anggota IAI.

PO No. 2 tahun 2020 juga menegaskan jika sanksi profesi diberikan kepada anggota IAI yang tidak memenuhi kewajiban profesionalnya, yaitu tidak menaati standar profesi jasa akuntan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa

Akuntan (DSPJA) IAI, tidak mematuhi kode etik yang ditetapkan Komite Etika IAI; dan/atau tidak memiliki dan/atau tidak mengimplementasikan standar pengendalian mutu dan peraturan yang berlaku sesuai hasil review mutu yang dilakukan Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan (DRM KJA) IAI. Sanksi profesi dimaksud berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara sebagai anggota IAI, atau pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.

BAB XII

Audit dan Jaminan

Oleh: Ahmad Gazali, SE., Ak., MSA

A. Pengertian Audit

Audit adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi dan memeriksa laporan keuangan, operasi, dan prosedur bisnis suatu organisasi untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. Proses audit dilakukan oleh seorang auditor atau tim auditor yang independen dan objektif.

1. Tujuan Audit

- 1) Menilai Kepatuhan: Memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi aturan, peraturan, dan standar akuntansi yang berlaku.
- 2) Mengevaluasi Akurasi: Memverifikasi bahwa laporan keuangan dan informasi lain yang disajikan oleh perusahaan adalah akurat dan dapat diandalkan.
- 3) Mendeteksi Kesalahan dan Kecurangan: Mengidentifikasi potensi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kecurangan dalam laporan keuangan atau operasi bisnis.
- 4) Meningkatkan Efisiensi: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko.

2. Jenis-Jenis Audit

- 1) Audit Keuangan: Pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan bahwa mereka

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- 2) Audit Operasional: Evaluasi efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan.
- 3) Audit Kepatuhan: Pemeriksaan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku.
- 4) Audit Forensik: Investigasi mendalam untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau penyimpangan tertentu.

3. Proses Audit

- 1) Perencanaan Audit: Auditor menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Ini termasuk memahami bisnis klien dan lingkungan yang relevan.
- 2) Pengumpulan Bukti: Auditor mengumpulkan bukti yang relevan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan, dan konfirmasi eksternal.
- 3) Evaluasi Bukti: Auditor menganalisis dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- 4) Pelaporan: Auditor menyusun laporan audit yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini biasanya mencakup opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan.

4. Prinsip-Prinsip Audit

- 1) Independensi: Auditor harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak yang diaudit.

- 2) Integritas: Auditor harus jujur dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Objektivitas: Auditor harus objektif dan tidak memihak dalam evaluasi dan pelaporannya.
- 4) Kerahasiaan: Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit.
- 5) Kompetensi Profesional: Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit secara efektif.

Audit memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan dan operasi bisnis. Melalui proses audit, organisasi dapat memperbaiki sistem dan proses mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan meminimalkan risiko..

B. Proses Audit: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

1. Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah tahap awal dan sangat penting dalam proses audit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan audit:

Memahami Entitas yang Diaudit: Auditor harus memahami bisnis, struktur organisasi, proses, dan lingkungan eksternal dari entitas yang akan diaudit. Ini mencakup pemahaman tentang industri, regulasi yang

berlaku, serta risiko dan tantangan yang dihadapi oleh entitas.

Menentukan Ruang Lingkup Audit: Auditor menetapkan ruang lingkup audit, yang mencakup area-area yang akan diperiksa dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ini membantu auditor untuk fokus pada aspek-aspek yang paling relevan dan material.

Mengidentifikasi Risiko: Auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko ini bisa timbul dari kesalahan atau kecurangan. Berdasarkan penilaian risiko ini, auditor dapat menentukan strategi audit yang sesuai.

Menyusun Rencana Audit: Auditor menyusun rencana audit yang mendetail, termasuk metode pengumpulan bukti, prosedur audit yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, dan alokasi sumber daya.

Pengaturan Tim Audit: Auditor menentukan tim yang akan terlibat dalam audit, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.

2. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit adalah tahap di mana auditor melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit. Langkah-langkah dalam pelaksanaan audit meliputi:

Pengumpulan Bukti Audit: Auditor mengumpulkan bukti melalui berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen,

observasi, wawancara, dan konfirmasi eksternal. Bukti ini digunakan untuk mengevaluasi keandalan dan kelengkapan laporan keuangan.

Pengujian Pengendalian Internal: Auditor menguji pengendalian internal untuk menilai efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan oleh entitas. Pengendalian internal yang kuat membantu mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan.

Prosedur Substantif: Auditor melaksanakan prosedur substantif untuk memeriksa akun-akun penting dan transaksi yang material. Ini mencakup pemeriksaan detail dan analitis untuk memastikan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan akurat dan bebas dari salah saji material.

Penilaian Risiko Lanjutan: Berdasarkan temuan awal, auditor mungkin perlu menyesuaikan rencana audit dan melakukan pengujian tambahan untuk area yang teridentifikasi memiliki risiko lebih tinggi.

3. Pelaporan Audit

Pelaporan audit adalah tahap akhir di mana auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Langkah-langkah dalam pelaporan audit meliputi:

Menyusun Laporan Audit: Auditor menyusun laporan yang merinci hasil audit, termasuk opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan. Laporan ini juga mencakup temuan signifikan, kekurangan

pengendalian internal, dan rekomendasi perbaikan.

Opini Audit: Auditor memberikan opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Opini audit bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau penolakan memberikan opini.

Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak Berkepentingan: Auditor berkomunikasi dengan manajemen tentang temuan audit dan rekomendasi perbaikan. Dalam beberapa kasus, auditor juga mungkin perlu berkomunikasi dengan komite audit atau dewan direksi.

Tindak Lanjut: Auditor dan manajemen harus memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang diusulkan dilaksanakan dan dievaluasi kembali pada periode audit berikutnya.

Proses audit yang terstruktur dan komprehensif ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan entitas adalah akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta membantu mengidentifikasi area untuk peningkatan dalam pengendalian internal dan proses bisnis.

C. Standar Audit dan Jaminan

1. Standar Audit

Standar audit adalah pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh auditor

selama proses audit untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara sistematis, objektif, dan konsisten. Standar ini dikeluarkan oleh berbagai badan pengatur di seluruh dunia, seperti:

International Standards on Auditing (ISA): Dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), standar ini digunakan secara global dan menetapkan persyaratan dan panduan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan.

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS): Dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) di Amerika Serikat, GAAS menetapkan sepuluh standar yang dibagi menjadi tiga kategori utama:

Standar Umum: Meliputi kompetensi teknis, independensi, dan due professional care.

Standar Pekerjaan Lapangan: Meliputi perencanaan dan supervisi, pemahaman tentang pengendalian internal, dan pengumpulan bukti yang cukup dan tepat.

Standar Pelaporan: Meliputi penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, konsistensi penerapan prinsip akuntansi, dan pengungkapan yang memadai.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Standards: Dikeluarkan oleh PCAOB untuk mengatur audit perusahaan publik di Amerika Serikat. Standar ini melengkapi dan kadang menggantikan GAAS untuk auditor perusahaan publik.

Tujuan dan Prinsip Standar Audit

Transparansi: Memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan jujur dan transparan.

Konsistensi: Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan audit dari satu periode ke periode berikutnya.

Keterandalan: Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Akuntabilitas: Memastikan bahwa auditor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka.

2. Jaminan (Assurance)

Jaminan dalam konteks audit mengacu pada keyakinan yang diberikan oleh auditor tentang keandalan dan keakuratan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Jaminan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkat:

Jaminan Tinggi (Reasonable Assurance): Diberikan dalam audit laporan keuangan, di mana auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, ini tidak berarti bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan, tetapi risiko kesalahan material sangat kecil.

Jaminan Sedang (Limited Assurance): Diberikan dalam review laporan keuangan, di mana auditor menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang menyebabkan mereka

yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Prosedur yang digunakan dalam review lebih terbatas dibandingkan dengan audit.

Jaminan Rendah: Biasanya diberikan dalam prosedur yang disepakati atau jasa konsultasi, di mana auditor memberikan keyakinan tentang area tertentu atau transaksi spesifik berdasarkan prosedur yang telah disepakati dengan klien.

Jenis-jenis Jasa Jaminan

Audit Laporan Keuangan: Memberikan jaminan tinggi bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Review Laporan Keuangan: Memberikan jaminan sedang dengan prosedur yang lebih terbatas daripada audit penuh.

Prosedur yang Disepakati: Auditor melakukan prosedur spesifik yang telah disepakati dengan klien dan melaporkan hasilnya, tanpa memberikan jaminan tentang keseluruhan laporan keuangan.

Audit Kinerja atau Operasional: Menilai efisiensi dan efektivitas operasi bisnis, memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Audit Kepatuhan: Menilai apakah entitas mematuhi peraturan, kebijakan, dan ketentuan kontrak yang relevan.

Audit Forensik: Mendeteksi dan menyelidiki kecurangan atau penyimpangan tertentu.

Standar audit dan jaminan adalah elemen kunci dalam proses audit yang membantu memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif, konsisten, dan efektif. Standar audit menetapkan kerangka kerja dan pedoman yang harus diikuti oleh auditor, sementara jaminan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan tentang keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui penerapan standar ini, auditor dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam laporan keuangan entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2010. Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi: Akrua*. Vol.1, No.2, April 2010: 80-100.
- Ak, Hagi. 2011. Waste Management Canada (CA). Nova Science. Andika, A., Sulindawati, N.L.G.E., Kurniawan, P.S. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Studi Kasus Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT Indo Citra Jaya Samudra Jember. *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. (vol8 :2).
- Alexander, D., & Nobes, C. (2016). *Financial Accounting: An International Introduction*. Pearson.
- Alexander, D., Britton, A., & Jorissen, A. (2017). "International Financial Reporting and Analysis." Cengage Learning EMEA.
- Aniela, Y. 2012. Peran Akuntansi Lingkungan Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal berkala ilmiah mahasiswa*.(1). 15-19.
- Anis, V.W., Dkk. 2020. Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Hal Pengelolaan Limbah Produksi Pada Perusahaan Pengalangan Ikan Tuna PT Samudra Mandiri Sebtosa Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.(360-365).
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and assurance services: an integrated approach*. Prentice Hall

- Arfan, Ikhsan. 2008. Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arnold, G. (2019). "Corporate Financial Management." Pearson UK.
- Aswand Hasoloan. (2018). Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis. *New England Journal of Medicine*, 372(2).
- Attah Lawrence, O., & Angus Okechukwu, U. (2013). Review of Accounting Gimmicks Called Depreciation. *Open Journal of Accounting*, 02(02), 39-44.
<https://doi.org/10.4236/ojacct.2013.22007>
- Azizah, Nur. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial (Studi Kasus Pada PTPN XII Pabrik Gula Takalar). Skripsi tidak diterbitkan. Makasar : Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Baker, R. E., Lembke, V. C., King, T. E., Jeffrey, C. G., Jusuf, A. A., NPS, S. V., Wulandari, E. R., & Martani, D. (2010). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Salemba Empat.
- Beams, F. A., Anthony, J. H., Clement, R. P., & Lowensohn, S. H. (2007). Akuntansi Lanjutan Ed. 8 Jil. 2. Gramedia.
- Beams, F. A., Anthony, J. H., Clement, R. P., & Lowensohn, S. H. (2009). Akuntansi Lanjutan. Erlangga.
- Ben-Shahar, D., Margalioth, Y., & Sulganik, E. (2009). The straight-line depreciation is wanted, dead or alive. *Journal of Real Estate Research*, 31(3), 351-370.
<https://doi.org/10.1080/10835547.2009.12091257>

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Brown, L. D. (2016). *The Impact of Changes in Fair Value Accounting on Investment Decision Making*. PhD Dissertation, University of Pennsylvania.
- Casanova, B., & Nindito, M. (2014). Pengaruh Aktiva pajak Tanggungan Dan Ratio Pajak Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 9 (2).
- Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB). (2022). *Ethical Dilemmas Case Studies Professional Accountants in Public Practice*. CCAB Ltd.
- Damanik, Y. K., Sudjana, N., & Wi, M. G. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard Menilai Tingkat Kesehatan BUMN. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(2).
- Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd Edition. John Wiley & Sons.
- Darwin, Ali. (2007, November). Pentingnya Laporan Keberlanjutan. *Akuntan Indonesia*, (online). Edisi No.3. Halaman 12-14. www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf (diakses 10 April 2013).
- Deloitte. (2020). *IFRS in Focus: Consolidation under IFRS 10*. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
- Direktorat Jenderal Pajak, (2016) susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan.
- Elliott, B., & Elliott, J. (2019). "Financial Accounting

- and Reporting." Pearson UK.
- Emie Tisna Sule dan Saefullah, Kurniawan. 2010. Pengantar Manajemen. Kencana, Jakarta. Hal 81- 82.
- Erdur, D. A. (2014). Analyzing The Effects Of Corporate Social Responsibility Level On The Financial Performance Companies: An Application On Bist Corporate Governance Index Included Companies. *Journal of Management Economics and Business*, 10(23).
- Ernst & Young. (2019). Applying IFRS: A closer look at IFRS 10 Consolidated Financial Statements. EY Global Limited.
- Estianto, G. B dan Purwanugraha, Andre.2014. Analisis Biaya Lingkungan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Fahmi, I. 2014. Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi. Bandung. Alfabeta.Hal 80-81.
- Filatov, E. A., Khokhlova, G. I., & Okladnikova, D. R. (2013). Use of accelerative amortization methods for investment and innovation development of enterprises. *World Applied Sciences Journal*, 27(3), 404-407. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.27.03.13626>
- Fitriani danMutmainah, S. 2011. Keterkaitan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Finansial.
- Foundation, C. A., Name, F., & Makkar, P. (n.d.). CONCEPT AND DEPRECIATION ACCOUNTING.
- Franciska, R. M., Sondakh, J.J dan Trayoh, V. Z. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada PT. Royan Coconut Airmadidi Going

Concern. *Jurnal riset akuntansi*. 14 (1), h. 58-63.

- Friedlob, G. T., & Schleifer, L. L. (2016). "Essentials of Corporate Performance Measurement." John Wiley & Sons.
- Goni, Y. M. F., & Budiarmo, N. S. (2018). Analysis Calculation of Depreciation Fixed Assets According To Financial Accounting Standards and Tax Laws As Well As Impact on Taxable Income in Pt. Massindo Sinar Pratama Manado. *Accountability*, 7(01), 11. <https://doi.org/10.32400/ja.19072.7.01.2018.11-20>
- Green, C. D., Grinyer, J. R., & Michaelson, R. (2002). A possible economic rationale for straight-line depreciation. *Abacus*, 38(1), 91-120. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00099>
- Hansen, D.R dan Mowen, M.M. 2016. *Akuntansi Manajerial*. Salemba empat.
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan. T.E.U..Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor. 7. Bentuk. Undang-undang (UU).
- Harris, M. S. (2018). Fair Value Measurement and Its Implications for Financial Reporting. Master's Thesis, Harvard University. [http://pelangiilmu.jurnal.unesa.ac.id/bank/jurnal/AKUNTANSI_LINGKU NGAN_paper_CFP_JEBI_\(Dian_Anita_Nuswanta ra\)-Ready.pdf](http://pelangiilmu.jurnal.unesa.ac.id/bank/jurnal/AKUNTANSI_LINGKU NGAN_paper_CFP_JEBI_(Dian_Anita_Nuswanta ra)-Ready.pdf) (diakses 26 Februari 2013).
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Idris, 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Jurnal Economac*, (online). Vol.2, No.2. <http://manajemen.unnes.ac.id> (diakses 9 Mei

- 2013).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). PSAK 22: Kombinasi Bisnis. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. Diakses dari <https://iaiglobal.or.id>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Akuntansi Keuangan Per efektif 1 Januari 2018
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Buku Panduan Penerapan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan: Konvergensi dan Harmonisasi dengan IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Buku Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Volume 1 Edisi 2023. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Standar Akuntansi dan Keuangan. 031, 8494830.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2011). IFRS 10: Consolidated Financial Statements. IFRS Foundation.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2011). IFRS 10: Consolidated Financial Statements. IFRS Foundation.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2011). IFRS 3: Business Combinations. IFRS

Foundation.

- International Accounting Standards Board (IASB). (2023). International Accounting Standard 38 Intangible Assets. IFRS Standards, 1(May 2017), 1488-1522. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangible-assets.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards/english/2024/issued/ias38/>
- International Accounting Standards Board. (2018). IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. London: IASB.
- International Financial Reporting Standards (IFRS). (2020). IFRS 10: Consolidated Financial Statements. Diakses dari <https://www.ifrs.org>.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting. Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting. 17th Edition. John Wiley & Sons.
- Kristiani, E., & Ismail, T. H. T. (2018). Adoption of IFRS in Indonesia: Benefits and Challenges. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(2), 144-151.
- Kurniawan, E., & Basuki, E. S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan IFRS Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 187-198.
- Larson, K. D., & Street, D. L. (2004). "Financial Reporting and Analysis." McGraw-Hill Higher Education.
- Lestari, R. K., & Setiawan, D. (2020). The Impact of IFRS Adoption on Financial Statements Quality in Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(1), 25-33.
- Lestari, U. P., Veronica, & Metekohy, E. Y. (2019).

- Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis FEB UNSOED*, 23(2), 226-240.
- Leung, P. (2016). "Fundamentals of Financial Management." Routledge.
- Man, M., & Dima, I. C. (2014). ACCOUNTING AND FISCAL POLICIES REGARDING THE TREATMENT OF ASSETS ' DEPRECIATION – NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FISCAL POLICIES REGARDING THE TREATMENT OF ASSETS ' DEPRECIATION –. May.
- Martani, D., NPS, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat: Jakarta.
- Maulana, D. (2020). Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.855>
- Melicher, R. W., & Norton, E. A. (2014). "Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management." John Wiley & Sons.
- Melville, A. (2019). *International financial reporting: A practical guide* (5th ed.). Pearson.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1-19. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mulyadi. (2019). *Akuntansi internasional*:

- Mengimplementasikan IFRS. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2023). *Akuntansi Keuangan Teori dan Praktik Edisi Ke-10*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.
- Nobes, C., & Parker, R. (2016). *Comparative international accounting (13th ed.)*. Pearson.
- Nobes, C., & Parker, R. H. (2016). "Comparative International Accounting." Pearson UK.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS*, 10(1).
<https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nugroho, M. luthfi. (2014). Sejarah Perkembangan Serta Standarisasi Akuntansi di Dunia Internasional dan Indonesia. Mokhammad Luthfi Nugroho's Blog.
<https://mukhammadluthfinugroho.wordpress.com/2014/04/27/sejarah-perkembangan-serta-standarisasi-akuntansi-di-dunia-internasional-dan-indonesia/>
- Nuryadin, M. B. (2015). Urgensi Penerapan Etika Dalam Bisnis. *Al-Tijary*, 1(1), 23–32.
- Nuswantara, Dian Anita. 2008. Akuntansi Lingkungan: Antara Mandatory dan Voluntary. *Jurnal Pelangi Ilmu*, (online). Vol.2, No.2, Juli-Desember 2008.
- Office of Tax Simplifications. (2018). Accounting depreciation or capital allowances? (Issue June).
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716304/Accounting_depreciation_or_capital_allowances_web.pdf

- Palepu, K. G., Healy, P. M., & Bernard, V. L. (2006). "Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements." Cengage Learning.
- Paradina, N. E. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada BPKP Provinsi Jambi). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.296>
- Penman, S. H. (2013). "Financial Statement Analysis and Security Valuation." McGraw-Hill Education.
- Pesak, P. J., Karundeng, F. E., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengantar Akuntansi. Majalengka: Edupedia Publisher.
- Pramanik, A. K., Shil, O. H., & Das, A. B. (2007). Environmental Accounting and Reporting, New Delhi, Deep Publication PVT Ltd. Rocky Harris (2009) Environmental Accounting Applications for Sustainable Consumption and Production Policies, Department of Environment, United Kingdom, 3-7.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2020). IFRS Manual of Accounting. PwC.
- Pura, R. (2013). Pengantar Akuntansi 1. Erlangga.
- Purwoko, H. Y., & Kusuma, H. E. (2020). The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia and its impact on the quality of financial statements. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 47-60.
- Puspitasari, E. (2019). Pengaruh Kompetensi Sarjana Akuntansi, Regulasi Pemerintah Dan Etika Profesi Terhadap Kemampuan Sarjana Akuntansi Untuk Bersaing Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *E-JRA*, 8(1).

- Putri, A. (2010). Perkembangan Akuntansi di Indonesia Anisa Putri dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA. *Jurnal Perkembangan Akuntansi*, 2(1998), 38–49.
- Rahardjo, S. W. (2017). Standar akuntansi keuangan Indonesia: Konvergensi, adopsi, dan implementasi. Salemba Empat.
- Rawung, W. A. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 72 Pada PT Yonda Sejahtera Manado. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 12(2), 113–124.
- Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2011). *Investment Analysis and Portfolio Management*. 10th Edition. South-Western Cengage Learning.
- Revsine, L., Collins, D. W., Johnson, W. B., & Mittelstaedt, H. F. (2014). *Financial Reporting and Analysis*. 6th Edition. McGraw-Hill Education.
- Rini, E. S. (2022). Perkembangan Pemikiran Akuntansi: Tinjauan dalam Perspektif Sosial Historis. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 333. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.517>
- Riyanto, Bambang. (2022). *Akuntansi Keuangan Perusahaan Edisi ke-5*. Yogyakarta: BPF.
- Robinson, T. R., Greuning, H. V., Henry, E., & Broihahn, M. A. (2015). *International Financial Statement Analysis*. 3rd Edition. John Wiley & Sons.
- Rustika, Novia. 2011. Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Jawa Tengah). Skripsi, (online). Semarang:

- UNDIP. <http://eprints.undip.ac.id> (diakses 16 April 2013).
- Sari, D. (2014). *Perpajakan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Sari, R. D., & Handayani, D. (2019). Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 dan PSAK 72 pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Islam Indonesia*, 18(2), 301-312.
- Sari, R. D., & Sari, D. R. (2020). Dampak PSAK 72 Terhadap Pengakuan Pendapatan Penjualan Ekspor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 11(1), 1-10.
- Sasongko, C., Setyaningrum, A., Febriana, A., Hanum, A. N., Pratiwi, A. D., & Zuryati, V. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Scott, W. R. (2018). *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2020). *Financial Accounting Theory*. 8th Edition. Pearson.
- Setyowati, D. A., & Dwiyan, D. (2022). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Shareholder Value (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction). *Jurnal Ilmiah Manajemen FEB Universitas Brawijaya*, 14(2), 311-322.
- Sihotang, K. (2019). *Etika Profesi Akuntansi: Teori dan Kasus*. PT Kanisius.
- Soemarso. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar* (6th ed.). Salemba Empat.
- SoM, P. (2022). Inilah Fungsi dan Peranan Penting Akuntansi dalam Bisnis! PPM School of

Management.

<https://ppmschool.ac.id/peranan-akuntansi-dalam-bisnis/>

Spiceland, J. D., Sepe, J. F., & Nelson, M. W. (2018). *Intermediate Accounting*. 9th Edition. McGraw-Hill Education.

Studies, E., Depreciation, K., & Classification, J. E. L. (2016). The Doctoral School of The Bucharest University of Economic Studies IDENTIFICATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS ON ACCOUNTING DEPRECIATION. IV(2), 373-378.

Sudarno. 2008. Akuntansi Lingkungan Sebagai Alat Manajemen Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. vol 5:1.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1).

Suwardi, I., & Rahardjo, S. W. (2017). Penerapan Konvergensi IFRS di Indonesia: Antara Harapan dan Realita. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(2), 138-152

Timuriana, T., & Muhamad, R. R. (2015). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Falkutas Ekonomi*. 1(2)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang

- Pajak Penghasilan, PT. MITRAINFO – Jakarta – 2010
- Walton, P. (2018). *Advanced financial reporting: A complete guide to IFRS*. Wiley.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., E., J. D., Tri, W. E., & Jusuf, A. A. (2018). *Pengantar Akuntansi 2*. Salemba Empat.
- Wasi,WanggonoAntonius. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan*. Skripsi tidak diterbitkan. DI Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Yanto, Sri. (2007, November). *Akuntansi Hijau: Sarana Pendeteksi Dini Bencana Lingkungan*. *Akuntan Indonesia*, (online). Edisi No.3. Halaman 23-26. www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf (diakses 10 April 2013).
- Zeff, S. A. (2016). "The Evolution of the Conceptual Framework for Business Enterprises in the United States." *Accounting Horizons*, 30(4), 397-415.

BIOGRAFI PENULIS



Siti Mudawanah, lahir di Kabupaten Lebak Banten, Putri ketujuh dari delapan bersaudara dari Bapak M. Soleh dan Ibu Eni. Menyelesaikan Pendidikan dari SD s.d S1 di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten. Melanjutkan Pendidikan S2

Akuntansi di Universitas Budi Luhur. Kegiatan sehari-hari mengajar di program S1 Universitas La Tansa Mashiro. Saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan sekaligus menjabat sebagai staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas La Tansa Mashiro. Menjadi tim editor di jurnal *The Asia Pacific Journal Of Management Studies* dan editorial board di *Basic and Applied Management Research Journal* (BAMRJ). Penelitian yang berhasil di danai Kemenristekdikti Tahun 2021 Penelitian Dosen Pemula dengan judul implikasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi Terhadap Minat Calon Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE La Tansa Mashiro dalam Keberlanjutan Perguruan Tinggi. Adapun karya buku tahun 2023 yang telah di tuliskan yaitu *Book Chapter* Pengantar Akuntansi Bab 11. Interpretasi Laporan Keuangan, Teori Ekonomi Bab 1. Pendahuluan, Statistika Dasar Bab 15. Penerapan Metode Statistika Dalam Penelitian. Manajemen Keuangan Bab 3. Nilai Waktu Uang dan Penilaian Investasi.



Nurhafilah Soraya, S.E., M.Si., CertSF, CERA, Lahir di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara 29 tahun silam. Penulis saat ini adalah dosen tetap dan peneliti pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan (POLMED). Meraih Gelar

Sarjana Ekonomi (SE) dari Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya (UNSRI) program Bilingual Class. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) di bidang Akuntansi Keuangan dari Program Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (Pasca Sarjana-USU). Pernah bekerja sebagai praktisi PT. Bank Sumut sebagai analis kredit selama 2 tahun kemudian sebagai Staff Pengembangan Bisnis selama 2 tahun. Saat ini, penulis fokus melakukan penelitian di bidang akuntansi keuangan dan pasar modal. Penulis juga merupakan pelaku usaha di bidang makanan ringan dan aktif mempublikasi video pembelajaran melalui kanal Youtube.



Rahmatia. Penulis lahir di Minahasa Selatan 11 Oktober 1989 pendidikan sarjana diselesaikan pada program studi akuntansi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma (2011), kemudian melanjutkan pendidikan magister Akuntansi di Universitas

Muslim Indonesia (2014). Sejak tahun 2014-2018 menjadi dosen tetap di Universitas Ichsan Gorontalo, dan saat ini sebagai dosen tetap jurusan

Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN sultan Amai Gorontalo (2019-Sekarang).



Hafid F. Habibi, menyelesaikan sarjana di Universitas Bina Nusantara, sebuah institusi yang diakui untuk program akuntansi dan manajemen informatikanya. Keinginan untuk terus berkembang membawa beliau ke Universitas Mercu Buana, dimana beliau meraih gelar master dalam akuntansi, memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendidikan formal beliau diperkaya dengan sertifikasi profesional, termasuk gelar akuntan dari Program Pendidikan Akuntan (PPAK) di Universitas Indonesia, serta dua sertifikat profesi yang sangat dihormati: Chartered Accountant (CA) dan Certified Public Accountant (CPA). Sertifikasi ini bukan hanya menandakan keahlian teknis, tetapi juga komitmen terhadap etika dan standar profesional yang tinggi. Di dunia profesional, Hafid F Habibi bekerja sebagai partner di KAP Junaedi, Chairul dan Rekan, sebuah firma akuntan publik yang memiliki reputasi baik. Di sini, beliau berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan firma, sambil memastikan integritas dan transparansi dalam laporan keuangan klien. Selain peran aktifnya dalam praktik akuntansi, beliau juga berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai dosen, mengisi seminar dan lokakarya.



Pricilia Joice Pesak, SE., M.S.A. lahir di Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara tahun 1987 adalah dosen tetap di Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado (Unima). Program sarjana dan Magister diselesaikan di program studi

Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi. Selain sebagai pengajar dan peneliti di FEB Unima, penulis juga sebagai team teaching dan Tutor di beberapa kampus di Sulawesi Utara.



Adi Dwi Purnomo, S. Kom., M. Akt. Meraih gelar Sarjana Komputer di Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Sistem Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta Tahun 2006, Magister Akuntansi Bidang Peminatan Akuntansi Keuangan di Pascasarjana

Universitas Budi Luhur Jakarta Tahun 2009, Dosen Tetap Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas La Tansa Mashiro terhitung Tahun 2009 sampai sekarang.



Dr. Irawati, SE, M. Ak, Ak, CA, lahir di Pekanbaru, meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Kristen Maranatha Bandung bidang Akuntansi, Pernah menjadi Asisten Dosen dari tahun 2002-2004 pada Universitas Kristen Maranatha, bandung, dan

mengambil Pendidikan Pasca Sarjana Akuntansi dan Profesi Akuntansi di Universitas Riau, Pekanbaru serta Pendidikan Doktor diselesaikan di Universitas Andalas, Padang pada program studi Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi Akuntansi. Dosen Tetap Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru sejak tahun 2007 hingga sekarang.



Hanifah, S.E., M.M. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor Tahun 2006, Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Pascasarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas La Tansa Mashiro Tahun 2015, Dosen Tetap Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas La Tansa Mashiro terhitung Tahun 2009 dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas La Tansa Mashiro Tahun 2009 sampai sekarang.



Wajib Ginting, seorang penulis, peneliti, Trainer Pelatihan Nasional dibeberapa Provider, Auditor dan Dosen (Jabatan “Lektor” dalam bidang Akuntansi, Keuangan dan Pajak) pada Departemen Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun. Lahir di Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 25 April

1967. Anak Pertama dari enam bersaudara, pasangan A. Ginting dan M. Sembiring. Menamatkan pendidikan Dasar, lanjutan pertama dan menengah di Kota Kaban Jahe; Program Sarjana (S1) di Universitas Advent Indonesia, dan Program Pasca sarjana (Program Magister-S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Dan Sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Pada Universitas Islam Negeri Bandung. Pemegang 2 (dua) Sertifikasi bidang Akuntansi (Certificate chartered Accountant) dan Konsultan Pajak (Certificate Breavet Pajak), Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi (Artikel) pada Jurnal Nasional terindeks Sinta. Seperti: Majalah Bisnis & IPTEK, STIE Pasundan, Bandung. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 11 (1). pp 1-11. (2018); Penelitian dan Publikasi – Proceeding GAMAICEB 2020; The 8th Gadjah Mada International Conference on Economics and Business, “Pandemic, Humanitarianism, and Business Resilience”- Presentasi Oral – Online via Zoom Sept, 12 2020; *Digital Receipts of Online Transactions in the Reconciliation Processing and Financial Reporting Preparation*; Acman: Accounting and Management Journal, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang Studi pada salah satu perusahaan retail di Kota Bandung 1 (1) pp. 1-5. (2021); Jurnal JRAK UMM-Universitas Muhammadiyah Online Sales and Payment In Smes

Financial Reporting Preparation 11 (1) pp. 204-223. (2021); Acman: Accounting and Management Journal, The Influence Of Taxpayer Knowledge And Taxpayer's Awareness On Land And Building Taxpayer Compliance (Study In One Of The District In Bandung District) 2 (2) pp. 100-105. (2022); Jurnal Ekonomi, Koprasi & Kewirausahaan, Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Majalaya Bandung 14 (8) pp. 1220-1238. (2024), dan lain lain.

 googlescholar.ID: B59c8CkAAAAJ;

 SintalID: 6786696;

 WOS. ID: JNS-3014-2023;

 GARUDA, ID: 6721251;

E-mail: wajibginting25@gmail.com



Agnes Eyne Banea, SE., MSA., C.PFM Lahir di Minahasa Sulawesi Utara Tahun 1980 adalah dosen tetap di program studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung (STBM DS). Program Sarjana diselesaikan di UKIP Papua, Magister diselesaikan di Program Studi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT). Saat ini penulis sedang melanjutkan kuliah S3 di program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.



Helly Aroza Siregar, lahir pada tanggal 26 Desember 1984 di Pekanbaru. Penulis adalah seorang dosen yang mengabdikan diri di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru.

Penulis menamatkan kuliah jenjang S1 Jurusan Akuntansi pada tahun 2007 di Fakultas Bisnis Universitas Riau. Selanjutnya meneruskan pendidikan S2 pada program Magister Akuntansi di kampus yang sama dan tamat pada tahun 2013. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan di Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis aktif menulis sejak bangku SMA dan menjadi redaksi pada buletin kampus pada saat mengenyam pendidikan S1. Buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah Buku Akuntansi Pariwisata dan Bakar Tongkang: Manajemen Pengetahuan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Etnis Tionghoa Di Bagansiapiapi (Instrumen Pengukuran Daya Saing Pariwisata Budaya Berkelanjutan).



Ahmad Gazali, SE., Ak., MSA. Lahir di Ternate Tahun 1968 adalah dosen tetap di program studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung (STBM DS). Program

Sarjana dan Magister diselesaikan di Program Studi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT).